



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 91 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dan merupakan hak yang wajib dipenuhi bagi seluruh penduduk di Daerah;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang melalui upaya yang terukur dan berkelanjutan;
 - c. bahwa diperlukan pengaturan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemenuhan ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi pangan melalui Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2023-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2023-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut RAD-PG adalah rencana aksi kabupaten berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
3. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Sleman.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
8. Pemangku kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan pembangunan pangan dan gizi.

Pasal 2

Maksud disusunnya RAD-PG adalah sebagai panduan, arahan, dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan pembangunan Pangan dan Gizi.

Pasal 3

Ruang lingkup RAD-PG meliputi peran institusi Pemerintah Daerah, organisasi non pemerintah, masyarakat, dan Pemangku Kepentingan dalam mewujudkan ketahanan Pangan dan Gizi.



Pasal 4

RAD-PG bertujuan:

- a. meningkatkan pemahaman dan peran serta seluruh Pemangku Kepentingan dalam perbaikan dan pemantapan ketahanan Pangan dan Gizi;
- b. meningkatkan kemampuan analisis perkembangan situasi Pangan dan Gizi di Daerah agar:
 1. mampu menetapkan prioritas penanganan masalah Pangan dan Gizi;
 2. mampu memilih intervensi yang tepat sesuai kebutuhan lokal;
 3. mampu membangun dan memfungsikan lembaga Pangan dan Gizi; dan
 4. mampu memantau dan mengevaluasi pembangunan Pangan dan Gizi;
- c. mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait Pangan dan Gizi secara terpadu untuk diimplementasikan secara rinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi, dan koordinasi yang baik;
- d. meningkatkan komitmen Pemangku Kepentingan mulai dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dalam rangka mencapai tujuan yakni mewujudkan ketahanan Pangan dan Gizi yang berkelanjutan di Daerah; dan
- e. membangun dan mengoptimalkan lembaga Pangan dan Gizi di Daerah.

Pasal 5

- (1) Sistematika Dokumen RAD-PG terdiri atas :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II ANALISIS SITUASI

BAB III RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI

BAB IV PELAKSANAAN RENCANA AKSI

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

BAB VI PENUTUP

- (2) Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah membentuk forum koordinasi dalam pelaksanaan RAD –PG.
- (2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Kementerian/lembaga terkait; dan
 - c. Pemangku Kepentingan.
- (3) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
Pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 91 TAHUN 2023



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 91 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN
DAN GIZI KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2023 – 2026

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2023 – 2026



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABELv

DAFTAR GAMBAR.....vi

BAB I. PENDAHULUAN.....1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Kedudukan RAD-PG Dalam Kebijakan Pembangunan Daerah2

1.3. Tujuan Penyusunan3

1.4. Dasar Hukum Penyusunan RAD-PG3

BAB II. ANALISIS SITUASI6

2.1. Situasi Saat ini.....6

2.1.1. Ketersediaan Pangan 16

2.1.2. Distribusi Pangan.....21

2.1.3. Konsumsi Pangan22

2.1.4. Keamanan Pangan32

2.2. Hambatan/Permasalahan.....33

2.2.1. Ketersediaan Pangan.....33

2.2.2. Konsumsi dan Keamanan Pangan33

2.2.3. Gizi dan Kesehatan Masyarakat34

2.2.4. Dampak Bencana terhadap Pangan dan Gizi48

2.3. Tantangan.....49

2.3.1. Rawan bencana49

2.3.2. Dampak perubahan iklim.....49

2.3.3. Transisi demografi pada bidang pertanian.....49

2.3.4. Transisi gizi49

2.3.5. Demografi49

2.4 Telaah Kebijakan50

2.5 Hambatan Masalah Kesehatan Masyarakat.....52

BAB III. RENCANA AKSI MULTI SEKTORAL53

3.1. Tujuan dan Sasaran (outcome)53

3.2. Ruang Lingkup54

3.3. Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi55

 3.2.1. Respon Kebijakan Pangan dan Gizi di Daerah dalam Situasi Darurat.55

 3.2.2. Pengarusutamaan Gender dalam RAD-PG.....56

BAB IV. KERANGKA PELAKSANAAN RENCANA AKSI57

 4.1. Strategi dan Aksi.....57

 4.2. Pengorganisasian61

 4.3. Peran Sektor Non-Pemerintah (Swasta dan Lembaga Masyarakat)61

 4.4. Pembiayaan62

BAB V. PEMANTAUAN DAN EVALUASI63

 5.1. Pemantauan dan Evaluasi63

 5.2. Waktu dan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi63

 5.3. Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi63

BAB VI. PENUTUP65

DAFTAR PUSTAKA.....66

LAMPIRAN.....67

DAFTAR TABEL

Tabel II-1. Luas tanam tanaman pangan di Kabupaten Sleman Tahun 2018 - 2022 (ha) 7

Tabel II-2. Luas panen tanaman pangan di Kabupaten Sleman Tahun 2018 - 2022 (ha)..... 9

Tabel II-3. Produksi tanaman pangan di Kabupaten Sleman Tahun 2018 - 2022 (ton) 11

Tabel II-4. Produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Sleman Tahun 2018 - 2022 (kw/ha)... 13

Tabel II-5. Perkembangan luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas tanaman padi di Kabupaten Sleman Tahun 2018 – 2022 14

Tabel II-6. Produksi Buah-buahan dan Sayur-sayuran Kabupaten Sleman..... 15

Tabel II-7. Produksi Perkebunan Kabupaten Sleman 15

Tabel II-8. Populasi Peternakan Kabupaten Sleman..... 16

Tabel II-9. Produksi Perikanan Kabupaten Sleman..... 16

Tabel II-10. Analisis surplus minus di Kabupaten Sleman Tahun 2021 18

Tabel II-11. Ketersediaan dan Tingkat Ketersediaan Energi di Kabupaten Sleman 19

Tahun 2021 19

Tabel II-12. Ketersediaan Protein di Kabupaten Sleman Tahun 2021 20

Tabel II-13. Situasi Kerawanan Pangan dan Gizi per indikator di Kabupaten Sleman..... 22

Tabel II-14. Kinerja PPH Konsumsi Pangan Kabupaten Sleman Tahun 2021..... 24

Tabel II-15. Perkembangan Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak Kabupaten 25

Sleman Tahun 2021 25

Tabel II-16. Konsumsi Pangan Karbohidrat Non Beras di Kabupaten Sleman Tahun 2020 dan 2021 (Kg/Kapita/Tahun) 27

Tabel II-17. Konsumsi Energi Per Kapita Per Hari Menurut Total Wilayah di 27

Kabupaten Sleman Tahun 2022 (%) 28

Tabel II-18. Konsumsi Protein Per Kapita Per Hari Menurut Total Wilayah di 28

Kabupaten Sleman Tahun 2022 (%) 28

Tabel II-19. Konsumsi Pangan Hewani di Kabupaten Sleman Tahun 2022 (kg/kap/th)..... 29

Tabel II-20. Rasio jumlah tenaga kesehatan 36

Tabel II-21. Jumlah Posyandu dan Posbindu di Kab Sleman Tahun 2022..... 38

Tabel II-22. Jumlah Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) di Puskesmas di Kab Sleman Tahun 2022 41

Tabel II-23. Cakupan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI Eksklusif 42

Tabel II-24. Tingkat partisipasi masyarakat pada penimbangan balita 43

Tabel III-1. Intermediate Outcome dan Outcome Kabupaten Sleman 53

Tabel IV-1. Rencana Aksi Pangan dan Gizi Kabupaten Sleman Tahun 2023-2026 57

DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1 Luas tanam tanaman pangan di Kabupaten Sleman Tahun 2018 – 2022 7

Gambar II-2 Luas panen tanaman pangan di Kabupetan Sleman Tahun 2018 – 2022..... 10

Gambar II-3 Produksi tanaman pangan di Kabupaten Sleman Tahun 2018 - 2022 12

Gambar II-4 Produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Sleman Tahun 2018 - 2022 13

Gambar II-5. Perkembangan luas tanam, luas panen, produksi, produktivitas tanaman 14

padi di Kabupetan Slemn tahun 2018 – 2022 14

Gambar II-6. Perkembangan Ketersediaan Protein Kabupaten Sleman (gram/kapita/hari) 21

Gambar II-7. Konsumsi beras di Kabupaten Sleman Tahun 2020 dan 2021 (ton/tahun)..... 26

Gambar II-8. Konsumsi Pangan Sumber Karbohidrat Non Beras di Kabupaten Sleman 26

(ton/tahun)..... 26

Gambar II-9. Konsumsi Pangan Kacang-Kacangan di Kabupaten Sleman..... 30

(Kg/Kapita/Tahun)..... 30

Gambar II-10. Konsumsi Pangan Sayuran di Kabupaten Sleman (Kg/Kapita/Tahun) 31

Gambar II-11. Konsumsi Pangan Buah di Kabupaten Sleman (Kg/Kapita/Tahun) 32

Gambar II-12. Alur Penjaminan Keamanan dan Kualitas pada Rantai Suplai Pangan 33

Gambar II-13. Capaian rumah sehat di Kabupaten Sleman tahun 2017-2021 34

Gambar II-14. Kesehatan tempat-tempat umum Kab Sleman tahun 2017-2021 34

Gambar II-15. Tren target dan capaian PHBS 35

Gambar II-16. Capaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 35

Gambar II-17. Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Sleman tahun 2022..... 36

Gambar II-18. Jumlah dan jenis fasilitas layanan kesehatan 37

Gambar II-19. Trend jumlah Posbindu tahun 2019-2021 37

Gambar II- 20. Posyandu Mandiri dan Purnama 38

Gambar II-21. Tren Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Sleman 2010-2021 39

Gambar II-22. Trend prevalensi KEK ibu hamil di Kab Sleman tahun 2018-2022 39

Gambar II-23. Prevalensi anemia di Kab Sleman tahun 2018-2022 40

Gambar II-24. Trend jumlah BBLR di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022..... 41

Gambar II-25. Tren cakupan ASI eksklusif di Kabupaten Sleman tahun 2018-2022 43

Gambar II-26. Stunting balita di Kabupaten Sleman tahun 2019-2022 berdasarkan survei nasional 44

Gambar II-27. Tren prevalensi stunting di Kab Sleman (data rutin) 44

Gambar II-28. Jumlah keluarga berisiko stunting..... 45

Gambar II-29. Prevalensi stunting per kecamatan di Kabupaten Sleman tahun 2022..... 45

Gambar II-30. Prevalensi BGM di Kabupaten Sleman tahun 2022..... 45

Gambar II-31. Tren prevalensi balita KEP di Kabupaten Sleman tahun 2018-2022..... 46

Gambar II-32. Jenis malnutrisi pada balita di Kab Sleman tahun 2022 46

Gambar II-33. Trend prevalensi penyakit Hipertensi di Kabupaten Sleman 47

Gambar II-34. Trend prevalensi penyakit diabetes melitus (DM) di Kabupaten Sleman 48

Gambar II-35. Trend prevalensi penyakit Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Sleman..... 48

Gambar. II.36. Jumlah Penduduk Kabupaten Sleman Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018-2021 50

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu SDM yang memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas. Bukti empiris menunjukkan bahwa hal ini sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, dan status gizi yang baik ditentukan oleh jumlah asupan pangan yang dikonsumsi. Oleh karena itu pemenuhan pangan dan gizi untuk kesehatan warga negara merupakan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pangan dan gizi merupakan faktor penting dalam pembangunan manusia Indonesia. Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak azasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemenuhan kebutuhan pangan akan mendukung tercapainya status gizi yang baik sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Sejalan dengan hal tersebut, maka ketahanan pangan dan gizi menjadi salah satu keadaan yang akan diwujudkan dalam pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk mendukung upaya membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.

Ketahanan pangan dan gizi dapat dicapai melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan secara terpadu (*integrated*), terukur (*measurable*) dan berkelanjutan (*sustainable*). Hal ini diwujudkan melalui penyusunan instrumen kebijakan Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang telah diimplementasikan secara nasional sejak tahun 2001.

Dasar hukum kebijakan pangan dan gizi tersebut yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana aksi pangan dan gizi setiap lima tahun. Selanjutnya, dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi bahwa Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) provinsi atau RAD-PG kabupaten/kota ditetapkan oleh kepala daerah sesuai kebutuhan serta kewenangan masing-masing.

Sejalan dengan perkembangan saat ini, ketahanan pangan dan gizi hendaknya tidak hanya berorientasi pada sektor pangan dan pertanian yang berada di hulu serta kesehatan dan gizi di hilirnya, tetapi melibatkan aspek yang lebih luas. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan kementerian/lembaga terkait dan didampingi oleh pakar telah menyusun RAN-PG Tahun 2021-2024 sebagai acuan terkini bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.

RAN-PG adalah dokumen rencana kerja lima tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian target ketahanan pangan dan gizi nasional. RAN-PG 2021- 2024 berorientasi pada ketahanan pangan dan gizi hingga ke tingkat rumah tangga melalui penguatan di empat aspek ketahanan pangan dan gizi yaitu aspek ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kelembagaan sistem pangan dan gizi. Selanjutnya Provinsi dan Kabupaten/Kota menjabarkan kebijakan dan langkah terpadu ketahanan pangan dan gizi kedalam RAD-PG yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, sesuai kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing, serta mengedepankan aspek keterpaduan dan keberlanjutan dalam pelaksanaannya. Dengan RAD-PG diharapkan pemerintah daerah memiliki komitmen dan kejelasan perencanaan dan penganggaran program serta kegiatan untuk mencapai sasaran ketahanan pangan dan gizi.

Pembangunan ketahanan pangan dan gizi Kabupaten Sleman secara menyeluruh di setiap sektornya akan dapat terlaksana dengan efektif ketika memiliki arah yang jelas dan terukur kinerjanya. Program-program dalam rangka pembangunan ketahanan pangan dan gizi harus terpadu (*integrated*), terukur keberhasilannya (*measureable*), dan berkesinambungan (*sustainability*). Oleh karena itu, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan pangan dan gizi sebagai panduan.

1.2. Kedudukan RAD-PG Dalam Kebijakan Pembangunan Daerah

Terwujudnya *Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong* merupakan visi Presiden 2020-2024 yang salah satunya dicapai dengan misi pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur terutama infrastruktur pelayanan dasar. Hal ini menempatkan pembangunan pangan dan gizi menjadi salah satu prioritas nasional sebagaimana tercantum di dalam RPJMN 2020-2024.

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) memiliki posisi yang strategis di dalam pembangunan pangan dan gizi. RAD-PG menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menentukan prioritas kegiatan dan berbagai kegiatan lainnya yang lebih efektif dan berbasis bukti. Selain itu juga menjadi alat advokasi untuk menjelaskan pentingnya pangan dan gizi kepada para pengambil kebijakan, menggalang komitmen perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pangan dan gizi, dan sebagai arahan untuk menyiapkan perencanaan dan penganggaran yang baik di daerah sehingga sesuai dengan prioritas provinsi dan daerah.

Sebagai terjemahan dari perencanaan daerah, maka kedudukan RAD-PG di daerah sama halnya dengan RAD-PG DIY Tahun 2021-2024, RAD-PG Kabupaten Sleman disusun menyesuaikan kebutuhan daerah, sejalan dengan RAD-PG DIY Tahun 2021-2024 dan juga RPJMD Kabupaten Sleman. Dengan demikian kedudukan RAD-PG akan menjadi strategis khususnya pembangunan pangan dan gizi serta perbaikan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, program dan kegiatan dalam RAD-PG hendaknya mudah diterapkan di lapangan dan

keberhasilannya dapat diukur serta didukung oleh pendanaan yang memadai. Sehubungan dengan hal tersebut maka kedudukan RAD-PG sebagai berikut :

1. Kedudukan RAD-PG Kabupaten Sleman Tahun 2023-2026 sama halnya dengan RAD-PG DIY Tahun 2021-2024.
2. RAD-PG Kabupaten Sleman Tahun 2023-2026 harus sejalan dengan RPJMN 2020-2024, RAD-PG DIY 2021-2024, RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, serta Rensta SKPD Kabupaten Sleman.
3. Kedudukan RAD-PG Kabupaten Sleman Tahun 2023-2026 akan menjadi strategis khususnya pembangunan pangan dan gizi serta perbaikan kualitas sumber daya manusia.

1.3. Tujuan Penyusunan

Tujuan umum dari penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Sleman Tahun 2023-2026 ini sebagai panduan dan acuan bagi para pemangku kepentingan baik Perangkat Daerah, instansi vertikal, swasta, BUMN / BUMD, perguruan tinggi, serta masyarakat pada umumnya dalam menjabarkan lebih lanjut secara terintegrasi, terkoordinasi, dan sinergis berbagai kegiatan nyata untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi mendatang di Kabupaten Sleman.

Secara khusus, tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Sleman Tahun 2023-2026, sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dalam peran sertanya untuk perbaikan dan pemantapan ketahanan pangan dan gizi.
2. Meningkatkan kemampuan menganalisis perkembangan situasi pangan dan gizi di setiap wilayah agar : (i) mampu menetapkan prioritas penanganan masalah pangan dan gizi; (ii) mampu memilih intervensi yang tepat sesuai kebutuhan local; (iii) mampu membangun dan memfungsikan lembaga pangan dan gizi; dan (iv) mampu memantau dan mengevaluasi Pembangunan pangan dan gizi.
3. Mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait pangan dan gizi secara terpadu untuk diimplementasikan secara terinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi, dan koordinasi yang baik.
4. Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan mulai dari perencanaan, implementasi dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing dalam rangka mencapai tujuan yaitu mewujudkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan di Kabupaten Sleman.
5. Membangun dan mengoptimalkan lembaga pangan dan gizi di Kabupaten Sleman.

1.4. Dasar Hukum Penyusunan RAD-PG

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir

- dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 1955 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya Pasal 63 (ayat 3) yang menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, khususnya pasal 1 ayat (1) yang mengatur ketahanan pangan dan gizi serta Pasal 37 (ayat 1) yang mengatur tentang perbaikan Status Gizi masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 188);
 10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
 12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 13. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 124 / M.PPN / HK / 10 / 2021 Tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2021 – 2024;

14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 – 2024;
15. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026.

BAB II. ANALISIS SITUASI

2.1. Situasi Saat ini

Kebutuhan pokok manusia terdiri atas tiga bagian yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Dari ketiga kebutuhan tersebut yang paling penting adalah kebutuhan pangan. Pangan merupakan jenis kebutuhan yang paling utama bagi manusia. Pangan dibutuhkan manusia secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Pangan merupakan kebutuhan pokok dan mendasar bagi manusia, sehingga ketersediaan, distribusi, dan akses pangan serta tingkat harga sangat berpengaruh terhadap stabilitas wilayah (tingkat daerah/nasional).

Negara mengamanatkan untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal (Undang-undang No 18 tahun 2012). Pencapaian amanat UU tersebut tergambar pada kondisi aksesibilitas pangan yang terdiri dari: (1) ketersediaan pangan, (2) tingkat konsumsi pangan, dan (3) ketahanan dan kerentanan pangan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman kembali meningkat di tahun 2021 di angka 5,616 setelah terpuruk di -4,05 di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman masih di atas pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta selama lima tahun terakhir. Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sleman juga merupakan tertinggi kedua di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta setelah Kota Yogyakarta. Selain itu tingkat kemiskinan Kabupaten Sleman masih lebih baik dibandingkan rata-rata Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sisi lain, ketimpangan pendapatan yang tercermin dari Indeks Gini juga merupakan yang tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga ketimpangan pendapatan antara kelompok berpendapatan terendah dan tertinggi di Kabupaten Sleman relatif tinggi. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Sleman terus berupaya memacu pembangunan ketahanan pangan dan gizi melalui program-program yang benar-benar mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi Kabupaten Sleman saat ini secara umum adalah sebagai berikut :

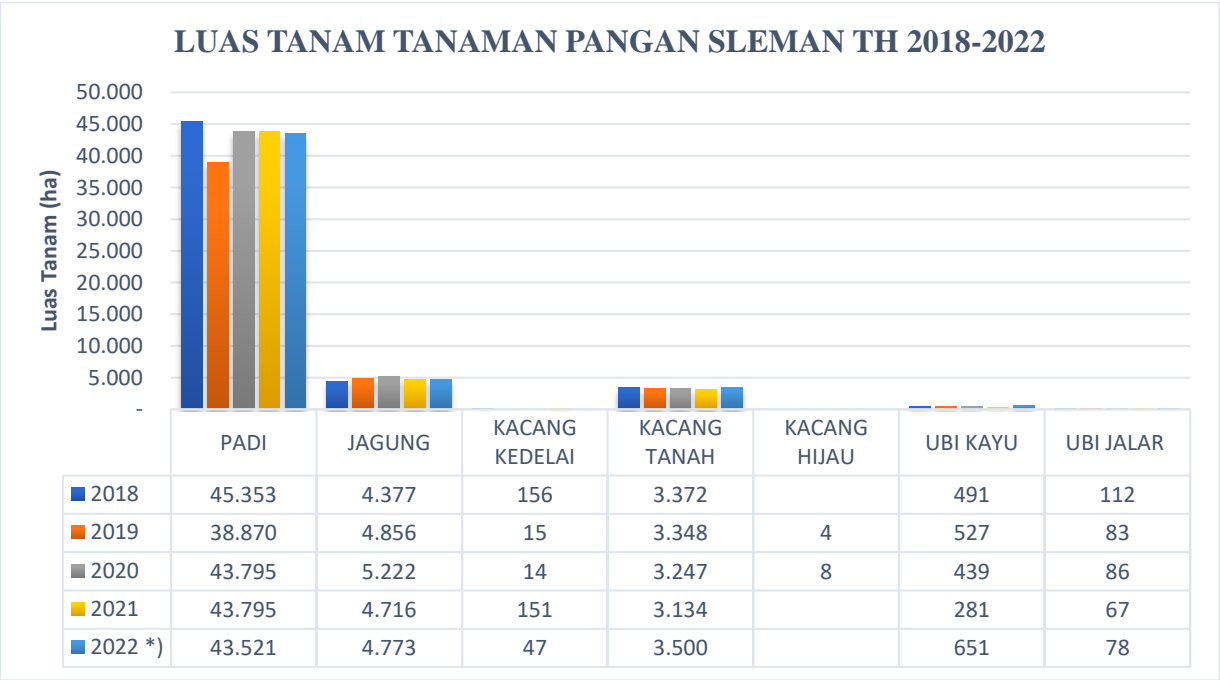
Dari Neraca Bahan Makanan Tahun 2021 maka terlihat produksi padi (255.992,51 ton), jagung (33.577,32 ton) dan ubi kayu (8.614,54 ton) merupakan hasil produksi tanaman pangan terbanyak di Kabupaten Sleman pada tahun 2021, sementara jika dilihat dari tahun 2022 terlihat juga yang terbanyak adalah padi (256.708,18 ton), jagung (34.065,70 ton) dan ubi kayu (8.393,61). Produksi tanaman pangan paling rendah di Kabupaten Sleman, pada tahun 2021, adalah kacang hijau (0 ton) dimana tidak ada produksi kacang hijau, sehingga kebutuhan kacang hijau di Kabupaten Sleman di peroleh dari import, terendah berikutnya kacang kedelai (228,46 ton), dan ubi jalar (1.348,81 ton). Sementara untuk luas tanam yang terbesar di Kabupaten Sleman pada tahun 2021 adalah padi (43.795,00 Ha), jagung (4.715,70 Ha) dan kacang tanah (3.133,50 ha),

sedangkan untuk luas panen terbesar di Kabupaten Sleman pada tahun 2021 adalah padi (41.620,50 Ha), jagung (4.709,70 Ha), dan kacang tanah (2.989,40 Ha). Adapun grafik luas tanam, luas panen dan produksi tanaman pangan di Kabupaten Sleman tersaji pada gambar berikut dibawah ini :

Tabel II-1. Luas tanam tanaman pangan di Kabupaten Sleman Tahun 2018 - 2022 (ha)

No	Jenis Tanaman Pangan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Padi	45.353	38.870	43.795	43.795	43.521
2	Jagung	4.377	4.856	5.222	4.716	4.773
3	Kacang Kedelai	156	15	14	151	47
4	Kacang Tanah	3.372	3.348	3.247	3.134	3.500
5	Kacang Hijau	-	4	8	-	-
6	Ubi Kayu	491	527	439	281	651
7	Ubi Jalar	112	83	86	67	78

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, 2022



Gambar II-1 Luas tanam tanaman pangan di Kabupaten Sleman tahun 2018 – 2022

Dari tabel II-1 dan gambar II-1 diatas, dapat dilihat tanaman pangan padi mengalami penyusutan areal luas tanamnya dimana terlihat pada tahun 2019 terjadi penurunan yang cukup drastis hingga mencapai 38.870 ha, hal ini di akibatkan karena adanya puso, sementara luas tanam tanaman pangan padi yang terbanyak terjadi pada tahun 2018 sebanyak 45.353 ha. Pada tahun 2020 dan 2021 luas tanam tanaman pangan padi memiliki luas tanam yang sama yaitu sebanyak 43.795 ha, hal ini terjadi karena pada tahun 2020 dan 2021 terjadi wabah COVID-19, sehingga luas tanam tanaman pangan padi tidak mengalami perubahan, jika dibandingkan dengan tahun 2019, luas tanam padi pada tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan yang cukup meningkat, sedangkan untuk tahun 2022 luas tanam padi sementara adalah 43.521 ha. Untuk luas tanam tanaman pangan jagung dari tahun 2018 – 2020 mengalami kenaikan, dimana luas tanam terbesar terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 5.222 ha. Sementara pada tahun 2021 luas tanam tanaman

pangan jagung mengalami penurunan menjadi 4.716 ha dan di tahun 2022 luas tanam tanaman pangan jagung mengalami kenaikan sedikit menjadi 4.773 ha.

Untuk luas tanam tanaman pangan kacang kedelai dari tahun 2018 – 2020 mengalami penurunan yang sangat dratis dan tidak wajar dari 156 ha menjadi 15 ha dan turun kembali menjadi 14 ha, hal ini terjadi karena petani kesulitan untuk memperoleh bibit kedelai subsidi maupun mandiri dengan harga murah, harga bibit kacang kedelai mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi, sehingga mengakibatkan petani enggan untuk menanam kacang kedelai. Sedangkan di tahun 2021 mengalami kenaikan kembali menjadi 151 ha, ini terjadi karena harga bibit kacang kedelai di tingkat petani stabil, untuk luas tanam tanaman pangan kacang kedelai di tahun 2022 mengalami penurunan kembali sebanyak 47 ha. Untuk tanaman pangan kacang tanah luas tanam dari tahun 2018 – 2021 mengalami penurunan dari 3.372 ha menjadi 3.348 ha, turun lagi menjadi 3.247 ha pada tahun 2020 dan turun kembali di tahun 2021 menjadi 3.134 ha, sedangkan untuk tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 3.500 ha. Sementara untuk tanaman pangan kacang hijau luas tanam pada tahun 2018 dan 2021 tidak ada alias tidak ada petani yang menanam kacang hijau, di tahun 2019 dan 2020 ada petani yang menanam kacang hijau dengan luas tanam masing-masing 4 ha dan 8 ha, untuk tahun 2022 tidak ada luas tanam untuk tanaman pangan kacang hijau.

Luas tanam tanaman pangan ubi kayu mengalami fluktuasi setiap tahunnya naik dan turun, pada tahun 2018 luas tanam tanaman pangan ubi kayu sebanyak 491 ha dan mengalami penambahan pada tahun 2019 menjadi 527 ha, sedangkan di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 439 ha dan di tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi 281 ha, di tahun 2022 untuk sementara mengalami kenaikan menjadi 651 ha. Untuk luas tanam tanaman ubi jalar hampir sama kasusnya dengan tanaman pangan ubi kayu yang mana mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya, dimana pada tahun 2018 luas tanam tanaman pangan ubi jalar sebanyak 112 ha mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 83 ha, naik kembali di tahun 2020 menjadi 86 ha dan turun kembali menjadi 67 ha di tahun 2021, di tahun 2022 luas tanam tanaman pangan ubi jalar naik menjadi 78 ha.

Luas panen tanaman pangan padi mengalami penyusutan areal luas panennya dimana terlihat pada tahun 2019 terjadi penurunan yang cukup drastis hingga mencapai 42.053 ha, hal ini di akibatkan karena adanya puso, sementara luas panen tanaman pangan padi yang terbanyak terjadi pada tahun 2018, yaitu sebanyak 46.820 ha. Pada tahun 2020 dan 2021 luas panen tanaman pangan padi memiliki luas panen yang sama yaitu sebanyak 41.620,50 ha, hal ini terjadi karena pada tahun 2020 dan 2021 terjadi wabah Covid-19, sehingga luas panen tanaman pangan padi tidak mengalami perubahan, jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019 luas panen tanaman pangan padi di tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan, sedangkan untuk tahun 2022 luas panen tanaman pangan padi adalah 42.353 ha. Untuk luas panen tanaman pangan jagung dari tahun 2018 – 2020 mengalami kenaikan dari 4.355,80 ha menjadi 4.949 ha di tahun 2019, dan mengalami kenaikan di tahun 2020 dimana luas panen tanaman pangan jagung menjadi yang terbesar terjadi, yaitu sebesar 5.181,20 ha. Sementara pada tahun 2021 luas panen tanaman pangan jagung

mengalami penurunan menjadi 4.709,70 ha dan di tahun 2022 luas panen tanaman pangan jagung mengalami kenaikan sedikit menjadi 4.791,35 ha.

Untuk luas panen tanaman pangan kacang kedelai dari tahun 2018 – 2020 mengalami penurunan yang sangat dratis dan tidak wajar dari 156 ha menjadi 15 ha dan turun kembali menjadi 14,1 ha, hal ini terjadi karena petani kesulitan untuk memperoleh benih kacang kedelai subsidi maupun mandiri dengan harga murah, harga bibit kacang kedelai mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi, sehingga mengakibatkan petani enggan untuk menanam kacang kedelai dan berimbas pada sedikitnya petani yang memanen kacang kedelai. Sedangkan di tahun 2021 mengalami kenaikan kembali menjadi 151 ha, ini terjadi karena harga bibit kedelai di tingkat petani sedang stabil, untuk luas panen tanaman pangan kacang kedelai di tahun 2022 mengalami penurunan kembali sebanyak 47,4 ha. Untuk tanaman pangan kacang tanah luas panen dari tahun 2018 – 2021 mengalami penurunan dari 3.646 ha menjadi 3.282,2 ha, turun lagi menjadi 3,250,1 ha pada tahun 2020 dan turun kembali di tahun 2021 menjadi 2.989,4 ha, sedangkan untuk tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 3.160,95 ha dibandingkan dengan luas panen tanaman pangan kacang tanah di tahun 2021. Sementara untuk tanaman pangan kacang hijau luas panen pada tahun 2018 dan 2021 tidak ada alias tidak ada petani yang memanen kacang hijau, di tahun 2019 dan 2020 ada petani yang memanen tanaman pangan kacang hijau dengan luas panen masing-masing 3,8 ha dan 8,6 ha, untuk tahun 2022 tidak ada luas panen untuk tanaman pangan kacang hijau.

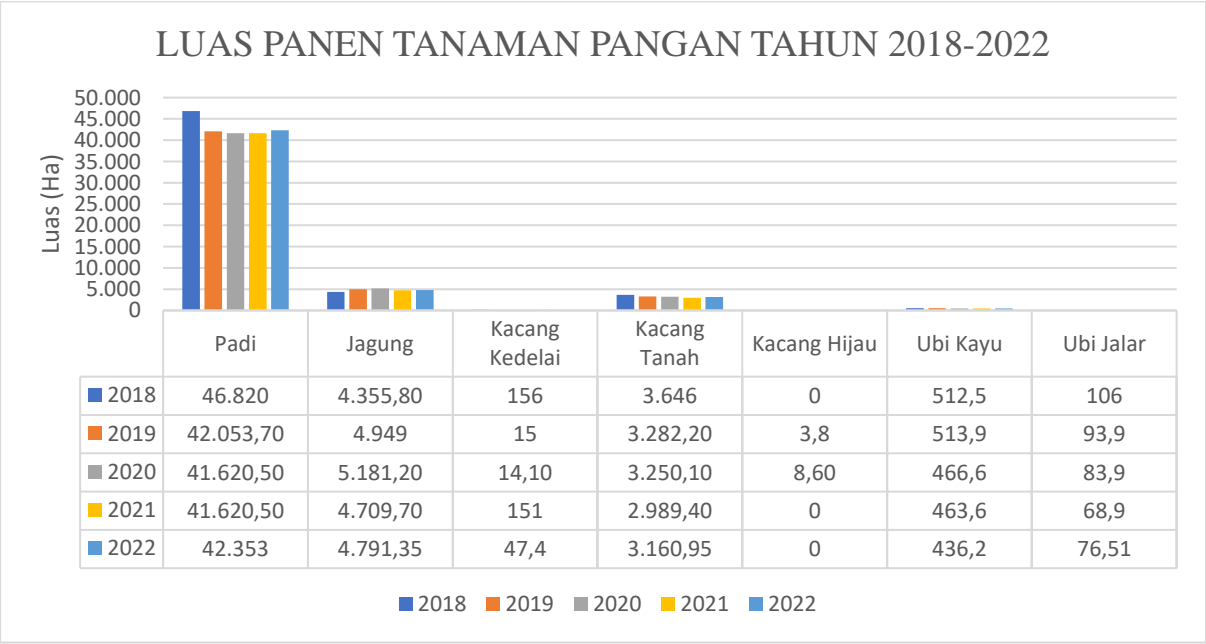
Luas panen tanaman pangan ubi kayu mengalami fluktuasi setiap tahunnya naik dan turun, pada tahun 2018 luas panen tanaman pangan ubi kayu sebanyak 512,5 ha dan mengalami penambahan pada tahun 2019 menjadi 513,9 ha, sedangkan di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 466,6 ha dan di tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi 463,60 ha, di tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi 436,20 ha. Untuk luas panen tanaman ubi jalar hampir sama kasusnya dengan tanaman pangan ubi kayu yang mana mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya, dimana pada tahun 2018 luas panen tanaman pangan ubi jalar sebanyak 106 ha mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 93,9 ha, mengalami penurunan kembali di tahun 2020 menjadi 83,9 ha dan terjadi penurunan kembali menjadi 68,9 ha di tahun 2021, di tahun 2022 luas panen tanaman pangan ubi jalar naik menjadi 76,51 ha. Rincian luas panen tanaman pangan di Kabupaten Sleman Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel II-2 dan gambar II-2 dibawah ini.

Tabel II-2. Luas panen tanaman pangan di Kabupaten Sleman Tahun 2018 - 2022 (ha)

No	Jenis Tanaman Pangan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Padi	46.820,00	42.053,70	41.620,50	41.620,50	42.353,00
2	Jagung	4.355,80	4.949,00	5.181,20	4.709,70	4.791,35
3	Kacang Kedelai	156,00	15,00	14,10	151,00	47,40
4	Kacang Tanah	3.646,00	3.282,20	3.250,10	2.989,40	3.160,95
5	Kacang Hijau	-	3,80	8,60	-	-
6	Ubi Kayu	512,50	513,90	466,60	463,60	436,20

No	Jenis Tanaman Pangan	2018	2019	2020	2021	2022
7	Ubi Jalar	106,00	93,90	83,90	68,90	76,51

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, 2022



Gambar II-2 Luas panen tanaman pangan di Kabupaten Sleman tahun 2018 – 2022

Produksi tanaman pangan padi mengalami penyusutan dimana terlihat pada tahun 2018 ke tahun 2019 terjadi penurunan yang cukup dratis dari 249.878,86 ton menjadi 246.114,51 ton, hal ini di akibatkan karena adanya puso, sehingga mengakibatkan produksi tanaman pangan padi mengalami penurunan, di tahun 2020 berikutnya produksi tanaman pangan padi mengalami kenaikan menjadi 246.861,15 ton, sementara produksi tanaman pangan padi di tahun 2021 mengalami kenaikan kembali menjadi 255.992,51 ton, sedangkan di tahun 2022 mengalami kenaikan juga menjadi 256.707,68 ton. Untuk produksi tanaman pangan jagung dari tahun 2018 – 2020 mengalami kenaikan dari 31.558,47 ton menjadi 35.375,26 ton di tahun 2019, dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2020 menjadi 37.474 ton. Sementara pada tahun 2021 produksi tanaman pangan jagung mengalami penurunan menjadi 33.577,32 ton dan tahun 2022 produksi tanaman pangan jagung mengalami kenaikan sedikit menjadi 34.065,70 ton.

Untuk produksi tanaman pangan kacang kedelai dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat dratis dan tidak wajar dari 211 ton menjadi 20,25 ton dan mengalami kenaikan yang sedikit di tahun 2020 menjadi 20,99 ton. Sedangkan di tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup tinggi sekali menjadi 228,46 ton, ini terjadi karena panen kacang kedelai yang melimpah menjadikan produksi pun meningkat tajam, untuk produksi tanaman pangan kacang kedelai di tahun 2022 mengalami penurunan kembali sebanyak 72 ton. Untuk tanaman pangan kacang tanah produksi dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan dari 4.516,26 ton menjadi 4.075,81 ton, dan mengalami kenaikan lagi menjadi 4.453,59 ton pada tahun 2020 dan turun kembali di tahun 2021 menjadi 3.736,56 ton, sedangkan untuk tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 4.145,95 ton dibandingkan dengan produksi tanaman pangan kacang tanah di

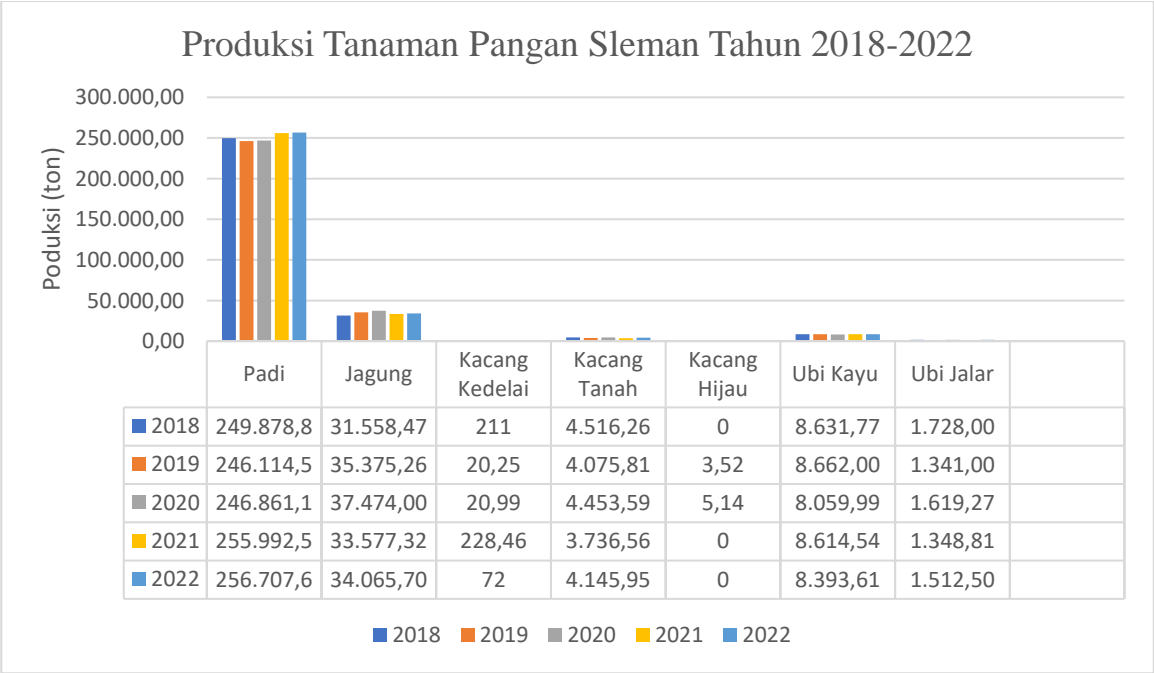
tahun 2021. Sementara untuk tanaman pangan kacang hijau produksi pada tahun 2018 dan 2021 tidak ada alias tidak ada produksi karena tidak adanya petani yang menanam tanaman pangan kacang hijau, di tahun 2019 dan 2020 ada produksi tanaman pangan kacang hijau dengan produksi masing-masing 3,52 ton dan 5,14 ton, untuk tahun 2022 tidak ada produksi untuk tanaman pangan kacang hijau.

Produksi tanaman pangan ubi kayu mengalami fluktuasi setiap tahunnya naik dan turun, pada tahun 2018 produksi tanaman pangan ubi kayu sebanyak 8.631,77 ton dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 8.662 ton, sedangkan di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 8.059,99 ton dan mengalami kenaikan kembali menjadi 8.614,54 ton di tahun 2021, di tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi 8.393,61 ton. Untuk produksi tanaman ubi jalar hampir sama kasusnya dengan tanaman pangan ubi kayu yang mana mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya, dimana pada tahun 2018 produksi tanaman pangan ubi jalar sebanyak 1.728 ton mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 1.341 ton, dan mengalami kenaikan produksi kembali di tahun 2020 menjadi 1.619,27 ton dan terjadi penurunan produksi kembali di tahun 2021 menjadi 1.348,81 ton, produksi tanaman pangan ubi jalar di tahun 2022 naik menjadi 1.512,5 ton dibandingkan dengan produksi tanaman pangan ubi jalar di tahun 2021. Rincian produksi tanaman pangan di Kabupaten Sleman Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel II-3 dan gambar II-3 dibawah ini.

Tabel II-3. Produksi tanaman pangan di Kabupaten Sleman Tahun 2018 - 2022 (ton)

No	Jenis Tanaman Pangan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Padi	249.878,86	246.114,51	246.861,15	255.992,51	256.708,18
2	Jagung	31.558,47	35.375,26	37.474,00	33.577,32	34.065,70
3	Kacang Kedelai	211,00	20,25	20,99	228,46	72,00
4	Kacang Tanah	4.516,26	4.075,81	4.453,59	3.736,56	4.145,95
5	Kacang Hijau	-	3,52	5,14	-	-
6	Ubi Kayu	8.631,77	8.662,00	8.059,99	8.614,54	8.393,61
7	Ubi Jalar	1.728,00	1.341,00	1.619,27	1.348,81	1.512,50

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, 2022



Gambar II-3 Produksi tanaman pangan di Kabupaten Sleman tahun 2018 – 2022

Produktivitas tanaman pangan padi mengalami peningkatan terus dari tahun 2018 sampai 2021 dimana terlihat pada tahun 2018 produktivitas tanaman pangan padi sebesar 53,37 kuintal/ha, mengalami kenaikan di tahun 2019 menjadi 58,52 kuintal/ha, dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2020 dan tahun 2021 menjadi 59,62 kuintal/ha dan 61,51 kuintal/ha, sedangkan di tahun 2022 sementara mengalami penurunan menjadi 60,61 kuintal/ha. Untuk produktivitas tanaman pangan jagung dari tahun 2018 – 2022 mengalami fluktuasi naik dan turun setiap tahunnya dimana di tahun 2018 produktivitas tanaman pangan jagung sebesar 72,52 kuintal/ha, mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 71,48 kuintal/ha dan mengalami kenaikan kembali menjadi 73,2 kuintal/ha di tahun 2020 serta mengalami penurunan kembali di tahun 2021 menjadi 71,29 kuintal/ha, sedangkan produktivitas di tahun 2022 sementara mengalami kenaikan kembali menjadi 71,89 kuintal/ha.

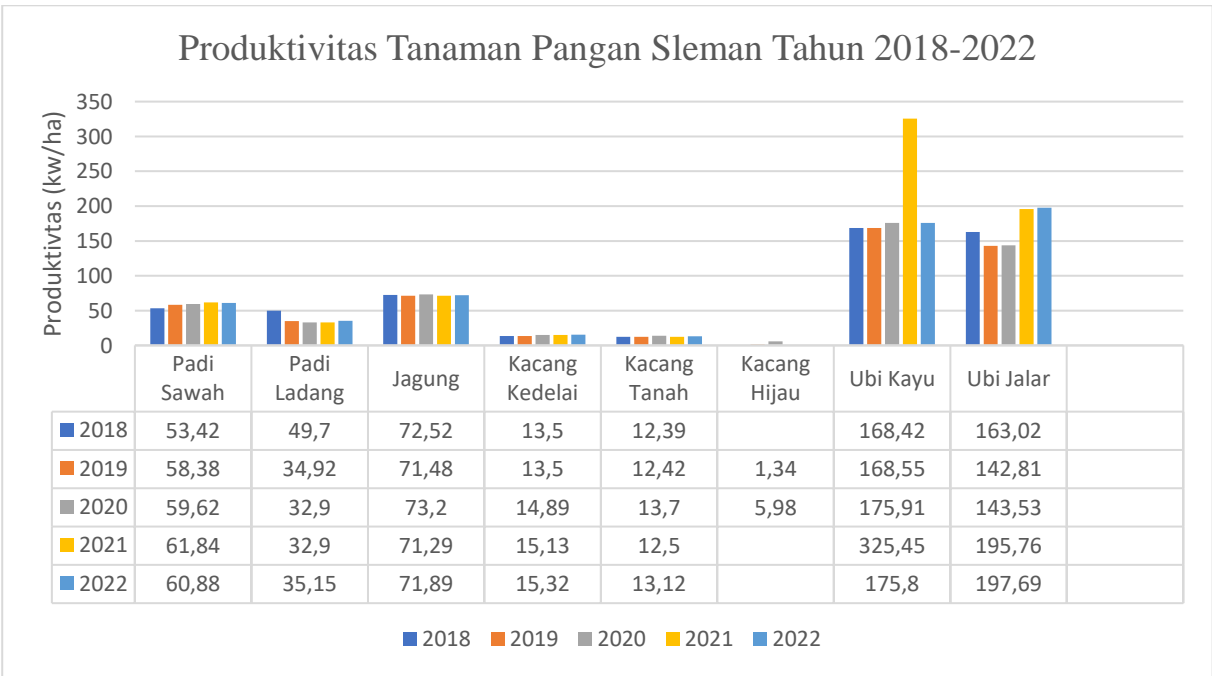
Untuk produktivitas tanaman pangan kacang kedelai pada tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami kestabilan alias sama yaitu sebesar 13,50 kuintal/ha, di tahun 2020 sampai tahun 2022 produktivitas tanaman pangan kacang kedelai mengalami kenaikan terus dari 14,89 kuintal/ha di tahun 2020 menjadi 15,13 kuintal/ha di tahun 2021, sedangkan produktivitas di tahun 2022 sebesar 15,32 kuintal/ha. Untuk tanaman pangan kacang tanah produktivitas mengalami kenaikan 3 tahun berurutan dari tahun 2018 – 2020 sebesar 12,39 kuintal/ha di tahun 2018, 12,42 kuintal/ha di tahun 2019 dan 13,70 kuintal/ha di tahun 2020, sementara di tahun 2021 mengalami penurunan produktivitas menjadi 12,50 kuintal/ha, sedangkan di tahun 2022 mengalami kenaikan kembali menjadi 13,12 kuintal/ha. Sementara untuk tanaman pangan kacang hijau produktivitas pada tahun 2018 dan 2021 tidak ada alias tidak ada produksi dan panen, di tahun 2019 dan 2020 ada kenaikan produktivitas tanaman pangan kacang hijau dari 1,34 kuintal/ha di tahun 2019 menjadi 5,98 kuintal/ha di tahun 2020, untuk tahun 2022 tidak ada produktivitas untuk tanaman pangan kacang hijau.

Produktivitas tanaman pangan ubi kayu mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dengan produktivitas sebesar 168,42 kuintal/ha di tahun 2018, meningkat di tahun 2019 menjadi 168,55 kuintal/ha dan 175,91 kuintal/ha di tahun 2020 dan meningkat cukup tinggi di tahun 2021 menjadi 325,45 kuintal/ha, sedangkan di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 175,80 kuintal/ha. Untuk produktivitas tanaman pangan ubi jalar pada tahun 2018 sebesar 163,02 kuintal/ha, mengalami penurunan yang cukup rendah di tahun 2019 sebesar 142,81 kuintal/ha dan mengalami kenaikan produktivitas di tahun 2020 menjadi 143,16 kuintal/ha serta kenaikan kembali produktivitas di tahun 2021 menjadi 195,76 kuintal/ha, sedangkan di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 197,69 kuintal/ha. Rincian produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Sleman Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel II-4 dan gambar II-4 dibawah ini.

Tabel II-4. Produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Sleman tahun 2018 - 2022 (kw/ha)

No	Jenis Tanaman Pangan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Padi	53,37	58,52	59,62	61,51	60,61
2	Jagung	72,52	71,48	73,20	71,29	71,89
3	Kacang Kedelai	13,50	13,50	14,89	15,13	15,32
4	Kacang Tanah	12,39	12,42	13,70	12,50	13,12
5	Kacang Hijau	-	1,34	5,98	-	-
6	Ubi Kayu	168,42	168,55	175,91	325,45	175,80
7	Ubi Jalar	163,02	142,81	143,53	195,76	197,69

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, 2022



Gambar II-4 Produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Sleman tahun 2018 – 2022

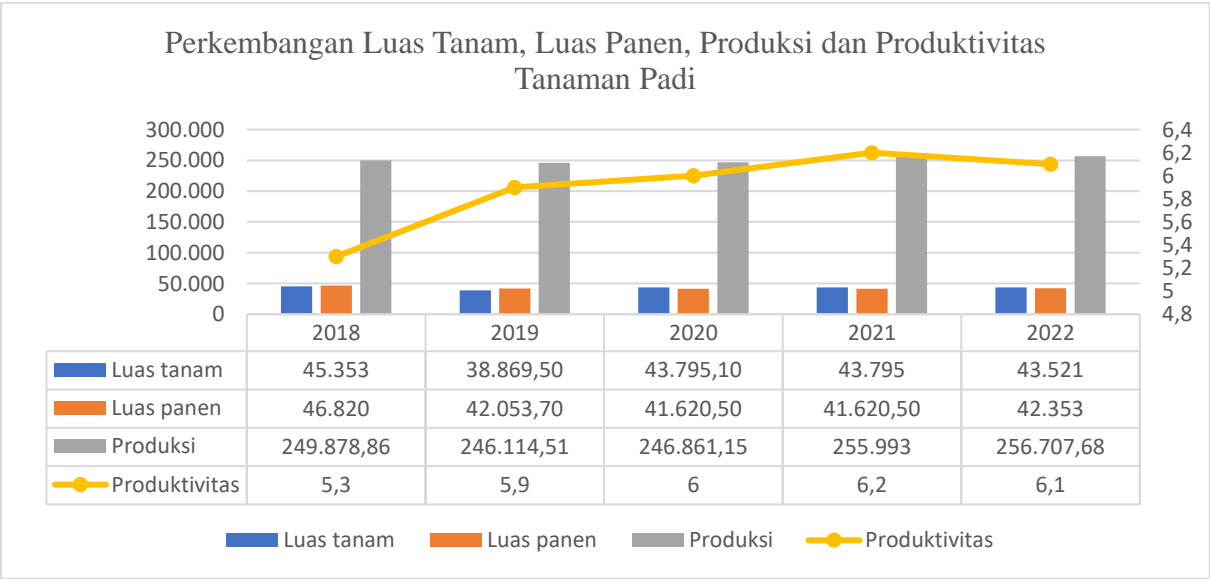
Perkembangan luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas tanaman pangan padi dari tahun 2018 sampai dengan 2022 secara rata-rata ada kenaikan dan juga ada penurunan jika dilihat dari produktivitasnya secara umum tanaman pangan padi cukup bagus di Kabupaten

Sleman. Rincian perkembangan luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas tanaman pangan padi dari tahun ke tahun selama 5 tahun (2018 – 2022) bisa dilihat pada tabel II-5 dan gambar II-5 di bawah ini.

Tabel II-5. Perkembangan luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas tanaman padi di Kabupaten Sleman tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Luas Tanam (ha)	45.353,00	38.869,50	43.795,10	43.795,00	43.521,00
2	Luas Panen (ha)	46.820,00	42.053,70	41.620,50	41.620,50	42.353,00
3	Produksi (Ton)	249.878,86	246.114,51	246.861,15	255.992,51	256.707,68
4	Produktivitas (Ton/ha)	5,34	5,85	5,96	6,15	6,09

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, 2022



Gambar II-5. Perkembangan luas tanam, luas panen, produksi, produktivitas tanaman padi di Kabupaten Sleman tahun 2018 – 2022

1. Pertanian

Kabupaten Sleman merupakan sentra utama salak pondoh di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, tanaman ini mulai ditinggalkan oleh petani karena harganya terus merosot. Pada tahun 2019, produksi salak pondoh mengalami penurunan sebesar 55,91 persen. Untuk menggairahkan minat petani, pemerintah menggalakkan ekspor dengan membentuk kelompok-kelompok tani agar buah yang dihasilkan dapat bersaing dan berkualitas. Hasilnya, buah lokal ini berhasil diekspor ke beberapa mancanegara antara lain ke Cina, Kanada, Malaysia, Vietnam, dan sebagainya. Rincian produksi buah-buahan dan sayur-sayuran bisa dilihat pada tabel II-6 dibawah ini.

Tabel II-6. Produksi Buah-buahan dan Sayur-sayuran Kabupaten Sleman

Komoditas	Satuan	2019	2020	2021	2022
Buah-Buahan					
Mangga	Kwt	92.618	77.510	40.411	24.468
Durian	Kwt	11.613	29.482	29.963	26.563
Pisang	Kwt	46.945	44.902	32.431	35.290
Nangka/Cempedak	Kwt	24.156	33.168	3.198	17.224
Salak Pondoh	Kwt	391.929	531.821	531.420	511.909
Jambu Air	Kwt	14.684	27.877	18.112	13.300
Pepaya	Kwt	20.649	19.787	15.176	18.398
Sayur-Sayuran					
Petsai	Kwt	1.390	14.139	16.964	11.689
Cabai	Kwt	12.139	122.566	99.303	111.303
Petai	Kwt	4.199	4.995	1.604	527
Melinjo	Kwt	35.413	37.883	37.883	18.909
Jengkol	Kwt	1.743	1.042	2.483	2.188

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman, 2022

2. Perkebunan

Produk perkebunan andalan Sleman yaitu kelapa dan tebu. Produk perkebunan lainnya adalah tembakau, kopi, dan kakao, namun produksi ketiga tanaman ini relatif masih sedikit. Kelapa yang biasanya ditanam di pekarangan atau di pinggir sawah dan sungai terdapat di semua kecamatan, produksi terbanyak di Kapanewon Moyudan. Tebu banyak di tanam di Kapanewon Moyudan, Godean dan Minggir. Rincian produksi perkebunan bisa dilihat pada tabel II-7 dibawah ini.

Tabel II-7. Produksi Perkebunan Kabupaten Sleman

Komoditas	Satuan	2020	2021	2022
Tembakau	Ton	301	301	184
Kelapa	Ton	6.264	6.210	7.784
Tebu	Ton	3.365	4.091	2.960
Kopi	Ton	75	85	82
Kakao	Ton	12	12	11

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman, 2022

3. Peternakan

Kabupaten Sleman memiliki populasi ternak yang beragam, seperti sapi potong, sapi perah, kerbau, dan kuda. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Kapanewon Prambanan memiliki populasi sapi potong terbanyak. Pada tahun 2021, jumlah sapi potong di Prambanan mengalami penurunan sebesar 2,90 persen. Sapi perah terbanyak berasal dari Kapanewon Cangkringan. Sementara untuk ternak kerbau dan kuda terbanyak berasal dari Kapanewon Godean. Rincian populasi bisa dilihat pada tabel II-8 dibawah ini.

Tabel II-8. Populasi Peternakan Kabupaten Sleman

Komoditas	Satuan	2020	2021	2022
Populasi				
Sapi Potong	Ekor	33.599	32.625	29.486
Sapi Perah	Ekor	3.439	3.419	3.220
Kerbau	Ekor	209	189	165
Kuda	Ekor	188	187	195

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman, 2022

4. Perikanan

Perikanan merupakan sektor yang menjanjikan di Kabupaten Sleman. Pemeliharaan ikan dilakukan di kolam, sawah bersamaan dengan tanaman padi (mina padi), budidaya karamba, dan di perairan umum. Produksi ikan di Kabupaten Sleman sebagian besar berasal dari budidaya air kolam seperti ikan nila, mujair, lele, gurami, bawal, dan belut. Produksi ikan terbesar berikutnya berasal dari perairan umum. Ikan belut merupakan bahan utama untuk membuat keripik belut. Keripik ini menjadi andalan utama masyarakat di Kapanewon Godean dan banyak diperdagangkan di toko-toko oleh-oleh khas Yogyakarta. Rincian produksi perikanan bisa dilihat pada tabel II-9 dibawah ini.

Tabel II-9. Produksi Perikanan Kabupaten Sleman

Komoditas	Satuan	2020	2021	2022
Produksi				
Kolam	Ton	54.154,94	54.459,52	54.721,32
Mina Padi	Ton	288,42	151,44	137,5
Perairan Umum	Ton	92.815	94.540	95.774
Keramba	Ton	15,92	14,86	14,03
Jumlah Produksi	Ton	54.429.275	54.720.36	54.968,62

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman, 2022

2.1.1. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Sehubungan dengan keterbatasan lahan pertanian dan dampak global warming akan mempengaruhi masa tanam dan bahkan akan berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas lahan. Produksi tanaman pangan di Kabupaten Sleman menjadi hal paling penting untuk diperhatikan karena menyangkut bahan makanan pokok masyarakat yang akan mempengaruhi tingkat ketahanan pangan rumah tangga. Pemantauan produksi tanaman pangan dilakukan pada tanaman sumber karbohidrat dan protein yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, antara lain: padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan kacang hijau. Di samping itu bahan pangan strategis meliputi: telur, daging sapi, daging ayam, gula pasir, minyak goreng, cabai merah, dan bawang merah. Karena bahan pangan strategis ini

sangat penting dalam kehidupan sehari-hari maka diperlukan tinjauan atau kajian yang mendalam. Ketersediaan pangan di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel II-10 di bawah ini.

Tabel II-10. Analisis surplus minus di Kabupaten Sleman Tahun 2021

No	Keterangan	Beras	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kedelai	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Gula Pasir	Daging Sapi	Daging Ayam	Telur Ayam	Susu	Ikan Segar	Sayur	Buah - buahan
1	Produksi (Ton)	151.983,81	31.747,24	8.615,00	1.349,00	228,00	10.293,14	-	4.090,75	1.375,76	17.056,88	13.254,24	5.005,65	54.720,16	25.198,40	87.788,82
2	Konsumsi Rumah Tangga (Kg/Kap/Tahun)	113,75	22,96	10,66	3,40	2,00	5,48	0,82	9,59	7,94	21,06	11,30	7,53	48,22	44,11	85,38
	Konsumsi Rumah Tangga (g/Kap/hr)	311,64	62,90	29,21	9,32	5,48	15,01	2,25	26,27	21,75	57,70	30,96	20,63	132,11	120,85	233,92
3	Konsumsi (Ton)	124.892,38	25.209,05	11.704,20	3.733,05	2.195,91	6.016,79	900,32	10.529,39	8.717,76	23.122,93	12.406,89	8.267,60	52.943,39	48.430,80	93.743,40
4	Surplus/ minus (Ton)	27.091,43	6.538,19	(3.089,20)	(2.384,05)	(1.967,91)	4.276,35	-	(6438,64)	(7.342,00)	(6.066,05)	847,35	(3.261,95)	1.776,77	(23.232,40)	(5.954,58)
5	Penyediaan Dalam Negeri (Ton) (memperhitungkan angka Impor dan Ekspor)	129.503,28	31.043,45	12.922,50	4.197,00	2.413,00	14.030,14	1.005,00	11.370,71	9.497,24	25.186,83	13.349,39	9.819,05	55.349,74	51.912,08	98.116,53
6	Surplus/ minus (Ton)	54.610,90	5.834,40	1.218,30	463,95	217,09	8.013,35	104,68	841,32	779,48	2.063,90	942,50	1.551,45	2.406,35	3.481,28	4.373,13

Sumber : Neraca Bahan Makanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman (NBM Kabupaten Sleman, 2022)



Dari tabel II-10 analisis surplus dan minus di Kabupaten Sleman berdasarkan data NBM Tahun 2021 tetap dengan jumlah penduduk Kabupaten Sleman tahun 2022 sebesar 1.097.955 jiwa diatas dapat dilihat untuk semua pangan setelah memperhitungkan angka import dan eksport mengalami tahan pangan atau surplus.

Tabel II-11. Ketersediaan dan Tingkat Ketersediaan Energi di Kabupaten Sleman Tahun 2021

Kelompok Pangan	Ketersediaan Energi (Kkal/kapita/hari)	Tingkat Ketersediaan Energi (%AKE)	Proporsi Ideal (%)
Padi-padian	1.392,09	63,28	50
Umbi-umbian	56,36	2,56	6
Pangan hewani	290,34	13,20	12
Minyak dan lemak	474,27	21,56	10
Buah/biji berminyak	37,66	1,71	3
Kacang-kacangan	130,91	5,95	5
Gula	97,08	4,41	5
Sayur dan Buah	206,09	9,37	6
Lain-lain	0,00	0,00	3
	2.684,80	122,04	100

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman {Neraca Bahan Makanan (NBM, 2022)}

Secara khusus jika diperhatikan dari tabel II-11 di atas maka proporsi tingkat ketersediaan energi menurut kelompok pangan, faktualnya belum semuanya sesuai dengan proporsi ideal. Proporsi tingkat ketersediaan energi pada tahun 2021 untuk kelompok padi-padian sebesar 63,28% artinya sudah melebihi proporsi ideal, demikian juga dengan kelompok pangan hewani, minyak dan lemak, kacang-kacangan, sayur dan buah. Sementara kelompok pangan yang proporsi tingkat ketersediaan energi masih di bawah ideal adalah kelompok pangan umbi-umbian, buah/biji berminyak, gula dan lain-lain. Proporsi tingkat ketersediaan energi yang belum ideal ini mengindikasikan adanya korelasi positif dengan keberagaman konsumsi penduduk Kabupaten Sleman.

Meskipun ketersediaan energi di Kabupaten Sleman sudah tercukupi, namun dari hasil analisis ketersediaan pangan dengan memperhatikan tingkat produksi, ada beberapa komoditi pangan di Kabupaten Sleman yang masih bergantung pada impor dari luar wilayah untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi rumah tangga penduduk Kabupaten Sleman. Beberapa komoditi yang ketersediaan pangan masih bergantung pada impor yaitu tepung gandum, ubi jalar, ubi kayu, gula pasir, kedelai, kacang hijau, buah-buahan, sayuran, daging sapi, daging ayam, telur, susu dan ikan.

Walaupun ketersediaan pangan di Kabupaten Sleman dapat dipenuhi dari hasil produksi sendiri maupun dari impor, namun proyeksi ketersediaan pangan di Kabupaten Sleman berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2021 menunjukkan penurunan setiap tahunnya, berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah penduduk Kabupaten

Sleman yang memerlukan pangan lebih banyak di tahun 2023-2026. Hal ini dikarenakan semakin menyusutnya luas lahan pertanian Kabupaten Sleman akibat peningkatan kebutuhan akan ruang untuk permukiman dan sarana pendukung kehidupan masyarakat, pertumbuhan sektor non pertanian, perkembangan kawasan perkotaan/urban, perubahan preferensi usaha akibat skala usaha pertanian yang tidak ekonomis, sumber daya manusia pertanian yang kurang produktif, dan kerentanan petani menghadapi instabilitas harga produk segar pada saat panen.

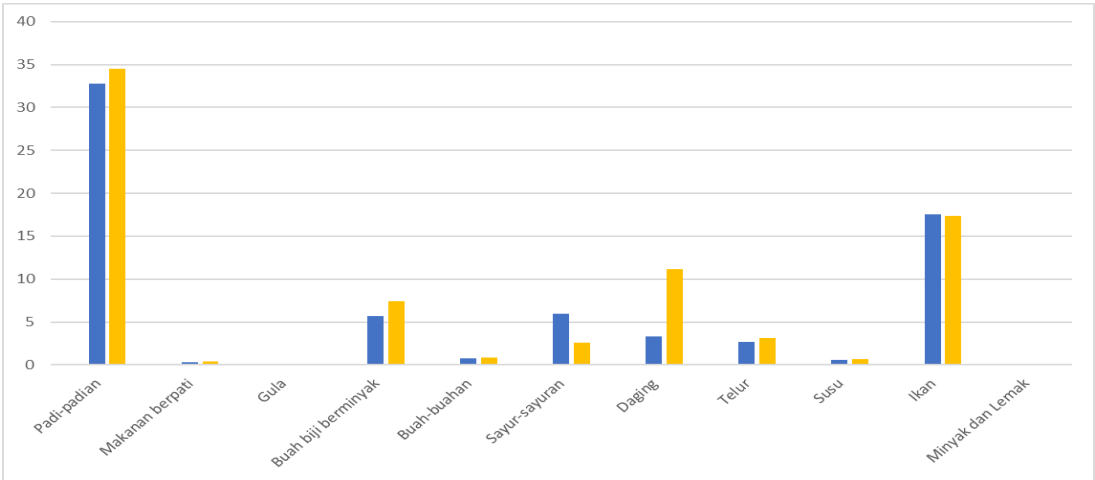
Sementara itu di sisi lain, upaya perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan belum memberikan hasil yang diharapkan. Pada rentang tahun 2018-2022, lahan sawah padi Kabupaten Sleman mengalami penurunan dari 45.353 ha menjadi 43.521 ha. Tantangan ke depan yang harus dijawab adalah bagaimana lahan produktif yang masih ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan arif agar tidak berkurang fungsi dan kemanfaatannya. Upaya perlindungan lahan pertanian juga belum didukung dengan langkah penetapan lahan dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan di masing-masing kapanewon.

Tabel II-12. Ketersediaan Protein di Kabupaten Sleman Tahun 2021

Kelompok Bahan Pangan	Ketersediaan Protein (Gram/Kapita/Hari)	
	Tahun 2020	Tahun 2021
Padi-padian	32,78	34,52
Makanan berpati	0,30	0,40
Gula	0,01	0,01
Buah biji berminyak	5,73	7,44
Buah-buahan	0,79	0,87
Sayur-sayuran	5,99	2,62
Daging	3,31	11,20
Telur	2,64	3,18
Susu	0,58	0,66
Ikan	17,50	17,39
Minyak dan Lemak	0,01	0,04
JUMLAH	69,64	78,33

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, 2022

Dari tabel II-12 dan gambar II-6 maka dapat diketahui ketersediaan protein di Kabupaten Sleman selama tahun 2020 dan 2021 menunjukkan angka yang terus meningkat di kelompok bahan pangan. Kelompok bahan pangan yang menurun adalah sayur-sayuran dan ikan. Ketersediaan protein pada tahun 2020 sebesar 69,64 gram/kapita/hari dan pada tahun 2021 menjadi 78,33 gram/kapita/hari.



Gambar II-6. Perkembangan Ketersediaan Protein Kabupaten Sleman (gram/kapita/hari)

2.1.2. Distribusi Pangan

Kabupaten Sleman dengan luas wilayah sebesar 574,82 km² terdiri dari 17 kapanewon yang membawahi 86 kalurahan. Bagian utara kabupaten ini merupakan pegunungan, dengan puncaknya Gunung Merapi di perbatasan dengan Jawa Tengah, salah satu gunung berapi paling aktif di Pulau Jawa. Sedangkan di bagian selatan merupakan dataran rendah yang subur. Di antara sungai-sungai besar yang melintasi kabupaten ini adalah Kali Progo (membatasi kabupaten Sleman dengan Kabupaten Kulon Progo), Kali Code, dan Kali Tapus.

Untuk memenuhi bahan pangan yang dibutuhkan oleh setiap individu rumah tangga, secara umum penyelenggaraan distribusi pangan di Kabupaten Sleman telah berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini ditunjukkan adanya distribusi antar waktu dan antar wilayah dari produksi setempat yang sudah dilaksanakan secara baik dan pasokan bahan pangan yang terselenggara dengan lancar sebagai dampak tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai sekaligus pemberian/hibah kepada keluarga pra sejahtera yang dapat disalurkan memadai sesuai sasaran yang ditetapkan. Dalam upaya pengendalian harga bahan pangan strategis, telah dilaksanakan fasilitasi stabilisasi harga bahan pangan dan peningkatan ketersediaan pangan setempat melalui pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, Lembaga Akses Pangan Masyarakat dan pelaksanaan operasi pasar.

Berdasarkan Buku laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Tahun 2020, pengukuran Desa Rawan Pangan mencakup 3 aspek ketahanan pangan yaitu: Aspek Ketersediaan Pangan, Aspek Akses Terhadap Pangan dan Aspek Pemanfaatan Pangan, dari hasil TIM SKPG / Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, maka rekapitulasi kondisi rawan pangan dan gizi kabupaten Sleman adalah sebagai berikut tidak ada kalurahan dan kapanewon yang terindikasi rentan / rawan, semua dalam kondisi aman (hijau), tetapi untuk indikator ketersediaan pangan sudah banyak kalurahan yang sudah dalam kondisi waspada.

Kabupaten Sleman yang terdiri dari 17 kapanewon mempunyai kondisi pangan, gizi, dan kesehatan yang berbeda-beda. Berdasarkan 3 indikator yang meliputi : Aspek Ketersediaan, Aspek Akses Pangan dan Aspek Pemanfaatan Pangan pada tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut: berdasarkan aspek ketersediaan pangan, pada tingkat Kapanewon ada 2 Kapanewon dalam kondisi waspada, dalam tingkat Kalurahan ada 22 dalam kondisi waspada. Dari aspek akses pangan dari 17 kapanewon yang ada, tidak ada Kapanewon dan Kalurahan yang rawan maupun waspada, semua dalam konsisi aman. Untuk aspek pemanfaatan pangan, semua Kapanewon dan Kalurahan dalam konsisi aman. Situasi kerawanan pangan dan gizi Kabupaten Sleman seperti pada Tabel II-13.

Tabel II-13. Situasi Kerawanan Pangan dan Gizi per indikator di Kabupaten Sleman

Wilayah	Skor Aspek Ketersediaan Pangan		Skor Pemanfaatan Pangan		Skor Aspek Akses Pangan	
	Waspada	Rawan	Waspada	Rawan	Waspada	Rawan
Kapanewon	2	-	-	-	-	-
Kalurahan	22	-	-	-	-	-

Sumber : Buku Laporan Peta Desa Rawan Pangan dan Gizi DIY, DPKP DIY 2020

Berbagai intervensi kegiatan telah dilakukan dalam rangka penurunan jumlah desa waspada pangan, diantaranya peningkatan produksi pertanian dan peternakan, pemeliharaan kesehatan, pengembangan kelembagaan distribusi pangan dan keuangan desa, serta penggiatan usaha ekonomi produktif di desa tersebut. Selain itu secara bertahap melalui usaha pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan karena hal tersebut merupakan faktor kunci dalam meningkatkan akses pangan menuju gizi yang cukup untuk hidup sehat. Kelompok miskin inilah yang seharusnya menjadi fokus perhatian dalam pembangunan di bidang ketahanan pangan dan perbaikan gizi.

2.1.3. Konsumsi Pangan

Pemenuhan kecukupan pangan bagi setiap warga negara Indonesia merupakan kewajiban bersama pemerintah dan masyarakat, baik secara moral, sosial, maupun hukum, karena pangan merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat esensial. Pemenuhan kecukupan pangan perseorangan merupakan esensi dari ketahanan pangan, dan dicerminkan oleh tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau harganya serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Penganekaragaman pangan (diversifikasi pangan) sebagai upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumberdaya lokal telah disepakati. Keragaman konsumsi pangan menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan terkait dengan kecukupan pangan dan gizi. Diversifikasi konsumsi pangan sangat berperan dalam kaitannya dengan aspek gizi, kesehatan dan lebih jauh akan mempengaruhi kualitas SDM, baik menyangkut pertumbuhan fisik, perkembangan mental, kecerdasan maupun produktivitas kerja.

Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat yang lebih luas baik wilayah kabupaten/kota, provinsi sampai ketingkat nasional. Gambaran kualitas konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah tercermin dari skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya, dan agama. Adapun kelompok pangan tersebut mencakup : (1) padi-padian, (2) umbi-umbian, (3) pangan hewani, (4) minyak dan lemak, (5) buah/biji berminyak, (6) kacang-kacangan, (7) gula, (8) sayur dan buah, serta (9) lain-lain.

Dari tabel II-14, menyajikan fakta bahwa pada tahun 2021 PPH konsumsi di Kabupaten Sleman sudah di atas target konsumsi, yakni sebesar 96,6. Dimana angka konsumsi energi kelompok pangan sebanyak 2.216 kkal/kapita/hari dibandingkan dengan % konsumsi energi kelompok pangan terhadap AKG sebesar 2.100 kkal/kapita/hari.

Tabel II-14. Kinerja PPH Konsumsi Pangan Kabupaten Sleman Tahun 2021

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan (Gram/Kapita/Hari)	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/Kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Padi-padian	282,8	1.135	51,2	54,1	0,5	25,6	27,0	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	57,2	62	2,8	3,0	0,5	1,4	1,5	2,5	1,5
3	Pangan Hewani	137,6	342	15,4	16,3	2,0	30,9	32,6	24,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	26,2	234	10,5	11,1	0,5	5,3	5,6	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	3,4	19	0,9	0,9	0,5	0,4	0,5	1,0	0,5
6	Kacang-kacangan	32,7	86	3,9	4,1	2,0	7,8	8,2	10,0	8,2
7	Gula	28,9	113	5,1	5,4	0,5	2,6	2,7	2,5	2,5
8	Sayur dan Buah	294,4	176	7,9	8,4	5,0	39,7	41,9	30,0	30,0
9	Lain-lain	82,7	49	2,2	2,3	-	-	-	-	-
Total			2.216	100,0	105,5		113,7	119,9	100,0	96,6

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, Aplikasi Harmonisasi Analisis PPH Data Susenas tahun 2022

Keterangan :

- c : Angka konsumsi energi kelompok pangan (kkal/kapita/hari)
- d : % konsumsi energi kelompok pangan terhadap total konsumsi energi
- e : % konsumsi energi kelompok pangan terhadap AKG (2.100 kkal/kapita/hari)
- g : % konsumsi energi kelompok pangan terhadap total konsumsi energi dikalikan bobot
- h : % konsumsi energi kelompok pangan terhadap AKG dikalikan bobot
- j : Skor PPH, bila skornya lebih tinggi atau = skor maksimum digunakan skor maksimum tersebut

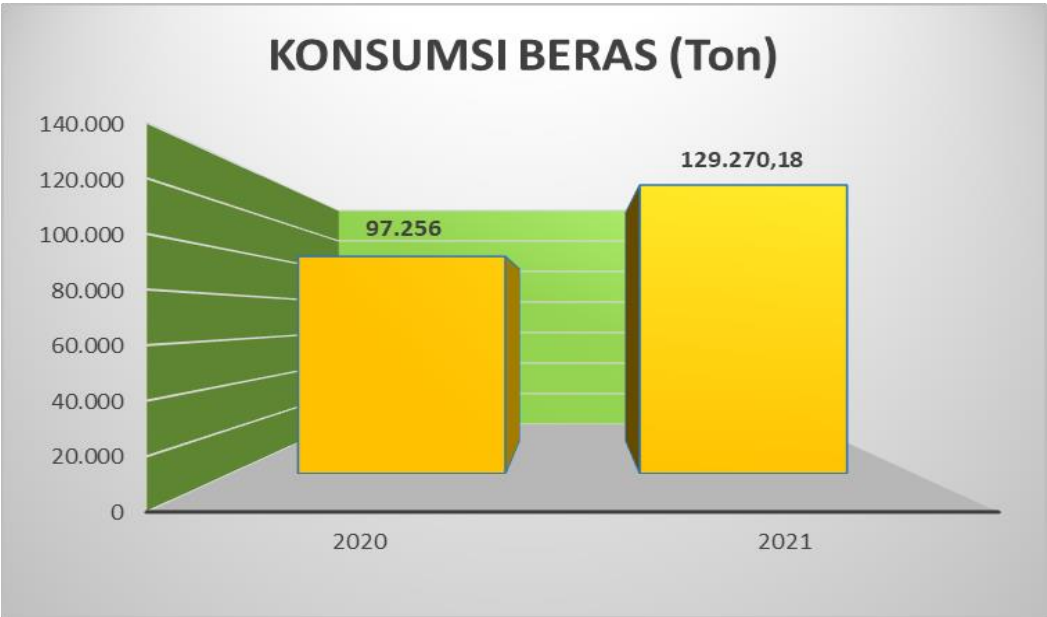


Tabel II-15. Perkembangan Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak Kabupaten Sleman Tahun 2021

Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori/Hari)	Protein (Gram/Hari)	Lemak (Gram/Hari)
Padi-padian	1392,09	34,52	10,94
Makanan berpati	52,93	0,40	0,15
Gula	97,08	0,01	0,04
Buah biji berminyak	167,63	7,44	12,91
Buah-buahan	156,73	0,87	1,45
Sayur-sayuran	53,73	2,62	0,49
Daging	156,14	11,20	12,03
Telur	40,31	3,18	2,86
Susu	12,59	0,66	0,72
Ikan	87,53	17,39	1,87
Minyak dan Lemak	468,04	0,04	26,63
TOTAL	2684,80	78,33	70,10
NABATI	2385,30	45,90	52,29
HEWANI	299,50	32,43	17,82

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, 2022

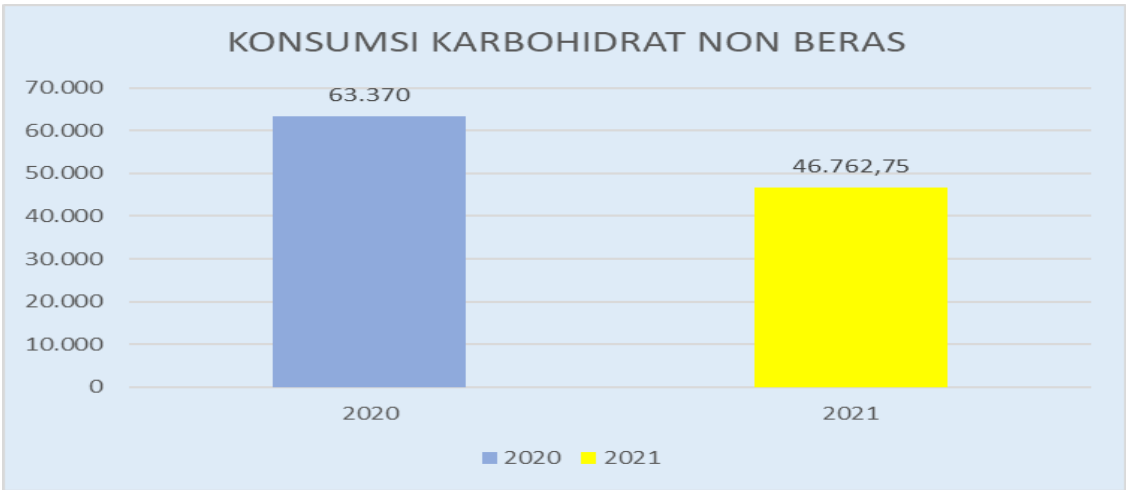
Pada tabel II-15 di atas, berdasarkan sumber dari neraca bahan makanan tahun 2021 ketersediaan energi di tahun 2021 telah mencapai 2.684,80 kkal/kapita/hari, ketersediaan protein mencapai angka 78,33 gram/kapita/hari dan ketersediaan lemak 70,10 gram/kapita/hari. Pada kelompok bahan pangan nabati diperoleh ketersediaan energi 2.385,30 kkal/kapita/hari, ketersediaan protein 45,90 gram/kapita/hari, dan ketersediaan lemak 52,29 gram/kapita/hari. Sedangkan pada kelompok bahan pangan hewani diperoleh ketersediaan energi 299,50 kkal/kapita/hari, ketersediaan protein 32,43 gram/kapita/hari dan ketersediaan lemak 17,82 gram/kapita/hari. Namun demikian, dampak pandemi COVID-19 telah mempengaruhi kondisi keterjangkauan pangan, terbukti walaupun pada tahun 2021 skor AKE (Angka Kecukupan Energi) sudah pada posisi di atas anjuran, namun realitasnya untuk komoditas umbi-umbian, buah/biji berminyak, gula, sayuran dan buah masih belum mencapai AKE yang ideal. Sementara untuk komoditas pangan padi-padian serta minyak dan lemak telah melampaui skor AKE ideal.



Gambar II-7. Konsumsi beras di Kabupaten Sleman Tahun 2020 dan 2021 (ton/tahun)

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, {Neraca Bahan Makanan (NBM, 2020, 2021)}

Dari gambar II-7. diatas konsumsi beras di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 mencapai 97.256 ton/tahun dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 129.270,18 ton/tahun. Jika dilihat per kapita penduduk maka konsumsi beras pada tahun 2020 sebanyak 86,39 kg/kapita/tahun dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi sebanyak 113,75 kg/kapita/tahun. Sehingga rata-rata hariannya adalah 310,96 gram. Ini menandakan bahwa konsumsi beras di Kabupaten Sleman mengalami kenaikan yang sangat tinggi, sehingga konsumsi beras cukup merata dan sangat tinggi di seluruh penduduk.



Gambar II-8. Konsumsi Pangan Sumber Karbohidrat Non Beras di Kabupaten Sleman (ton/tahun)

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman {Neraca Bahan Makanan (NBM, 2020, 2021)}

Konsumsi karbohidrat non beras di sini meliputi: ubi jalar, ubi kayu, jagung, pisang, kentang dan sagu. Dari gambar II-8, terlihat konsumsi karbohidrat non beras pada tahun 2020 sebanyak 63.370 ton/tahun dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebanyak 46.762,75 ton/tahun. Hal ini di sebabkan karena pola konsumsi masyarakat di Kabupaten

Sleman lebih banyak mengkonsumsi beras daripada non beras. Adapun rincian kelompok pangan non beras per kapita bisa di lihat pada tabel II-16 dimana konsumsi karbohidrat non beras per kapita terlihat pada tabel ini, pada tahun 2020 ubi jalar (2,98 kg/kapita/tahun), ubi kayu (10,07 kg/kapita/tahun), jagung (36,13 kg/kapita/tahun), pisang (3,98 kg/kapita/tahun) dan kentang (3,13 kg/kapita/tahun). Sedangkan pada tahun 2021 konsumsi karbohidrat non beras per kapita adalah : ubi jalar (3,40 kg/kapita/tahun), ubi kayu (10,66 kg/kapita/tahun), jagung (20,73 kg/kapita/tahun), pisang (3,53 kg/kapita/tahun) dan kentang (2,83 kg/kapita/tahun).

Konsumsi makanan pokok yakni beras maupun non beras jika ditinjau dari segi gizi adalah 423,70 gram/hari. Anjuran konsumsi makanan pokok dari Pedoman Gizi Seimbang adalah 3-4 porsi per hari, sehingga anjurannya untuk beras adalah 150-200 gram, dan konsumsi beras mencapai 310 gram. Artinya sudah lebih tinggi dari anjuran. Jika dilihat dari kentang, ubi jalar, dan ubi kayu anjurannya adalah 600-800 g; 450-600 g; 300-400 g per hari dan konsumsi harian kentang adalah 7,75 g; ubi jalar 9,32 g; ubi kayu 29,2. Sehingga, jika dilihat dari segi gizi, maka konsumsi masyarakat Kabupaten Sleman untuk beras sudah lebih, namun tidak untuk konsumsi non beras (ubi kayu, ubi jalar, dan kentang).

Tabel II-16. Konsumsi Pangan Karbohidrat Non Beras di Kabupaten Sleman Tahun 2020 dan 2021 (Kg/Kapita/Tahun)

No	Kelompok Pangan Karbohidrat Non Beras	TAHUN	
		2020	2021
1	Ubi Jalar	2,98	3,40
2	Ubi Kayu	10,07	10,66
3	Jagung	36,13	20,73
4	Pisang	3,98	3,53
5	Kentang	3,13	2,83
6	Sagu	-	-
JUMLAH		56,29	41,15

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman {Neraca Bahan Makanan (NBM, 2020, 2021)}

Berdasarkan Analisis PPH data Susenas Tahun 2022, konsumsi energi per hari penduduk Kabupaten Sleman yang utama adalah dari kelompok padi-padian yaitu sebesar 51,2% dari total konsumsi energi per hari. Hal ini menggambarkan adanya perubahan pola konsumsi penduduk akibat meningkatnya tingkat pendapatan maupun perubahan gaya hidup pada kelas menengah ke atas. Fenomena ini cukup selaras dengan perkembangan aktivitas kuliner dan restoran yang terlihat semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Konsumsi energi per hari yang terendah di Kabupaten Sleman adalah kelompok buah/biji berminyak, yaitu sebesar 0,9% dari total konsumsi energi per hari. Ini menunjukkan walaupun tingkat konsumsi energi di Kabupaten Sleman sudah melebihi yang dianjurkan, namun jika dilihat dari keberagaman jenis/golongan pangan yang

dikonsumsi masyarakat masih perlu ditingkatkan khususnya konsumsi dari kelompok pangan umbi-umbian, buah/biji berminyak, dan kacang-kacangan. Pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal terutama umbi-umbian menjadi alternatif terbaik dalam memenuhi kebutuhan energi sekaligus menjaga kesehatan masyarakat dari ancaman penyakit degeneratif seperti diabetes, kanker, serangan jantung, hingga stunting karena umbi-umbian dapat dikembangkan menjadi makanan fungsional yang memiliki indeks glikemik rendah, kaya kandungan prebiotik dan antioksidan (Elvina Karyadi et al., 2021). Konsumsi energi per hari menurut total wilayah (desa dan kota) di Kabupaten Sleman tahun 2022 tersaji pada tabel II-17 di bawah ini.

Tabel II-17. Konsumsi Energi Per Kapita Per Hari Menurut Total Wilayah di Kabupaten Sleman Tahun 2022 (%)

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Hari (%)
1	Padi-padian	51,2
2	Umbi-umbian	2,8
3	Pangan Hewani	15,4
4	Minyak dan Lemak	10,5
5	Buah/Biji Berminyak	0,9
6	Kacang-kacangan	3,9
7	Gula	5,1
8	Sayur dan Buah	7,9
9	Lain-lain	2,2

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman , Aplikasi Harmonisasi Analisis PPH Data Susenas tahun 2022

Sedangkan konsumsi protein berdasarkan Analisis PPH data Susenas Tahun 2022 per hari penduduk Kabupaten Sleman yang utama adalah dari kelompok pangan hewani yaitu sebesar 41,4% dari total konsumsi protein per hari. Adapun konsumsi protein per hari yang terendah di Kabupaten Sleman adalah kelompok minyak dan lemak, yaitu sebesar 0,1% dari total konsumsi protein per hari. Hal ini perlu dikaji lagi mengingat konsumsi minyak dan lemak lebih banyak yang terserap dalam makanan jadi. Konsumsi protein per hari menurut total wilayah (desa dan kota) di Kabupaten Sleman tersaji dalam tabel II-18 di bawah ini.

Tabel II-18. Konsumsi Protein Per Kapita Per Hari Menurut Total Wilayah di Kabupaten Sleman Tahun 2022 (%)

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Protein Per Hari (%)
1	Padi-padian	35,0
2	Umbi-umbian	0,9
3	Pangan Hewani	41,4
4	Minyak dan Lemak	0,1
5	Buah/Biji Berminyak	0,4
6	Kacang-kacangan	10,4
7	Gula	0,6
8	Sayur dan Buah	8,6
9	Lain-lain	2,5

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, Aplikasi Harmonisasi Analisis PPH Data Susenas tahun 2022

Konsumsi pangan hewani berdasarkan Analisis PPH data susenas Tahun 2022 per kapita per tahun di Kabupaten Sleman yang terbanyak adalah kelompok pangan daging unggas, yaitu sebesar 13,2 kg/kapita/tahun. Sedangkan konsumsi yang terendah adalah kelompok susu, yaitu 4,3 kg/kapita/tahun. Konsumsi susu memang bukan utama, namun susu termasuk bahan makanan yang mudah untuk dikonsumsi dan mengandung banyak zat gizi. Salah satu kandungan zat gizi yang diperlukan adalah protein untuk pertumbuhan dan kalsium untuk mencegah osteoporosis pada lansia (Gropper, Sareen S. Smith, 2013). Hal ini juga dimungkinkan karena banyak masyarakat yang alergi atau intoleransi terhadap kandungan laktosa pada susu sehingga konsumsinya kurang. Akan tetapi, jika dilihat konsumsi protein yang sudah mencapai 78,33 g, maka konsumsi susu menjadi pelengkap saja.

Konsumsi pangan hewani meliputi daging ruminansia, daging unggas, telur, susu, dan ikan. Konsumsi pangan hewani tersebut 137,53 gram per hari. Konsumsi ikan sebanyak 15,2 kg/tahun yang setara dengan 41,64 gram per hari. Jika dibandingkan dengan anjurannya yakni 2-4 porsi atau setara dengan 100-200 gram, maka konsumsi ikan hanya memenuhi 21-42% saja. Konsumsi pangan hewani di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel II-19 dibawah ini.

Tabel II-19. Konsumsi Pangan Hewani di Kabupaten Sleman Tahun 2022 (kg/kap/th)

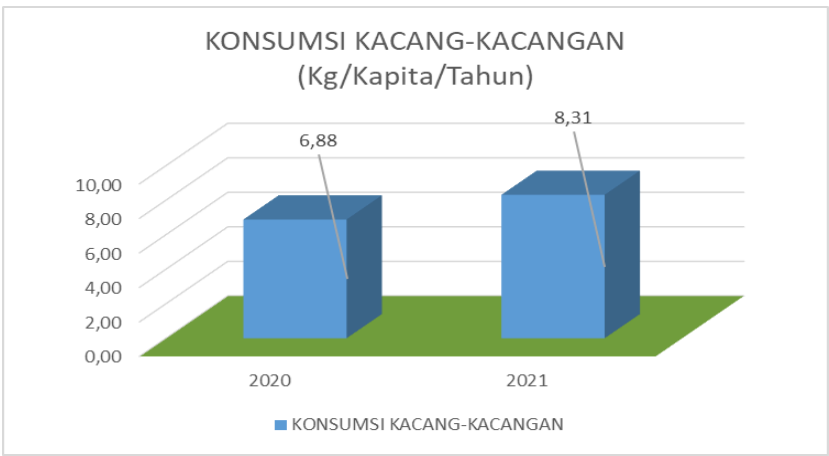
No	Kelompok Pangan Hewani	Berat Pangan (kg/kapita/tahun)
1	Daging Ruminansia	7,2
2	Daging Unggas	13,2
3	Telur	10,4
4	Susu	4,3
5	Ikan	15,2
TOTAL		50,2

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman Aplikasi Harmonisasi Analisis PPH Data Susenas tahun 2022

Konsumsi kacang-kacangan berdasarkan neraca bahan makanan pada tahun 2020 dan 2021 per kapita per tahun di Kabupaten Sleman dapat diketahui dimana pada tahun 2020 sebanyak 6,88 kg/kapita/tahun, yang mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebanyak 8,31 kg/kapita/tahun atau 22,77 gram per hari.

Konsumsi lauk yang meliputi lauk hewani dan lauk nabati, jika ditinjau dari segi gizi (Pedoman Gizi Seimbang), maka acuannya adalah 2-4 porsi (Gambar II-13). Jika konsumsinya digabung adalah mencapai 160,30 gram per hari. Hal ini sudah sesuai acuan karena kecukupan jika dicontohkan pada ayam (daging unggas) dengan kecukupan 100-200 gram, maka sudah mencukupi anjuran dari Pedoman Gizi Seimbang. Akan tetapi, konsumsi kacang-kacangan setara dengan 100-200 gram, maka konsumsi 22,77gram hanya memenuhi 11-23% konsumsi harian. Walaupun dapat dipenuhi juga dari konsumsi lauk hewani yang sudah memenuhi 80-160%.

Konsumsi kacang-kacangan di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada gambar II-9 dibawah ini.



Gambar II-9. Konsumsi Pangan Kacang-Kacangan di Kabupaten Sleman (Kg/Kapita/Tahun)

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman {Neraca Bahan Makanan (NBM, 2020, 2021)}

Konsumsi sayur-sayuran berdasarkan neraca bahan makanan pada tahun 2020 dan 2021 per kapita per tahun di Kabupaten Sleman dapat diketahui dimana pada tahun 2020 sebesar 52,42 kg/kapita/tahun, yang mengalami penurunan pada tahun 2021 sebanyak 44,11 kg/kapita/tahun atau setara dengan 120,85 gram per hari. Anjuran dari Pedoman Gizi Seimbang (Gambar II-13), kecukupannya adalah 3-4 porsi per hari yang setara dengan bayam 300-400 gram. Sehingga, konsumsi masyarakat Kabupaten Sleman hanya memenuhi 30-40% saja. Hal ini penting menjadi perhatian karena banyaknya manfaat dari sayur-sayuran.

Kurangnya konsumsi sayur-sayuran dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti:

a. Gangguan Pencernaan

Sayur-sayuran banyak mengandung serat yang baik untuk pencernaan. Organ pencernaan dari mulai lambung hingga rectum mempunyai komposisi bakteri baik yang sumber makanan bakteri tersebut adalah serat. Kandungan serat dari sayur-sayuran didapatkan dari daun singkong, daun kangkung, daun papaya, jamur, bayam, dan hampir semua sayuran (Gropper, Sareen S. Smith, 2013). Serat merupakan golongan karbohidrat yang tidak dapat dicerna dan dapat mengikat glukosa dan kolesterol untuk dapat dibuang.

b. Sariawan dan mudah terserang penyakit

Vitamin C banyak ditemukan pada sayuran seperti bayam, brokoli, cabai, belimbing wuluh, tomat. Sayur-sayuran tersebut jika dikonsumsi akan meningkatkan daya tahan tubuh karena kandungan vitamin C yang cukup banyak. Vitamin C dapat berperan sebagai pelindung dari dinding sel sehingga sel tidak mudah terserang penyakit (Zempleni et al., 2007). Penyakit paling umum dari kurangnya vitamin C adalah sariawan dan kekebalan tubuh mudah menurun.

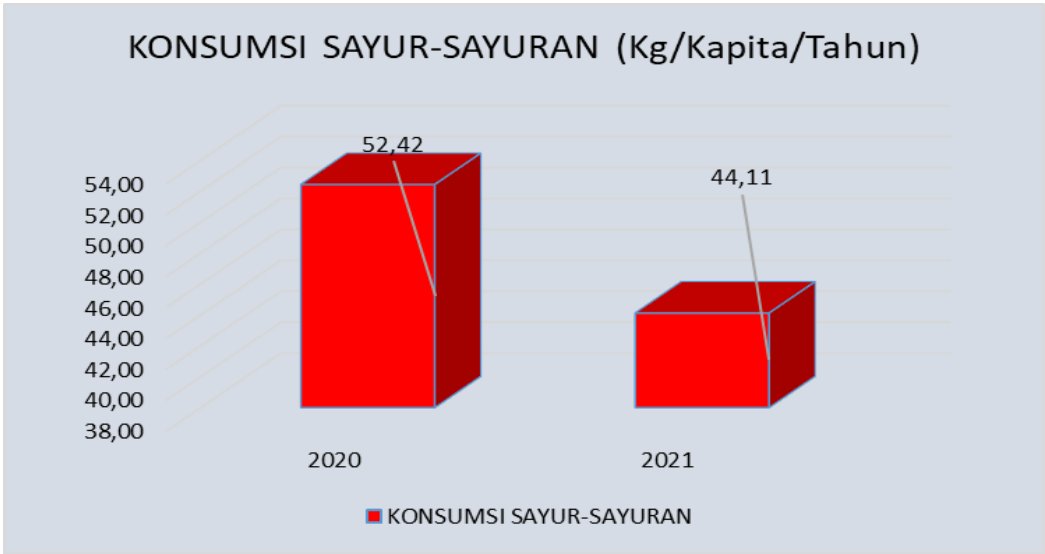
c. Melindungi mata dan pertumbuhan tulang

Kandungan vitamin lain yang banyak terdapat pada sayuran adalah vitamin A. Wortel, labu kuning, paprika merupakan sayuran yang banyak mengandung vitamin A. Vitamin ini berperan dalam kesehatan mata dimana retina mata dapat menangkap cahaya dengan baik karena adanya vitamin A yang cukup. Selain itu, kandungan vitamin D pada sayuran brokoli dan jamur berkaitan dengan pertumbuhan yang baik. Vitamin A dan D ini berperan penting dalam pembentukan DNA pada inti sel untuk membantu metabolisme pertumbuhan tulang dengan baik, dimana komposisinya tidak boleh berlebihan (Lestariana et al., 2018).

d. Penyakit Tidak Menular

Penelitian menunjukkan bahwa sayuran dapat mencegah terjadinya penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, diabetes melitus tipe 2, kanker esofagus atau kerongkongan (Stanaway et al., 2022).

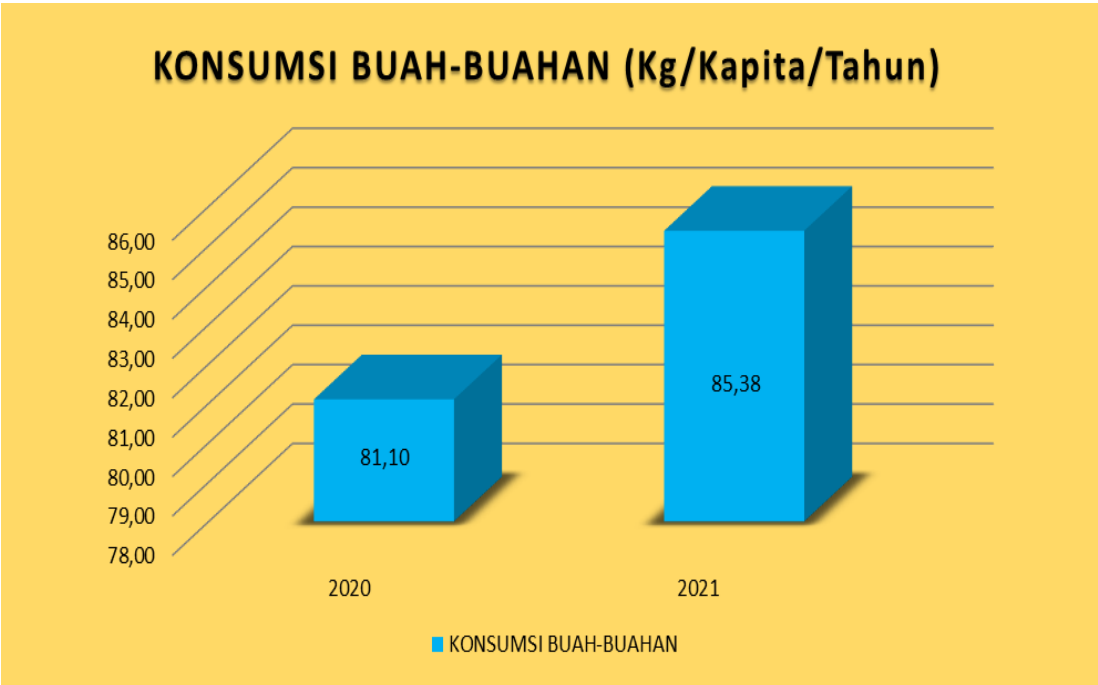
Konsumsi sayur-sayuran di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada gambar II-10 dibawah ini



Gambar II-10. Konsumsi Pangan Sayuran di Kabupaten Sleman (Kg/Kapita/Tahun)
Sumber: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman {Neraca Bahan Makanan (NBM, 2020, 2021)}

Konsumsi buah-buahan berdasarkan neraca bahan makanan pada tahun 2020 dan 2021 per kapita per tahun di Kabupaten Sleman dapat diketahui dimana pada tahun 2020 sebesar 81,10 kg/kapita/tahun, yang mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebanyak 85,38 kg/kapita/tahun atau setara dengan 233,92 gram per hari. Hal ini sudah memenuhi anjuran yakni 2-3 porsi atau setara dengan pisang emas 100-150 gram. Sehingga jika rata-rata konsumsinya 233,92, maka sudah memenuhi 156-233%. Adapun asupan buah-buahan yang paling banyak di konsumsi adalah buah salak, alpukat, mangga, pisang, durian dan nangka.

Konsumsi buah-buahan di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada gambar II-11 dibawah ini

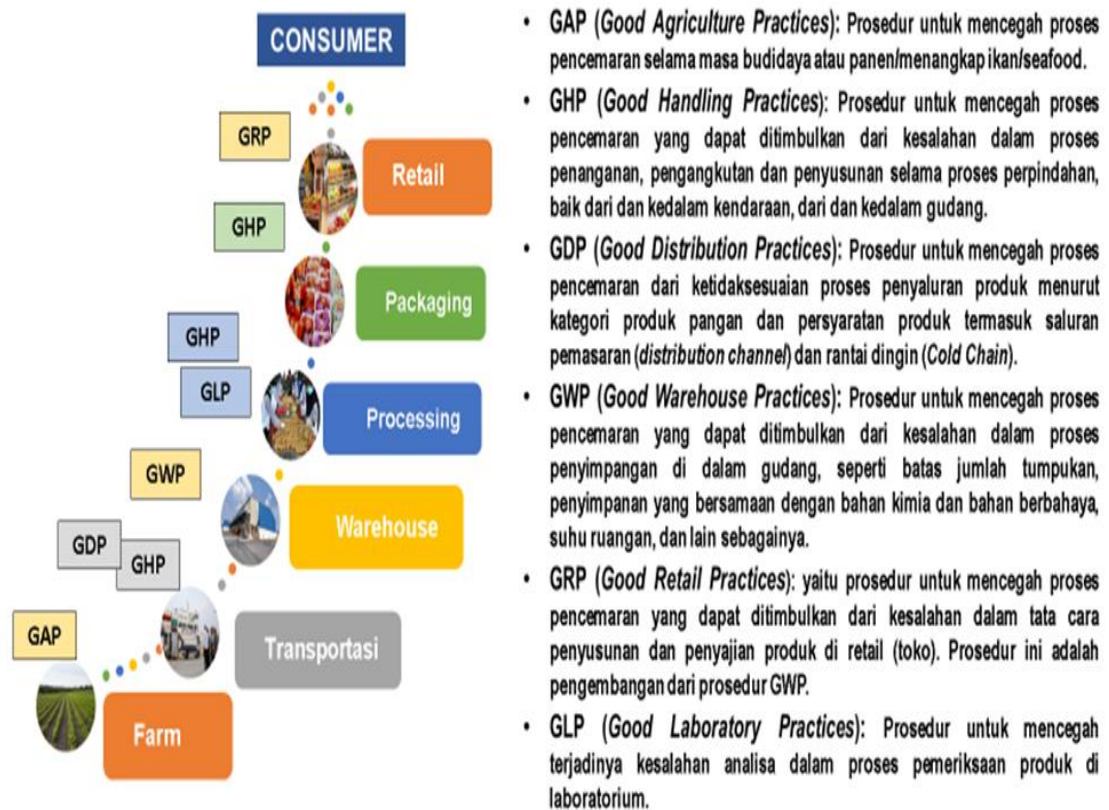


Gambar II-11. Konsumsi Pangan Buah di Kabupaten Sleman (Kg/Kapita/Tahun)

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan Kabupaten Sleman {Neraca Bahan Makanan (NBM, 2020, 2021)}

2.1.4. Keamanan Pangan

Keamanan pangan menjadi bagian penting dalam konten ketahanan pangan. Sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 bahwa keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Lebih lanjut dinyatakan bahwa keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia penjaminan keamanan dan kualitas pangan dimulai sejak proses produksi di hulu sampai dengan pangan diterima konsumen. Alur penjaminan keamanan pangan secara komprehensi disajikan pada Gambar II-12.



Gambar II-12. Alur Penjaminan Keamanan dan Kualitas pada Rantai Suplai Pangan

Penjaminan kewanan pangan bagi masyarakat telah dilakukan pembinaan terhadap kelompok atau pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Sampai dengan tahun 2022, jumlah kelompok atau pelaku usaha yang menerima sertifikat Pangan Segar Asal Tumbuhan di Kabupaten Sleman ada 387 penerima dengan rincian 299 sertifikat Produk Domestik (PD), 48 sertifikat Prima 3, 10 sertifikat Prima 2, 4 sertifikat Packing House, dan 26 sertifikat PDUK. 4 unit ter-registrasi RH, yakni: Rumah Kemas Asosiasi Prima Sembada, Paguyuban Petani salak “Mitra Turindo”, TOM (Tani Organik Merapi) dan Buah Angkasa.

2.2. Hambatan/Permasalahan

2.2.1. Ketersediaan Pangan

- Lahan yang rusak, tidak produktif, dan menganggur
- Alih fungsi lahan pertanian
- Kegagalan memenuhi swasembada pangan
- Keterjangkauan pangan sangat erat kaitannya dengan kemampuan daya beli, sehingga semakin rendah pendapatan akibat kemiskinan akan berdampak pada makin rendahnya kemampuan untuk membeli pangan.

2.2.2. Konsumsi dan Keamanan Pangan

- Pola konsumsi sebagian besar masyarakat Kabupaten Sleman masih kurang seimbang, dengan karbohidrat masih mendominasi asupan kalori; asupan sayur-sayuran yang kurang, asupan konsumsi susu dan ikan yang dibawah standar serta

peningkatan konsumsi makanan olahan dan siap saji baik di perkotaan maupun perdesaan.

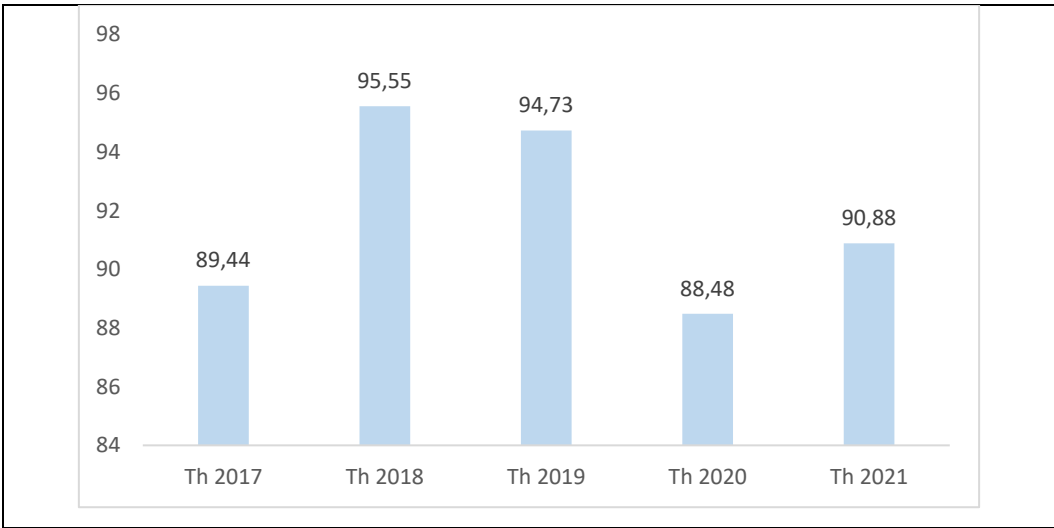
- b. Kondisi pangan yang beredar di masyarakat masih belum sepenuhnya terjamin mutu dan keamanannya, di antaranya masih beredarnya makanan yang mengandung zat kimia berbahaya. Peredaran makanan berformalin, makanan yang mengandung boraks, penggunaan bahan warna tekstil pada makanan, pengawet makanan yang berlebihan masih mungkin terjadi.

2.2.3. Gizi dan Kesehatan Masyarakat

2.2.3.1 Kesehatan Lingkungan

a) Rumah Sehat

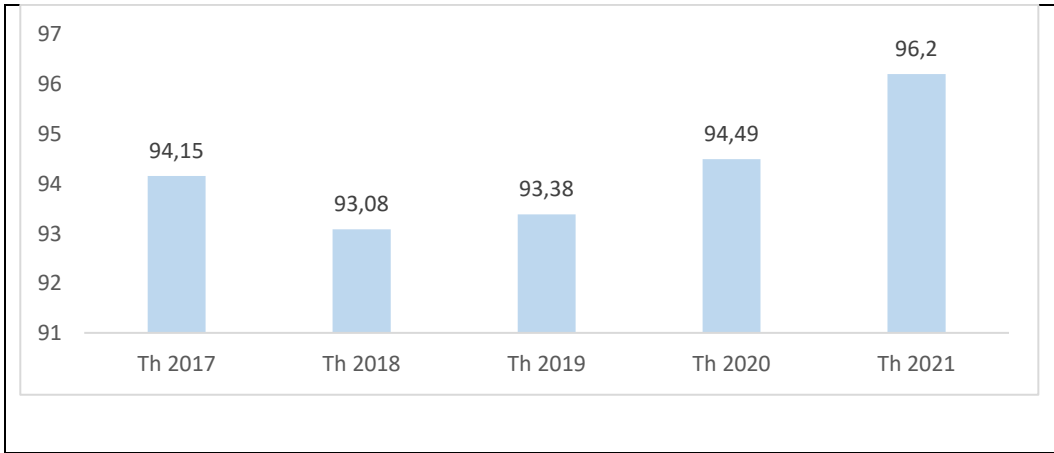
Kesehatan lingkungan, meliputi indikator rumah sehat berdasarkan profil laporan kesehatan Kabupaten Sleman tahun 2022, capaian rumah sehat seperti pada Gambar II-13.



Gambar II-13. Capaian rumah sehat di Kabupaten Sleman tahun 2017-2021

b) Tempat-tempat Umum

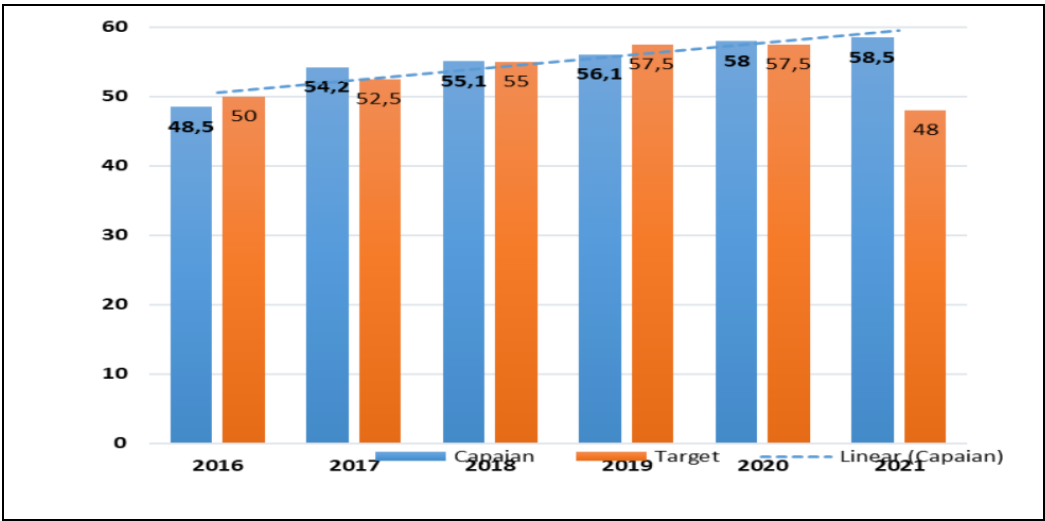
Kesehatan lingkungan, meliputi indikator kesehatan tempat-tempat umum (TTU). Berdasarkan profil laporan kesehatan Kabupaten Sleman tahun 2022, capaian kesehatan TTU seperti pada Gambar II-14.



Gambar II-14. Kesehatan tempat-tempat umum Kab Sleman tahun 2017-2021

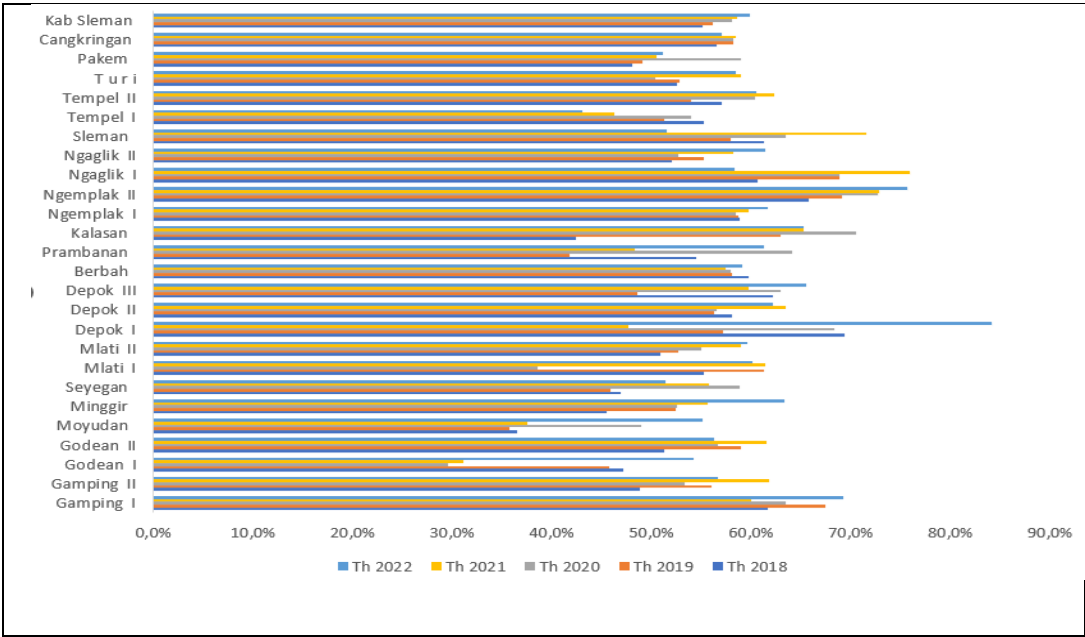
c) PHBS

Tren target dan capaian PHBS di Kabupaten Sleman secara detail pada Gambar II-15.



Gambar II-15. Tren target dan capaian PHBS

Secara rinci, capaian PHBS tiap kecamatan di Kab Sleman tahun 2018-2022 paling tinggi di wilayah kerja Puskesmas Depok I. Secara detail pada Gambar II-16.



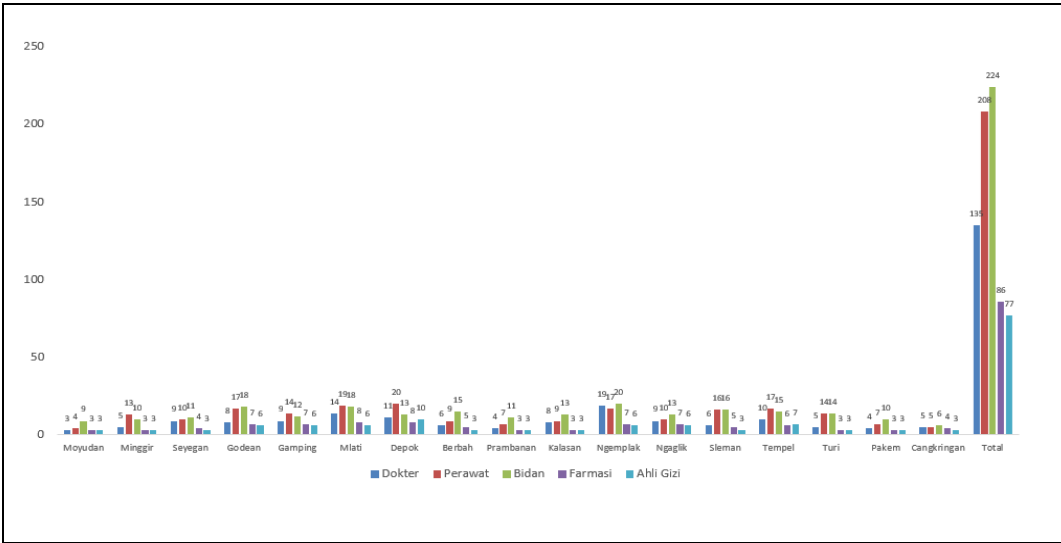
Gambar II-16. Capaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Kesehatan lingkungan dan perilaku sehat merupakan aspek penting yang menentukan derajat kesehatan masyarakat. Misalnya saja ketersediaan air bersih dan sanitasi merupakan predictor malnutrisi di beberapa negara di dunia termasuk Indonesia.

2.2.3.2 Fasilitas Kesehatan

a) Jumlah Tenaga kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Sleman tahun 2022 secara berturut-turut dari yang paling tinggi adalah bidan, perawat, dokter, farmasi dan ahli gizi. Secara detail pada Gambar II-17.



Gambar II-17. Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Sleman tahun 2022

b) Rasio jumlah tenaga kesehatan

Rasio jumlah tenaga kesehatan dihitung dengan mempertimbangkan kriteria hak asasi manusia seperti tercantum pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia. Berdasarkan ketentuan tersebut jumlah bidan belum mencukupi. Hal ini terjadi karena jumlah bidan yang praktik mandiri belum semua tercatat dalam system tercatat dalam sisdmk, adanya bidan yang tidak bekerja/pensiun dan tidak praktik mandiri sehingga tidak tercatat dalam sisdmk serta belum semua bidan yang sudah mempunyai akun di sisdmk melakukan entry namanya ke dalam sisdmk. Secara detil pada Tabel II-20.

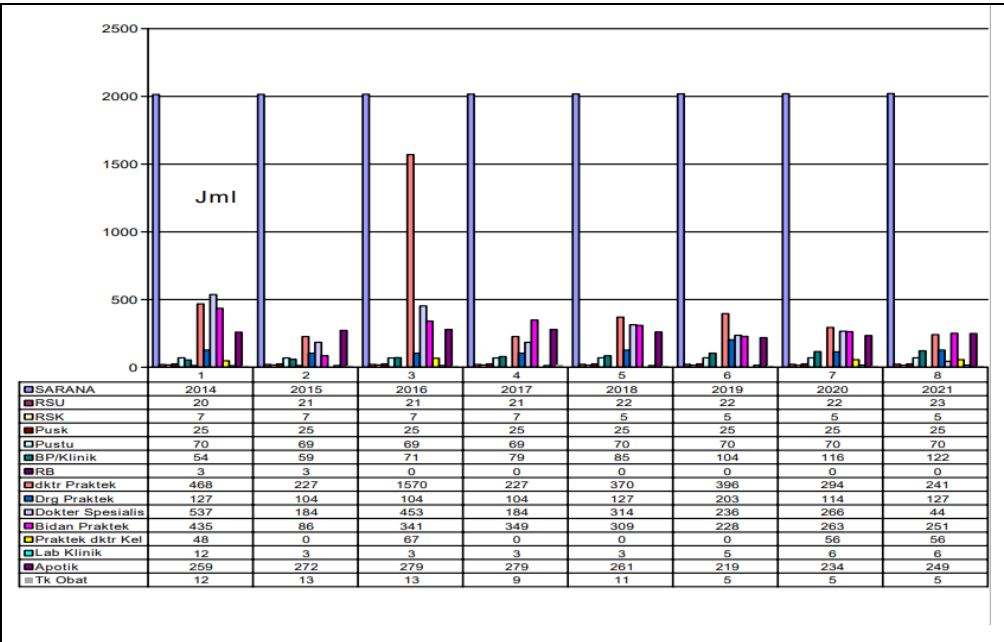
Tabel II-20. Rasio jumlah tenaga kesehatan

No	Indikator	Target HAM	Jml Tenaga	Rasio per satuan penduduk	Kecukupan
1	Rasio Tenaga Dokter per penduduk	1 : 2.500	2387	5.49	tercukupi
2	Rasio Tenaga Dokter Spesialis per penduduk	1 : 16.000	1076	15.83	tercukupi
3	Rasio Bidan terhadap penduduk	1 : 1.000	1008	0.93	Tidak tercukupi
4	Rasio Perawat terhadap penduduk	1 : 855	4284	3.39	tercukupi

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Sleman Tahun 2022

c) Fasilitas pelayanan kesehatan

Jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut :

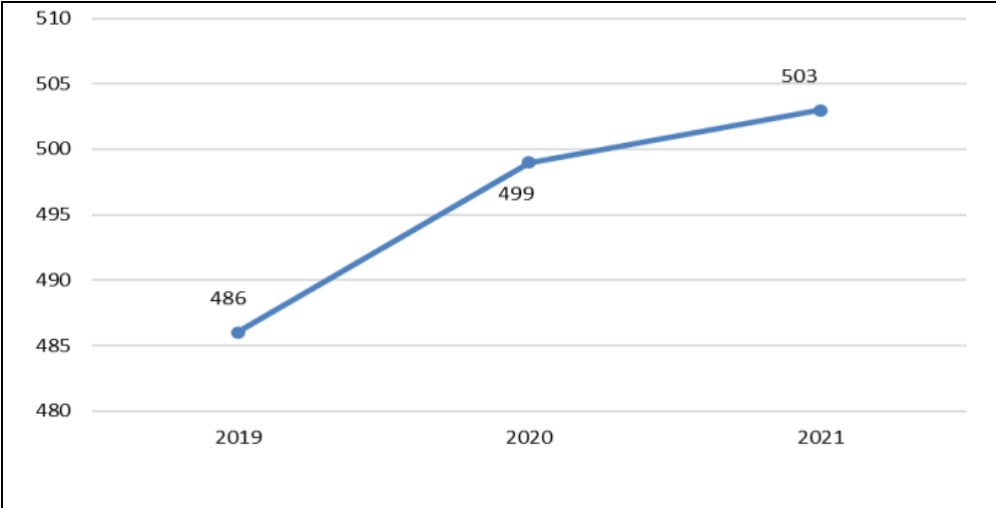


Gambar II-18. Jumlah dan jenis fasilitas layanan kesehatan

d) Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)

a. Posbindu

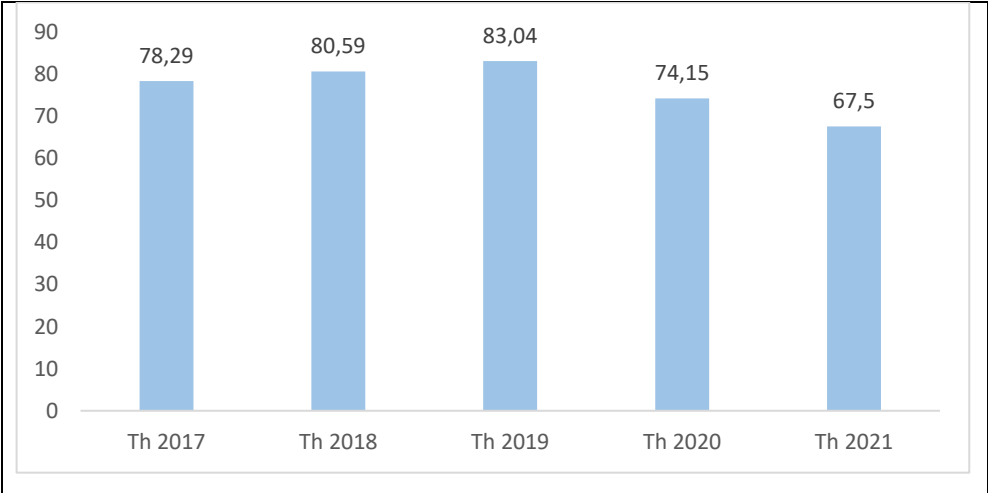
Posbindu adalah pos pembinaan terpadu fungsinya untuk melakukan sriking penyakit tidak melunar dengan identifikasi faktor risiko yang diduga berkaitan dengan penyakit tidak menular. Jumlah posbindu di Kabupaten Sleman terus mengalami peningkatan, secara detil pada Gambar II-19.



Gambar II-19. Trend jumlah Posbindu tahun 2019-2021

b. Jumlah Posyandu Mandiri dan Purnama

Trend jumlah Posyandu mandiri dan purnama di Kabupaten Sleman tahun 2017-2021 secara detail pada Gambar II-20.



Gambar II- 20. Posyandu Mandiri dan Purnama

c. Jumlah Posyandu dan Posbindu di Kabupaten Sleman Tahun 2022

Jika dilihat secara detail jumlah posbindu di tiap kecamatan di Kabupaten Sleman pada tahun 2022 secara detil pada Tabel II-21.

Tabel II-21. Jumlah Posyandu dan Posbindu di Kabupaten Sleman Tahun 2022

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	STRATA POSYANDU										POSYANDU AKTIF*			JUMLAH POSBINDU PTM**
			PRATAMA		MADYA		PURNAMA		MANDIRI		JUMLAH					
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%		JUMLAH	%	JUMLAH	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Moyudan	Moyudan	5	7,4	0	0,0	7	10,3	56	82,4	68	63	92,6	14		
2	Minggir	Minggir	0	0,0	0	0,0	17	24,3	53	75,7	70	70	100,0	15		
3	Seyegan	Seyegan	14	20,0	18	25,7	14	20,0	24	34,3	70	38	54,3	49		
4	Godean	Godean I	5	10,9	3	6,5	1	2,2	37	80,4	46	38	82,6	16		
		Godean II	4	8,9	0	0,0	1	2,2	40	88,9	45	41	91,1	13		
5	Gamping	Gamping I	6	12,0	14	28,0	0	0,0	30	60,0	50	30	60,0	18		
		Gamping II	3	5,7	18	34,0	4	7,5	28	52,8	53	32	60,4	12		
6	Mlati	Mlati I	7	13,7	1	2,0	4	7,8	39	76,5	51	43	84,3	30		
		Mlati II	10	18,5	0	0,0	8	14,8	36	66,7	54	44	81,5	18		
7	Depok	Depok I	15	44,1	1	2,9	1	2,9	17	50,0	34	18	52,9	22		
		Depok II	2	5,0	1	2,5	3	7,5	34	85,0	40	37	92,5	10		
		Depok III	7	19,4	2	5,6	0	0,0	27	75,0	36	27	75,0	17		
8	Berbah	Berbah	30	47,6	14	22,2	2	3,2	17	27,0	63	19	30,2	7		
9	Kalasan	Kalasan	23	22,8	17	16,8	13	12,9	48	47,5	101	61	60,4	22		
10	Prambanan	Prambanan	22	26,8	29	35,4	17	20,7	14	17,1	82	31	37,8	34		
11	Ngemplak	Ngemplak I	2	4,7	0	0,0	0	0,0	41	95,3	43	41	95,3	19		
		Ngemplak II	1	1,5	32	48,5	20	30,3	13	19,7	66	33	50,0	4		
12	Ngaglik	Ngaglik I	25	41,0	11	18,0	15	24,6	10	16,4	61	25	41,0	19		
		Ngaglik II	54	75,0	9	12,5	7	9,7	2	2,8	72	9	12,5	16		
13	Sleman	Sleman	9	9,8	2	2,2	0	0,0	81	88,0	92	81	88,0	35		
14	Tempel	Tempel I	6	9,7	16	25,8	1	1,6	39	62,9	62	40	64,5	40		
		Tempel II	1	2,0	13	26,5	22	44,9	13	26,5	49	35	71,4	20		
15	Turi	Turi	3	3,9	15	19,7	37	48,7	21	27,6	76	58	76,3	21		
16	Pakem	Pakem	3	4,2	5	6,9	37	51,4	27	37,5	72	64	88,9	25		
17	Cangkringan	Cangkringan	20	25,6	1	1,3	0	0,0	57	73,1	78	57	73,1	7		
JUMLAH (KAB/KOTA)			277	18,1	222	0,1	231	15,1	804	52,4	1.534	1.035	67,5	503		
RASIO POSYANDU PER 100 BALITA												2,0				

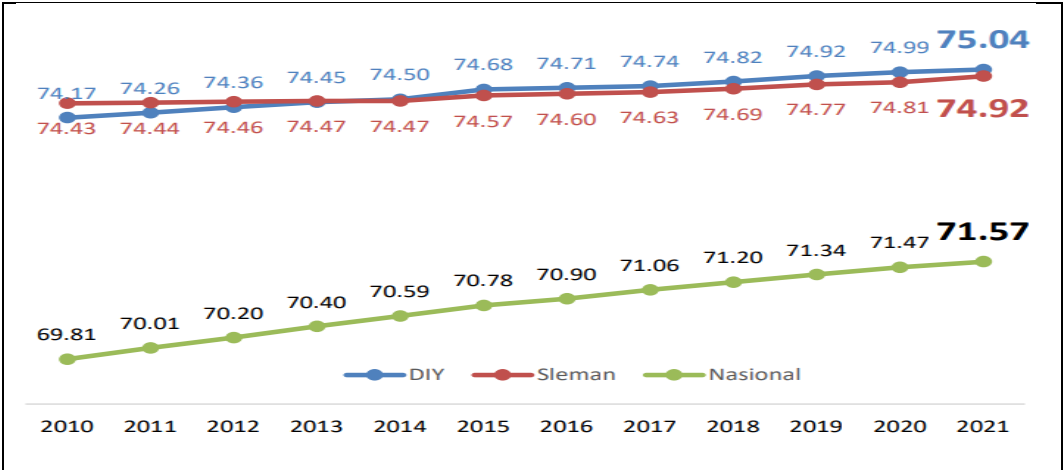
Sumber: Profil Kesehatan Kab Sleman tahun 2022

Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) adalah adalah upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh, untuk dan dari masyarakat. Ujung tombak penggerak partisipasi masyarakat adalah kader. Pada bulan Agustus 2023, Kabupaten Sleman mempunyai 1.535 posyandu dengan presentase posyandu aktif sebanyak 94,01%. Jika diasumsikan setiap Posyandu mempunyai 5 kader, maka terdapat 7.223 orang kader, bahkan lebih.

2.2.3.3 Status Kesehatan Masyarakat

a) Usia Harapan Hidup (UHH)

Tren UHH penduduk di Kabupaten Sleman terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, UHH penduduk Kab Sleman adalah 74 tahun, sedikit hampir sama dengan UHH DIY namun lebih tinggi dari UHH nasional. Secara detail pada Gambar II-21.



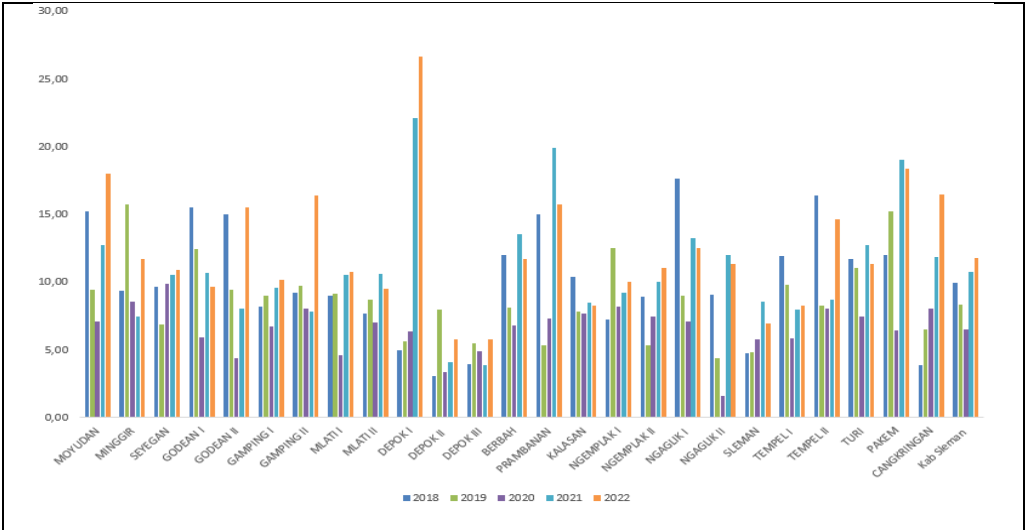
Gambar II-21. Tren Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Sleman 2010-2021

Salah satu faktor yang berkaitan dengan meningkatnya usia harapan hidup adalah kemajuan teknologi berupa deteksi dini, treatment dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran, perbaikan ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, kemajuan sarana komunikasi, transportasi dan lain sebagainya.

b) Status Gizi Ibu Hamil

a. Kurang Energi Kronis (KEK)

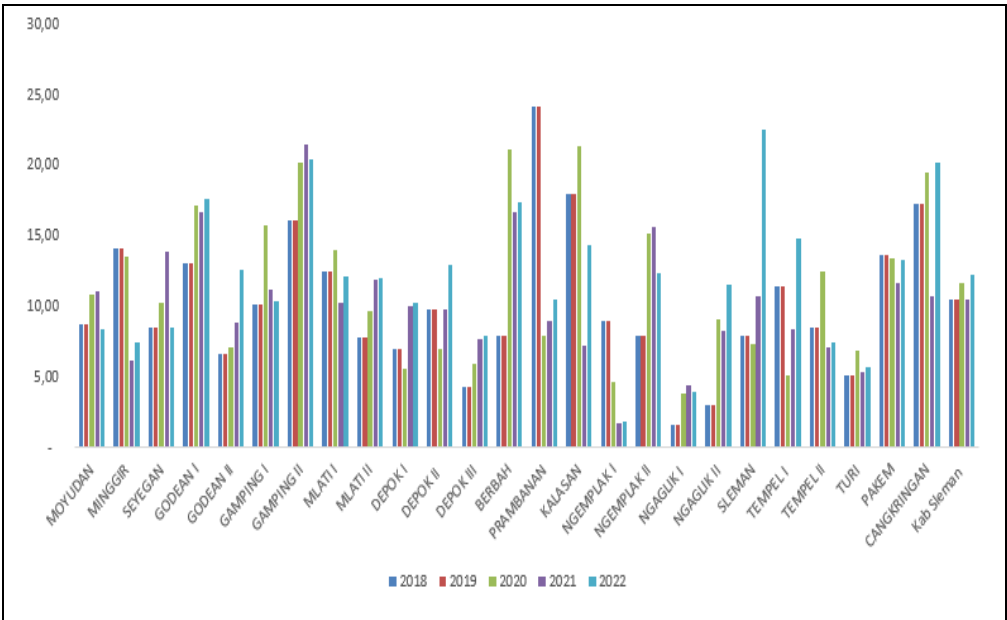
Prevalensi KEK ibu hamil di kabupaten Sleman mengalami peningkatan dari tahun 2020-2022, padahal sebelumnya di tahun 2018-2020 prevalensinya menurun. Peningkatan prevalensi KEK terbesar di wilayah Puskesmas Depok I. Secara detail pada Gambar II-22.



Gambar II-22. Trend prevalensi KEK ibu hamil di Kabupaten Sleman tahun 2018-2022

b. Anemia ibu hamil

Pada tahun 2022, prevalensi anemia ibu hamil terbesar di wilayah Puskesmas Sleman, Secara detail pada Gambar II-23.



Gambar II-23. Prevalensi anemia di Kabupaten Sleman tahun 2018-2022

Prevalensi anemia ibu hamil di Kabupaten Sleman meningkat di tahun 2021-2022. Kesehatan ibu hamil merupakan predictor penting bagi kesehatan bayi dan generasi yang akan datang. Malnutrisi pada kehamilan baik yang ditandai dengan lingkaran lengan atas (LILA) yang rendah, anemi maupun peningkatan berat badan yang tidak sesuai dengan usia kehamilan akan berdampak buruk bagi ibu dan outcome kehamilan. Peningkatan malnutrisi pada ibu hamil ini kemungkinan berkaitan dengan pandemic COVID-19 karena kemiskinan meningkat, pertumbuhan ekonomi menurun, layanan kesehatan dibatasi karena pembatasai mobilisasi masa, tidak adanya atau berkurangnya Pemberian Makanan Tambahan bagi ibu hamil, dan lain sebagainya. Fenomena peningkatan prevalensi malnutrisi pada masa kehamilan juga dialami di beberapa daerah seperti di Sumatra.

c) Kesehatan Bayi dan balita

a. Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)

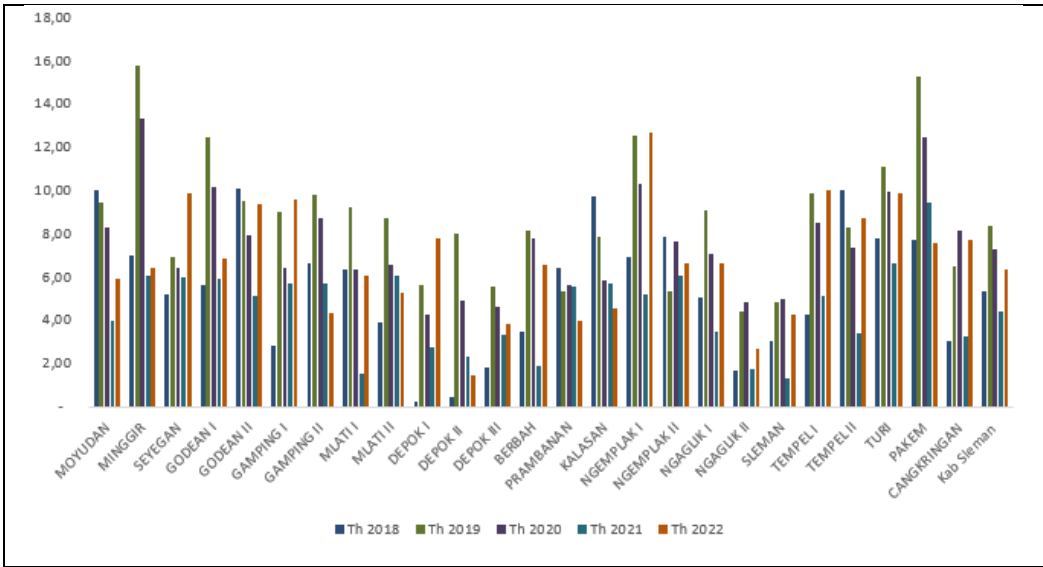
Secara umum jumlah BBLR di Kabupaten Sleman adalah 546 balita, dengan rentang 7 kematian balita (Puskesmas Mlati 1) hingga 45 (Puskesmas Kalasan). Secara detail pada Tabel II-22.

Tabel II-22. Jumlah Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) di Puskesmas di Kab Sleman Tahun 2022

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH LAHIR HIDUP			BAYI BARU LAHIR DITIMBANG						BBLR					
						L		P		L + P		L		P		L + P	
			L	P	L + P	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	Moyudan	Moyudan	160	144	304	160	100,0	144	100,0	304	100,0	6	3,8	6	4,2	12	3,9
2	Minggir	Minggir	207	208	415	207	100,0	208	100,0	415	100,0	8	3,9	17	8,2	25	6,0
3	Seyegan	Seyegan	235	233	468	236	100,4	232	99,6	468	100,0	8	3,4	20	8,6	28	6,0
4	Godean	Godean I	228	196	424	228	100,0	196	100,0	424	100,0	12	5,3	14	7,1	26	6,1
		Godean II	222	226	448	222	100,0	226	100,0	448	100,0	8	3,6	15	6,6	23	5,1
5	Gamping	Gamping I	260	215	475	260	100,0	215	100,0	475	100,0	14	5,4	13	6,0	27	5,7
		Gamping II	357	331	688	357	100,0	331	100,0	688	100,0	25	7,0	14	4,2	39	5,7
6	Mlati	Mlati I	220	232	452	220	100,0	232	100,0	452	100,0	3	1,4	4	1,7	7	1,5
		Mlati II	265	230	495	265	100,0	230	100,0	495	100,0	16	6,0	14	6,1	30	6,1
7	Depok	Depok I	196	173	369	196	100,0	173	100,0	369	100,0	5	2,6	5	2,9	10	2,7
		Depok II	253	220	473	228	90,1	197	89,5	425	89,9	9	3,9	2	1,0	11	2,6
		Depok III	278	268	546	278	100,0	268	100,0	546	100,0	9	3,2	9	3,4	18	3,3
8	Berbah	Berbah	340	448	788	340	100,0	448	100,0	788	100,0	7	2,1	8	1,8	15	1,9
9	Kalasan	Kalasan	405	386	791	403	99,5	384	99,5	787	99,5	24	6,0	21	5,5	45	5,7
10	Prambanan	Prambanan	359	360	719	359	100,0	360	100,0	719	100,0	21	5,8	19	5,3	40	5,6
11	Ngemplak	Ngemplak I	152	156	308	152	100,0	156	100,0	308	100,0	9	5,9	7	4,5	16	5,2
		Ngemplak II	246	216	462	246	100,0	216	100,0	462	100,0	16	6,5	12	5,6	28	6,1
12	Ngaglik	Ngaglik I	291	283	574	291	100,0	283	100,0	574	100,0	12	4,1	8	2,8	20	3,5
		Ngaglik II	290	286	576	290	100,0	286	100,0	576	100,0	4	1,4	6	2,1	10	1,7
13	Sleman	Sleman	370	384	754	370	100,0	384	100,0	754	100,0	3	0,8	7	1,8	10	1,3
14	Tempel	Tempel I	192	197	389	192	100,0	194	98,5	386	99,2	9	4,7	11	5,7	20	5,2
		Tempel II	138	157	295	138	100,0	157	100,0	295	100,0	3	2,2	7	4,5	10	3,4
15	Turi	Turi	226	241	467	225	99,6	241	100,0	466	99,8	17	7,6	14	5,8	31	6,7
16	Pakem	Pakem	179	182	361	179	100,0	182	100,0	361	100,0	12	6,7	22	12,1	34	9,4
17	Cangkringan	Cangkringan	183	159	342	183	100,0	159	100,0	342	100,0	4	2,2	7	4,4	11	3,2
JUMLAH (KAB/KOTA)			6.252	6.131	12.383	6.225	99,6	6.102	99,5	12.327	99,5	264	4,2	282	4,6	546	4,4

Sumber: Profil Kesehatan Kab Sleman Tahun 2022

Di Kabupaten Sleman, BBLR mengalami penurunan dari tahun 2019-2021. Namun angka ini meningkat lagi pada tahun 2021-2022. Secara detail pada Gambar II-24.



Gambar II-24. Trend jumlah BBLR di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022

Meningkatnya prevalensi BBLR di Kabupaten Sleman berkaitan dengan meningkatkan prevalensi ibu hamil malnutrisi, beberapa riset menyatakan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara malnutrisi selama kehamilan dengan ukuran dan derajat kesehatan bayi.

b. Pemberian Vitamin A

Pemberian vitamin A bertujuan untuk meningkatkan imunitas, mencegah infeksi, mendukung pertumbuhan balita dan lain sebagainya. Cakupan pemberian vitamin A pada balita di Kab Sleman mencapai target 100%.

c. Cakupan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI Eksklusif

Cakupan Iniasi Menyusu Dini (IMD) di Kabupaten Sleman pada tahun 2021 adalah 96,3% dengan rentang 85,3% (Puskesmas Pakem) hingga 100% (Puskesmas Depok I, II, III dan Sleman). Sedangkan cakupan ASI Eksklusif 6 bulan pada tahun yag sama di Kabupaten Sleman adalah 86,18% dengan rentang 77,5% (Puskesmas Gamping I) hingga 95,3% (Puskesmas Tempel II. Secara detail pada Tabel II-23.

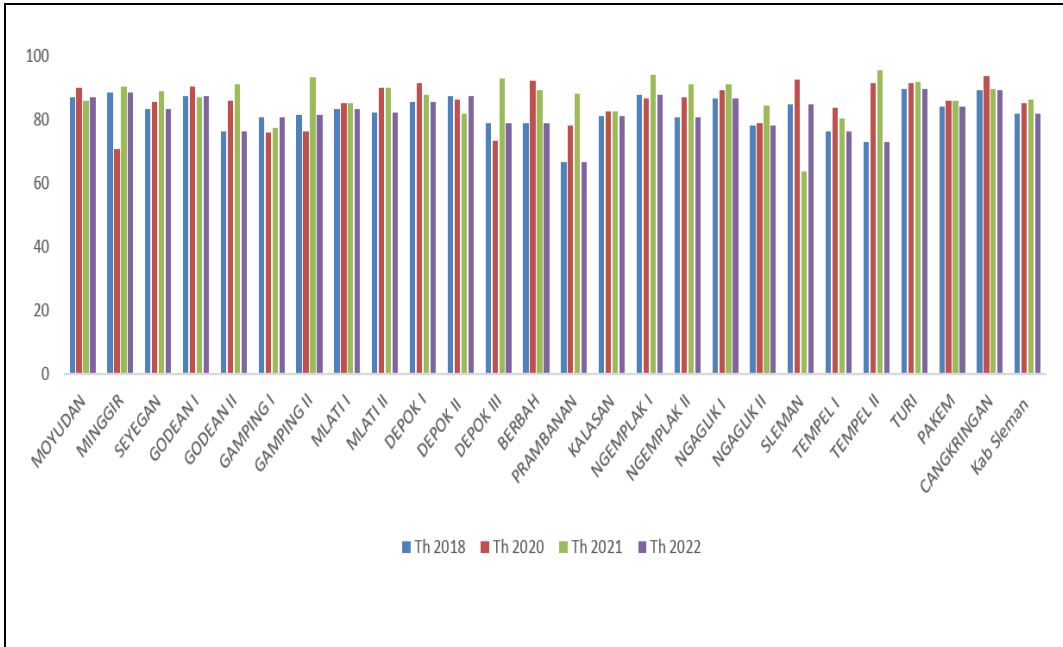
Tabel II-23. Cakupan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI Eksklusif

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	BAYI BARU LAHIR			BAYI USIA < 6 BULAN		
			JUMLAH	MENDAPAT IMD		JUMLAH	DIBERI ASI EKSKLUSIF	
				JUMLAH	%		JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Moyudan	Moyudan	304	302	99,3	178	153	86,0
2	Minggir	Minggir	415	404	97,3	235	212	90,2
3	Seyegan	Seyegan	468	407	87,0	267	237	88,8
4	Godean	Godean I	424	423	99,8	216	188	87,0
		Godean II	448	447	99,8	186	169	90,9
5	Gamping	Gamping I	475	425	89,5	306	237	77,5
		Gamping II	688	630	91,6	338	315	93,2
6	Mlati	Mlati I	452	432	95,6	214	182	85,0
		Mlati II	495	422	85,3	230	207	90,0
7	Depok	Depok I	369	368	99,7	82	72	87,8
		Depok II	473	473	100,0	105	86	81,9
		Depok III	546	546	100,0	126	117	92,9
8	Berbah	Berbah	788	788	100,0	265	236	89,1
9	Kalasan	Kalasan	791	779	98,5	315	260	82,5
10	Prambanan	Prambanan	719	716	99,6	408	359	88,0
11	Ngemplak	Ngemplak I	308	303	98,4	100	94	94,0
		Ngemplak II	462	399	86,4	303	276	91,1
12	Ngaglik	Ngaglik I	574	573	99,8	255	232	91,0
		Ngaglik II	576	572	99,3	177	149	84,2
13	Sleman	Sleman	754	754	100,0	412	263	63,8
14	Tempel	Tempel I	389	384	98,7	178	143	80,3
		Tempel II	295	290	98,3	172	164	95,3
15	Turi	Turi	467	454	97,2	239	219	91,6
16	Pakem	Pakem	361	308	85,3	290	249	85,9
17	Cangkringan	Cangkringan	342	333	97,4	125	112	89,6
JUMLAH (KAB/KOTA)			12.383	11.932	96,36	5.722	4.931	86,18

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Sleman Tahun 2022

d. Jumlah Partisipasi Masyarakat

Jumlah balita ditimbang di Kabupaten Sleman tahun 2022 adalah 63% dengan rentang 40% (Puskesmas Ngaglik I) hingga 86% (Puskesmas Minggir). Secara detail pada Tabel II-25.



Gambar II-25. Tren cakupan ASI eksklusif di Kabupaten Sleman tahun 2018-2022

Sumber: Profil Kesehatan Kab Sleman Tahun 2022

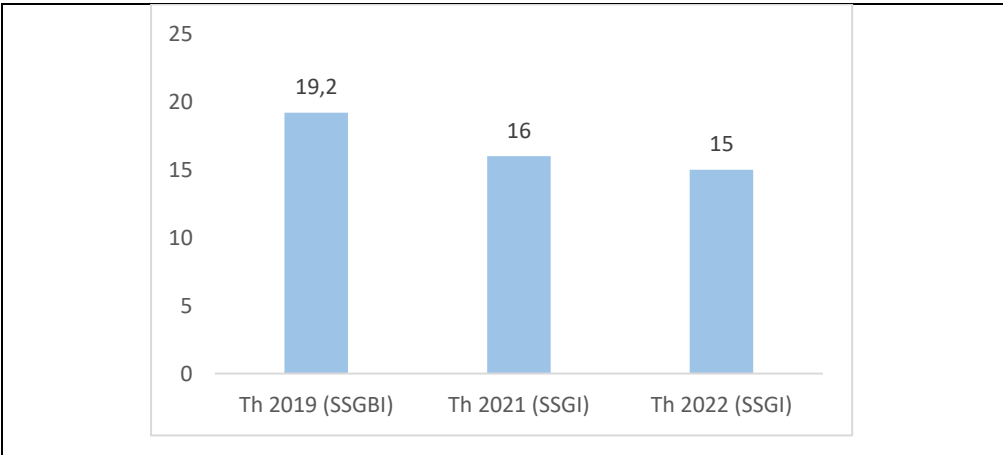
Tabel II-24. Tingkat partisipasi masyarakat pada penimbangan balita

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	BALITA								
			JUMLAH SASARAN BALITA (S)			DITIMBANG					
						JUMLAH (D)			% (D/S)		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Moyudan	Moyudan	890	810	1.700	627	582	1.209	70,45	71,85	71,1
2	Minggir	Minggir	857	854	1.711	728	744	1.472	84,95	87,12	86,0
3	Seyegan	Seyegan	1.459	1.345	2.804	792	758	1.550	54,28	56,36	55,3
4	Godean	Godean I	1.021	902	1.923	706	636	1.342	69,15	70,51	69,8
		Godean II	1.024	959	1.983	653	632	1.285	63,77	65,90	64,8
5	Gamping	Gamping I	1.173	1.109	2.282	949	897	1.846	80,90	80,88	80,9
		Gamping II	1.462	1.319	2.781	800	747	1.547	54,72	56,63	55,6
6	Mlati	Mlati I	1.619	1.569	3.188	867	811	1.678	53,55	51,69	52,6
		Mlati II	1.237	1.120	2.357	877	799	1.676	70,90	71,34	71,1
7	Depok	Depok I	831	800	1.631	358	337	695	43,08	42,13	42,6
		Depok II	884	917	1.801	698	744	1.442	78,96	81,13	80,1
		Depok III	968	888	1.856	565	504	1.069	58,37	56,76	57,6
8	Berbah	Berbah	1.742	1.642	3.384	783	754	1.537	44,95	45,92	45,4
9	Kalasan	Kalasan	2.096	2.056	4.152	830	843	1.673	39,60	41,00	40,3
10	Prambanan	Prambanan	1.731	1.653	3.384	1.329	1.243	2.572	76,78	75,20	76,0
11	Ngemplak	Ngemplak I	702	673	1.375	558	531	1.089	79,49	78,90	79,2
		Ngemplak II	1.153	1.077	2.230	936	875	1.811	81,18	81,24	81,2
12	Ngaglik	Ngaglik I	1.385	1.358	2.743	652	633	1.285	47,08	46,61	46,8
		Ngaglik II	1.390	1.255	2.645	552	505	1.057	39,71	40,24	40,0
13	Sleman	Sleman	1.866	1.774	3.640	1.285	1.253	2.538	68,86	70,63	69,7
14	Tempel	Tempel I	919	941	1.860	608	647	1.255	66,16	68,76	67,5
		Tempel II	660	653	1.313	555	572	1.127	84,09	87,60	85,8
15	Turi	Turi	1.045	1.032	2.077	643	636	1.279	61,53	61,63	61,6
16	Pakem	Pakem	1.102	1.082	2.184	921	906	1.827	83,58	83,73	83,7
17	Cangkringan	Cangkringan	1.019	905	1.924	708	640	1.348	69,48	70,72	70,1
JUMLAH (KAB/KOTA)			30.235	28.693	58.928	18.980	18.229	37.209	62,77	63,53	63,14

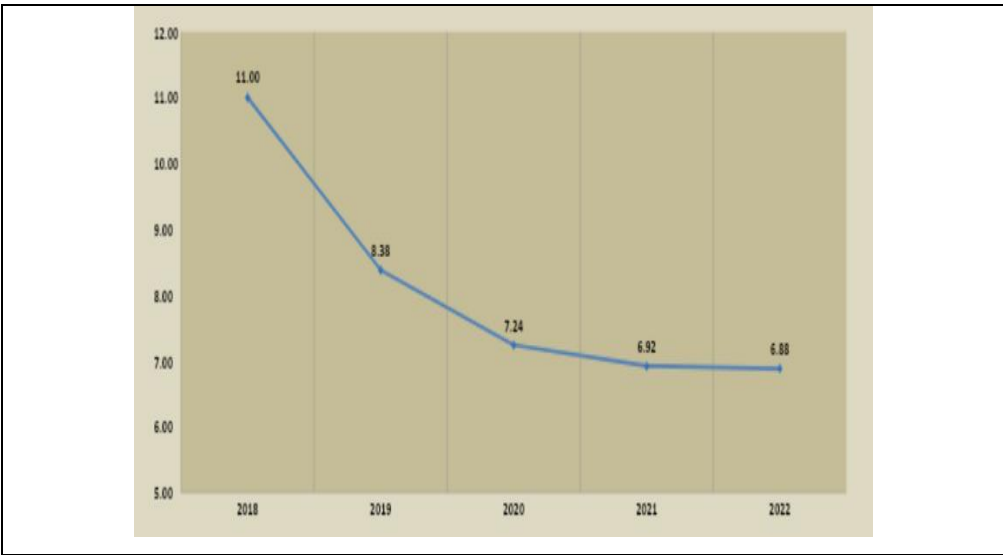
Sumber: Profil Kesehatan Kab Sleman Tahun 2022

e. Stunting Balita

Secara umum prevalensi stunting di Kabupaten Sleman mengalami penurunan dari tahun 2018-2022 baik berdasarkan survei nasional maupun survei lokal atau data rutin. Secara detail pada Gambar II-26 dan II-27.



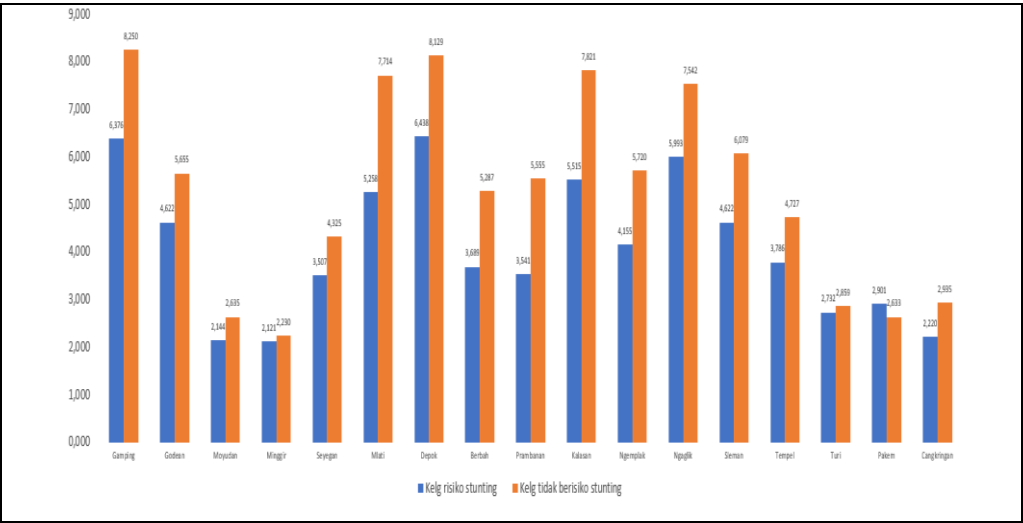
Gambar II-26. Stunting balita di Kabupaten Sleman tahun 2019-2022 berdasarkan survei nasional



Gambar II-27. Tren prevalensi stunting di Kabupaten Sleman (data rutin)

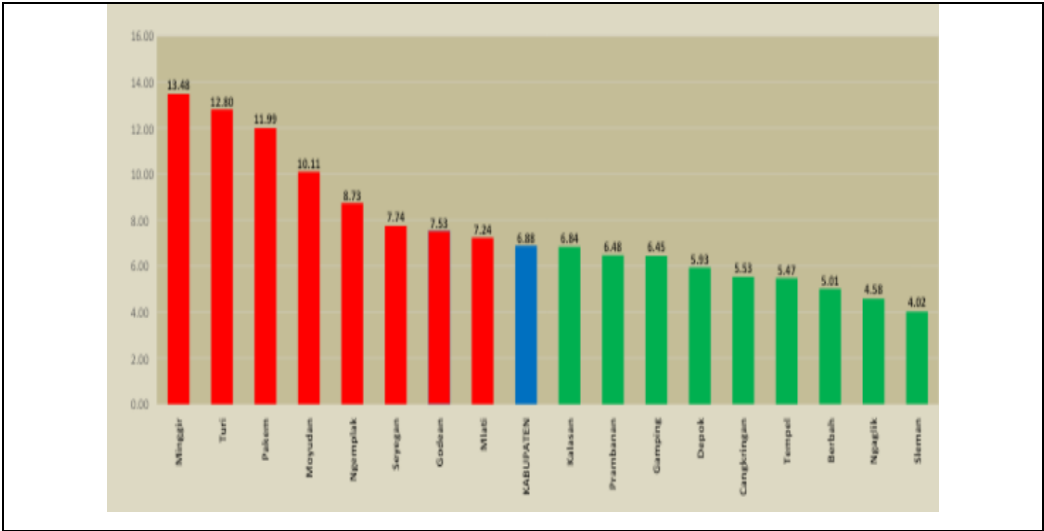
Jika dibandingkan dengan data rutin, maka prevalensi stunting di Kab Sleman jauh lebih rendah. Perbedaan ini dapat dijelaskan secara ilmiah dari perbedaan jumlah dan cara menentukan sampel, pengukur, alat ukur, dan prosedur pengukuran. Dalam hal tujuan penyediaan data, data nasional digunakan untuk perencanaan kebijakan sedangkan data local untuk intervensi perbaikan gizi.

Berdasarkan data dari BKKBN Kabupaten Sleman tahun 2021, Kapanewon Pakem adalah satu-satunya kecamatan di Kabupaten Sleman dengan proporsi keluarga berisiko stunting lebih tinggi daripada yang tidak berisiko stunting. Secara detail pada Gambar II-28.



Gambar II-28. Jumlah keluarga berisiko stunting
 Sumber: <https://portalpk21.bkkbn.go.id>.

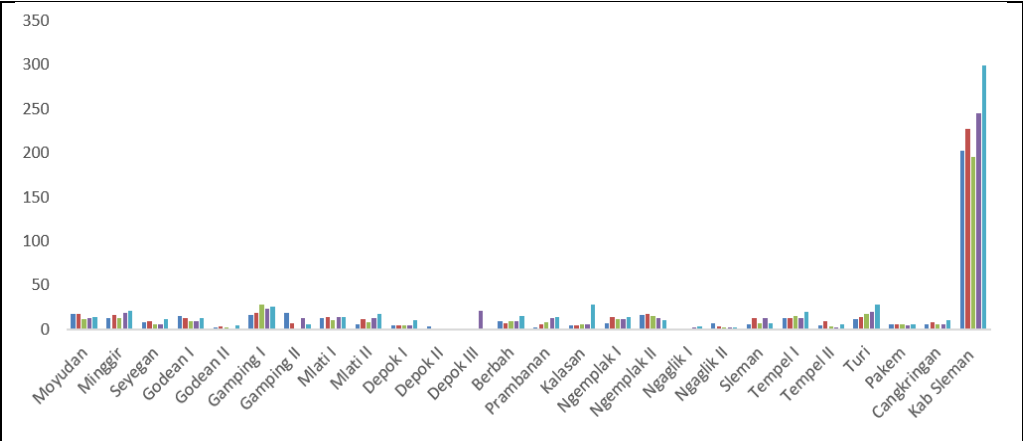
Rentang prevalensi stunting di Kabupaten Sleman pada tahun 2022 sangat tinggi, yaitu dari 4,58% (kecamatan Ngaglik) hingga 13,48% (Kecamatan Minggir) secara detail pada Gambar II-29.



Gambar II-29. Prevalensi stunting per kecamatan di Kabupaten Sleman tahun 2022

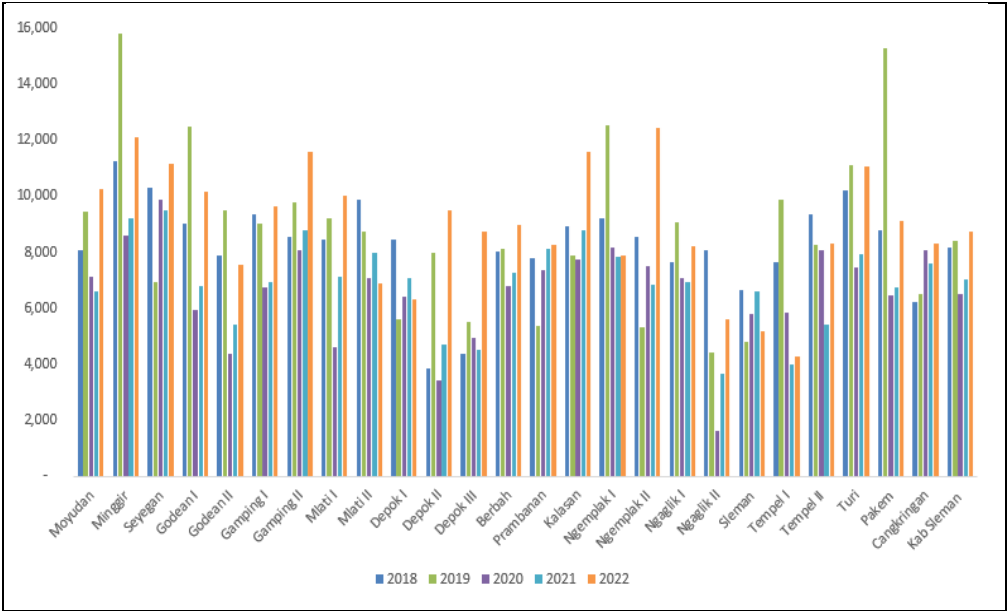
f. Balita bawah garis merah

Di Kabupaten Sleman, jumlah balita bawah garis merah mengalami kenaikan pada tahun 2018-2022, secara detail pada Gambar II-30.



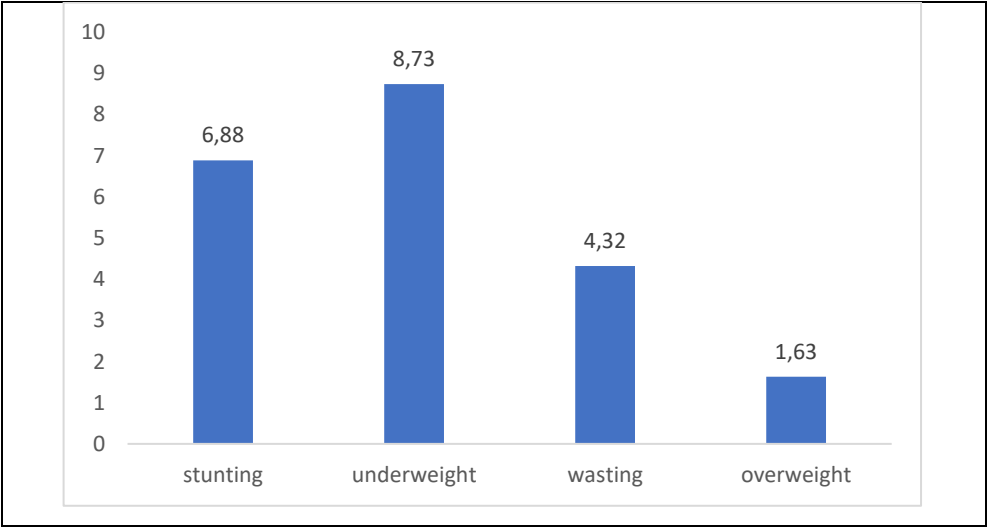
Gambar II-30. Prevalensi BGM di Kabupaten Sleman tahun 2022

- g. Balita yang menderita Kurang Energi Kronik (KEP)
- Di Kabupaten Sleman, jumlah balita yang menderita Kurang Energi Kronik (KEP) mengalami kenaikan pada tahun 2018-2022, secara detail pada Gambar II-31.



Gambar II-31. Tren prevalensi balita KEP di Kabupaten Sleman tahun 2018-2022

- h. Proporsi masalah gizi
- Masalah gizi balita meliputi stunting (indeks TB/U), wasting (indeks BB/TB), underweight (indeks BB/U) dan overweight (indeks BB/U). Di Kabupaten Sleman pada tahun 2022, jenis malnutrisi paling tinggi adalah underweight yaitu 8,73% [3]. Secara detail pada Gambar II-32.



Gambar II-32. Jenis malnutrisi pada balita di Kab Sleman tahun 2022

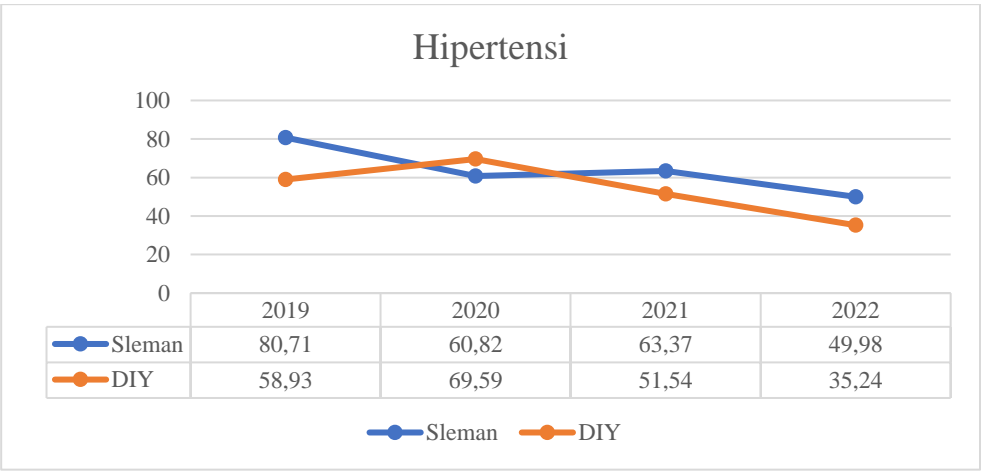
Stunting merupakan malnutrisi jangka panjang yang terjadi sejak di masa di dalam kandungan akibat ibu mengalami kurang gizi. Sedangkan underweight merupakan gizi kurang dalam jangka pendek. Namun demikian kurang gizi yang tidak segera diatasi dapat mengakibatkan kurang gizi kronis atau stunting dan meningkatkan risiko kesakitan dan kematian balita. Sedangkan wasting atau

wasted adalah malnutrisi akut yang ditandai dengan proporsi berat badan balita terhadap tinggi badannya yang terlalu kecil sehingga balita nampak kurus atau sangat kurus. Sedangkan overweight atau obesitas adalah kondisi dimana anak mengalami kelebihan berat badan dibandingkan dengan usianya[23].

i. Penyakit Tidak Menular (PTM)

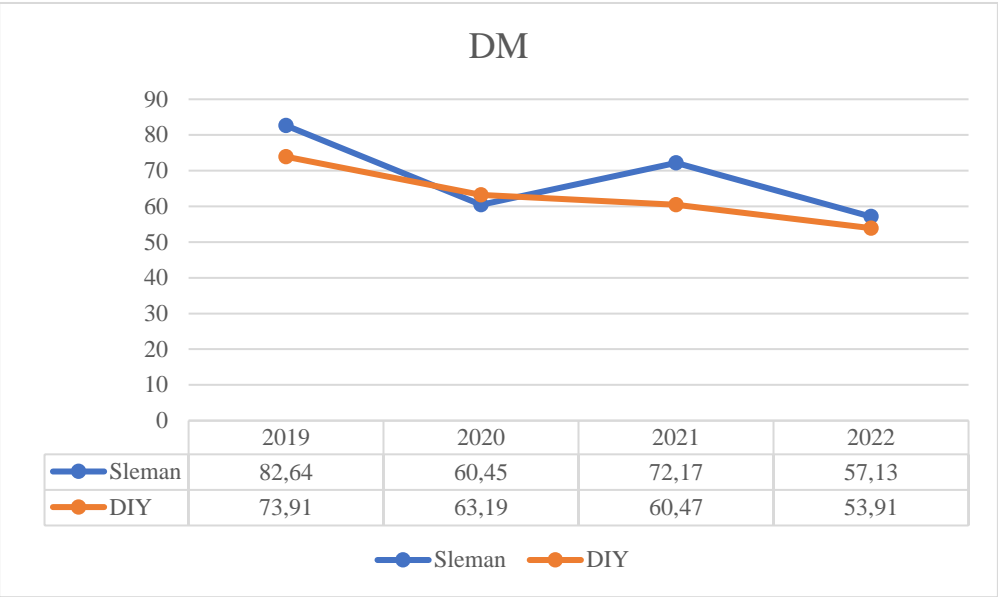
Penyakit tidak menular (PTM) terdiri dari hipertensi, diabetes melitus (DM), dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Trend prevalensi penyakit tidak menular di Kabupaten Sleman cukup tinggi, dimana DM dan hipertensi cenderung meningkat dari waktu ke waktu

Prevalensi penyakit hipertensi di Kabupaten Sleman pada tahun 2019 sebesar 80,71, lebih tinggi dibanding dengan DIY dengan angka prevalensi 58,93. Pada tahun 2020, untuk Kabupaten Sleman menurun menjadi 60,82 sedangkan DIY naik menjadi 69,59. Tahun 2021 dan 2022 prevalensi Kabupaten Sleman naik lagi menjadi 63,37 dan 49,98 lebih tinggi dibandingkan DIY sebesar 51,54 dan 35,24. Secara detil pada Gambar II-33.



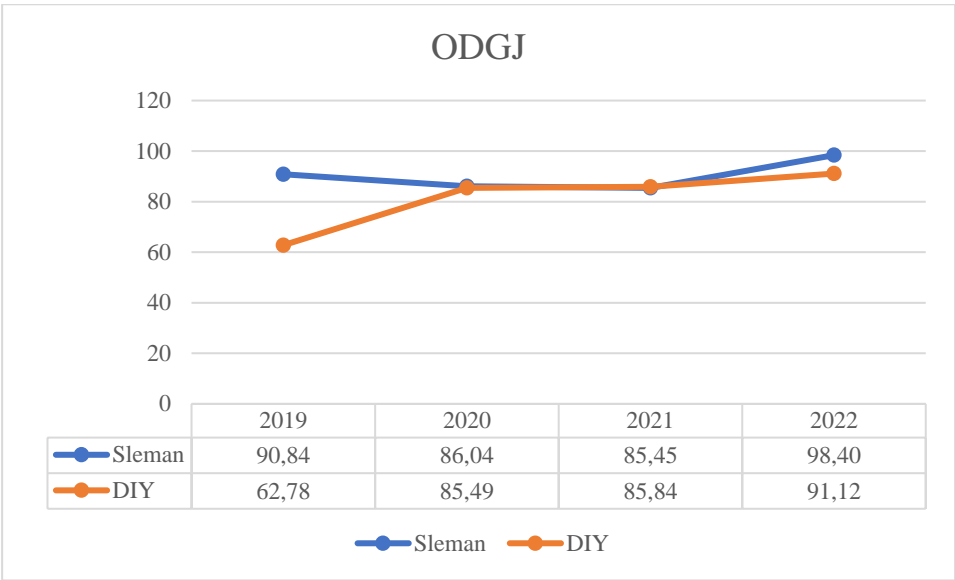
Gambar II-33. Trend prevalensi penyakit Hipertensi di Kabupaten Sleman

Berdasarkan gambar II-34, dapat dilihat bahwa prevalensi penyakit DM selama empat tahun dari tahun 2019 hingga 2022 ada kecenderungan menurun kecuali pada tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2020. Tetap apabila dibandingkan dengan DIY, prevalensi penyakit DM Kabupaten Sleman lebih tinggi.



Gambar II-34. Trend prevalensi penyakit diabetes melitus (DM) di Kabupaten Sleman

Pada gambar II-35, prevalensi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) selama empat tahun dari tahun 2019 hingga 2022 cenderung menurun kecuali pada tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021. Namun jika dibandingkan dengan DIY, prevalensi ODGJ Kabupaten Sleman lebih tinggi kecuali pada tahun 2021.



Gambar II-35. Trend prevalensi penyakit Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Sleman

2.2.4. Dampak Bencana terhadap Pangan dan Gizi

- a. Bencana, salah satunya pandemi COVID-19 telah berdampak pada kondisi meningkatkan jumlah penduduk miskin di Kabuaptan Sleman. Di sisi lain, kemiskinan di suatu wilayah senantiasa beriringan dengan keterjangkauan pangan yang pada gilirannya akan berpotensi menjadi penyebab munculnya kondisi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU). Hal ini juga dapat terjadi jika ada bencana lain, seperti erupsi

Gunung Merapi, Gempa Bumi, dan kondisi bencana lain yang dapat terjadi di Kabupaten Sleman.

- b. Penurunan permintaan mengakibatkan produk petani tidak terserap, terjadi over supply, harga turun, kesejahteraan petani turun, petani akan menurunkan produksi, dan jika tidak teratasi akan terjadi kelangkaan bahan pangan.
- c. Perubahan sistem layanan kesehatan masyarakat. Misalnya pemantauan pertumbuhan melalui Posyandu, deteksi dini PTM melalui Pandu PTM dan kegiatan lain yang bersifat UKBM terhambat. Perkembangan/pelayanan dengan metode telehealth terbatas pada kalangan yang melek teknologi informasi dan daerah yang lebih maju dengan fasilitas jangkauan internet dan hand phone yang memadai.
- d. Gangguan kesehatan mental seperti stress, depresi, cemas.

2.3. Tantangan

2.3.1. Rawan bencana

Wilayah Kabupaten Sleman termasuk wilayah rawan bencana meliputi : bencana letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin topan, gempa bumi, dan lain- lain.

2.3.2. Dampak perubahan iklim

Perubahan pola curah hujan, peningkatan frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrem, suhu lebih tinggi, dan kenaikan permukaan air laut berdampak serius terhadap sektor pertanian.

2.3.3. Transisi demografi pada bidang pertanian

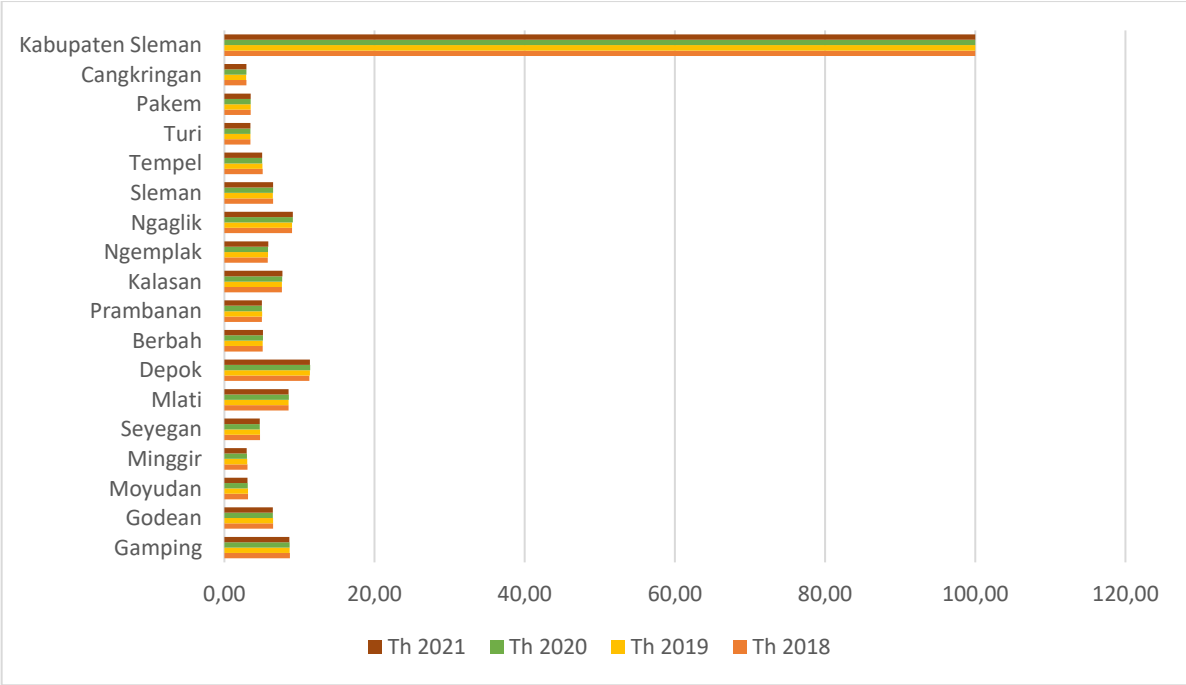
Usia petani semakin tua sementara pekerja tenaga muda cenderung memilih pekerjaan non pertanian (jasa, perdagangan, dan lain-lain), yang disertai dengan semakin berkurangnya lahan pertanian.

2.3.4. Transisi gizi

Kemajuan teknologi disertai dengan perubahan kesukaan masyarakat pada makanan, termasuk makanan yang siap saji/*fast food* dan mulai meninggalkan makanan tradisional. *Fast food* ini pada umumnya tinggi gula, garam, lemak, natrium yang meningkatkan resiko obesitas dan penyakit tidak menular lainnya. Adanya sistem pemesanan makanan secara online dengan menawarkan berbagai promosi mendukung akses pangan yang mudah sehingga pengetahuan populasi/penduduk sangat berkaitan dengan pemilihan makanan.

2.3.5. Demografi

Dari sisi demografi, jumlah penduduk Kabupaten Sleman mengalami peningkatan baik penduduk usia produktif maupun tidak produktif. Tentu hal ini selain berpengaruh terhadap ketersediaan pangan, juga berkaitan dengan tugas pemerintah dalam menyiapkan kualitas angkatan kerja, menciptakan lapangan kerja, serta menyiapkan dukungan sarana dan prasarana serta antisipasi kebutuhan layanan yang memadai untuk penduduk usia lanjut.



Gambar. II.36. Jumlah Penduduk Kabupaten Sleman Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018-2021

Sumber : Data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan data oleh Kementerian Dalam Negeri, 2022

2.4 Telaah Kebijakan

Kebijakan yang terkait dengan aspek pangan dan gizi di Kabupaten Sleman meliputi kebijakan di level internasional, nasional, provinsi dan kabupaten. Secara detail pada Tabel II-25.

Tabel II-25. Kebijakan yang mendukung Pembangunan pangan dan gizi di Kabupaten Sleman.

Level	No	Level/Jenis
Internasional	1.	SDGs goal ke 2: mengakhiri segala bentuk kelaparan
	2.	SDG’s goal ke 12: Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab
Nasional	1.	UU Kesehatan No 17 tahun 2023
	2.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
	3.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
	4.	Peraturan Presiden No 71 Tahun 2015 tentang Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
	5.	Peraturan Presiden No 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional, Merupakan kebijakan terkait dengan penjaminan pangan pokok dan strategis: beras, jagung, daging sapi/kerbau, bawang merah, bawang putih, cabai besar, daging ayam, telur ayam, gula pasir, cabai rawit, dan minyak goreng. Peraturan Presiden No 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional
	6.	Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal
	7.	Peraturan Presiden RI no 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

Level	No	Level/Jenis
	8.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
	9.	Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi
Propinsi	1.	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No 2 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
	2.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi di dukung kebijakan khusus Gubernur mengenai Program Desa Percontohan Pengurangan Kerawanan Pangan dan Kemiskinan di DI Yogyakarta sudah berdampak nyata pada pengurangan desa rawan pangan di DI Yogyakarta, terbukti di tahun 2016 dijumpai 16 desa rawan pangan berkurang secara signifikan menjadi 4 desa di tahun 2020
	3.	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Yogyakarta Sehat Lestari (Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017)
	4.	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
	5.	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Stunting Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 – 2024.
	6.	SK Gubernur DIY Nomor 201/Kep/2018 tentang Jenis dan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah telah memberikan kejelasan penjaminan kecukupan pangan di DI Yogyakarta
	7.	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2021, Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 – 2024
Kabupaten	1.	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (Perempuan Dalam Situasi Khusus Dalam Kondisi Hamil, Menyusui, Nifas, Kurang Asupan Gizi, Kekurangan Energi Kronis
	2.	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
	3.	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga
	4.	Peraturan Bupati Nomor 22.1 Tahun 2021 tentang Percepatan Penanggulangan Stunting Terintegrasi
	5	Peraturan Bupati Nomor 28.3 Tahun 2021 tentang Kewenangan Kalurahan dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Stunting terintegrasi di tingkat Kalurahan
	6	Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomo 28.3 Tahun 2021 tentang Kewenangan Kalurahan dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Stunting terintegrasi di tingkat Kalurahan
	7	Peraturan Bupati Nomor 1.6 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2021 - 2026

2.5 Hambatan Masalah Kesehatan Masyarakat

Beberapa hambatan dalam menciptakan derajat kesehatan masyarakat yang optimal di Kabupaten Sleman adalah:

1. Kemiskinan
2. Defisiensi mikro nutrient tertentu
3. Prevalensi PTM tinggi, sehingga perlu pencegahan lebih dini.
4. Tingkat pendidikan Masyarakat rata rata 10 tahun (belum taman SMA)
5. Beberapa jenis tenaga kesehatan masih kurang, terkadang yang adapun tidak bertugas di bidangnya atau profesinya.
6. Prevalensi penyakit tidak menular di Kabupaten Sleman relatif lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi.
7. Masalah *triple burden diseases* yang berpotensi pada peningkatan morbiditas dan mortalitas.
8. Defisiensi mikronutrien tertentu (terutama yang terkandung dalam sayuran).
9. Stigma masyarakat terhadap penyakit tertentu sehingga membatasi dukungan kesembuhan pasien/penderita.
10. Cakupan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) belum merata di semua tatanan masyarakat.

BAB III. RENCANA AKSI MULTI SEKTORAL

3.1. Tujuan dan Sasaran (outcome)

Tabel III-1. Intermediate Outcome dan Outcome Kabupaten Sleman

NO	INDIKATOR	BASELINE 2022	TARGET			
			2023	2024	2025	2026
INTERMEDIATE OUTCOME						
1	Ketersediaan beras (ton)	162.239,46	162.726,18	163.214,36	163.704,00	164.195,11
2	Ketersediaan pangan hewani (ton)	117.545,00	117.874,13	118.215,96	118.558,79	118.902,61
3	Skor Pola Pangan Harapan	96,6	96,7	96,8	96,9	97,00
4	Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari)	2.604,00	2.611,81	2.619,65	2.627,51	2.635,39
5	Ketersediaan protein (gram/kapita/hari)	75,8	76,0	76,2	76,4	76,6
6	Konsumsi energi (kkal/kapita/hari)	2.216,10	2.158,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7	Konsumsi protein (graml/kapita/hari)	70,5	70,7	70,9	80,1	80,3
8	Jumlah desa waspada pangan (desa)	8	7	6	5	4
9	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	37,21	37,41	37,61	37,81	38,01
10	Konsumsi daging (kg/kapita/tahun)	17,5	17,7	17,9	18,1	18,3
11	Konsumsi telur dan susu (gram/kap/hari)	31,3	31,5	31,7	31,9	32,1
12	Konsumsi sayur dan buah (gram/kap/hari)	294,4	294,6	294,8	295,0	295,2
13	Persentase makanan memenuhi syarat (%)	80,68	81,79	82,90	84,01	85,12
OUTCOME						
14	Prevalensi stunted (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) (Dinkes)	6,88	6,70	6,52	6,34	6,16

NO	INDIKATOR	BASELINE 2022	TARGET			
			2023	2024	2025	2026
	Prevalensi stunted (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) (SSGI)	15,0	14,5	14,0	13,5	13,0
15	Prevalensi wasted (kurus dan sangat kurus) pada balita (%) (Dinkes)	4,32	4,02	3,72	3,42	3,12
	Prevalensi wasted (kurus dan sangat kurus) pada balita (%) (SSGI)	6,40	5,85	5,30	4,75	4,20
16	Prevalensi obesitas pada balita (%) (Dinkes)	1,63	1,58	1,53	1,48	1,43
	Prevalensi obesitas pada balita (%) (SSGI)	3,40	3,27	3,14	3,01	2,88

Sumber : Analisis data primer, 2023

Keterangan :

1. Data NBM dari DP3 Sleman di NBM tahun 2021 tetap.
2. Data Susenas dari DP3 Sleman di Aplikasi Harmonisasi Tahun 2022.
3. NBM digunakan acuan AKE = 2.200 kkal/kapita/hari.
4. NBM digunakan acuan AKP = 63 gram/kapita/hari.
5. Susenas digunakan acuan AKE = 2.100 kkal/kapita/hari.
6. Susenas digunakan acuan AKP = 57 gram/kapita/hari.
7. Ketersediaan Pangan Hewani disini termasuk : daging (sapi, kambing, domba, kuda, babi, kerbau, ayam buras, ayam ras, dan jeroan), telur, susu dan ikan.

3.2. Ruang Lingkup

RAD-PG difokuskan dalam dalam upaya penajaman kontribusi program/kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target pembangunan pangan dan gizi yang tertuang di dalam RPJMD 2021-2026 dan dokumen kebijakan lain yang relevan seperti Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*. Tujuan, strategi dan aksi penajaman lebih difokuskan untuk menghadirkan daya ungkit sistem pangan dalam perbaikan konsumsi gizi keluarga yang beragam, seimbang dan aman yang mencakup empat tujuan strategis yaitu: 1) Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman; 2) Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman; 3) Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial); 4) Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) tahun 2023-2026 menitikberatkan pada strategi yang spesifik untuk meningkatkan daya ungkit kebijakan pangan dan gizi yang menjamin keberlangsungan produksi hingga konsumsi di tingkat rumah tangga. Selain itu, fokus kepada kelompok paling rentan segala bentuk malnutrisi (gizi kurang maupun gizi lebih) sangat penting untuk mengatasi ketimpangan. Hal tersebut dapat meningkatkan

efektifitas kebijakan dengan penggunaan sumber daya yang efisien terutama dalam kondisi pandemi dan masa transisi pasca pandemi.

3.3. Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi

3.2.1. Respon Kebijakan Pangan dan Gizi di Daerah dalam Situasi Darurat.

a) Kebijakan terkait ketersediaan pangan dan akses pangan.

Selain upaya meningkatkan produksi pangan dengan memperhatikan pemilihan kualitas bibit, meningkatkan daya guna lahan, dan meningkatkan kapasitas petani, pemerintah juga mempromosikan kebijakan pemanfaatan taman pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Pada masa pandemic COVID-19 campur tangan pemerintah dalam melakukan intervensi pada input produksi pertanian yang memiliki kontribusi relatif besar, seperti kebijakan tentang harga pupuk, benih unggul, dan pestisida serta memberikan kebijakan insentif untuk keberlangsungan usaha produsen pangan. Intervensi lain yang mungkin dilakukan adalah memberikan program pinjaman tanpa agunan untuk petani dengan memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun demikian, pemerintah perlu memastikan program stimulus sektor pertanian dapat berjalan dan untuk memastikan budi daya prioritas dapat berjalan pada musim tanam berikutnya (TNP2K, 2020).

Upaya lain yang dapat dilakukan dalam merespon situasi kegawatdaruratan antara lain:

- Mengembangkan *integrated farming*, food estate, dan korporasi petani bekerjasama dengan BUMN.
- Menggalakkan pertanian modern (traktor, cultivator, drone, irigasi tetes dll).
- Meningkatkan pemasaran dengan system online atau marketplace.
- Melakukan Asuransi tani.
- Meningkatkan cadangan pangan masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan bencana dan kegawatdaruratan.
- Penguatan pengendalian food waste dan food loss dalam rantai pasok pangan.
- Melakukan koordinasi, kolaborasi dengan perguruan tinggi, komunitas, swasta, keraton, masyarakat.
- Melakukan pemetaan potensi produksi pangan.
- Memberikan insentif bagi petani bagi pemilik lahan/petani penggarap, dan/atau kelompok tani yang lahannya termasuk dalam Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

b) Kebijakan terkait gizi dan kesehatan masyarakat

- Mensosialisasikan pedoman penanganan gizi dalam penanggulangan bencana.
- Melakukan pengkajian cepat atau *Rapid Health Assessment (RHA)*-Gizi.

- Menyediakan buffer stock MP-ASI, PMT Bumil, dan PMT Anak Sekolah.
- Menyusun menu dan merencanakan kebutuhan bahan makanan dapur umum.
- Menyusun menu dan merencanakan kebutuhan bahan makanan untuk kelompok rentan.
- Menyelenggarakan dapur khusus bayi dan anak balita darurat.
- Melakukan konseling menyusui, MP-ASI, dan PMBA.
- Surveilans Gizi.
- Melakukan pengawasan bantuan susu formula, kental manis, dan produk bayi lainnya.
- Melakukan pengawasan donasi dan bantuan pangan lainnya.
- Membuat standar porsi dan gizi pengungsi.
- Mobilisasi sumber daya untuk menunjang kegiatan sub klaster gizi.

3.2.2. Pengarusutamaan Gender dalam RAD-PG

Salah satu pendekatan penting dalam menyusun kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pangan dan gizi adalah pendekatan pengarusutamaan gender (PUG). Pengarusutamaan Gender sangat berperan dalam hal ketersediaan pangan dan gizi.

Beban ganda perempuan pekerja dan belum setaranya proses pengambilan keputusan dalam keluarga menjadi masalah gender yang mengedepan. Namun demikian di lain sisi peran yang dilekatkan kepada perempuan sebagai penanggungjawab urusan domestik, terutama dalam pemenuhan kebutuhan harian keluarga (termasuk kebutuhan pangan) dan pengasuhan anak menempatkan posisi dan peran perempuan menjadi sangat penting di suatu keluarga. Penguatan fungsi keluarga didorong untuk membangun relasi yang setara baik laki-laki dan perempuan dalam keluarga, sebagai fondasi membangun norma adil gender di masyarakat. Penguatan fungsi keluarga dibarengi dengan pendidikan kesetaraan gender bagi keluarga melalui kelembagaan yang sudah ada seperti BKB, BKL, BKR, keluarga sadar gender, Dasa wisma, PKK, desa prima, P2WKSS, dll.

Dalam bidang ketahanan pangan dan gizi, pengarusutamaan gender dapat berupa memberikan peluang kepada perempuan untuk berpartisipasi mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas dan peran, memilih bidang pekerjaan yang sesuai sehingga dapat mendukung ketahanan pangan dan gizi di tingkat rumah tangga. Selain itu, pemberdayaan perempuan dalam keluarga merupakan potensi peluang yang baik untuk dapat menyiapkan gizi bagi keluarganya melalui pemanfaatan pekarangan dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, peningkatan ketrampilan untuk mengelola gizi, kesehatan maupun kebutuhan lain yang mendukung terciptanya kesejahteraan keluarga.

BAB IV. KERANGKA PELAKSANAAN RENCANA AKSI

4.1. Strategi dan Aksi

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Pangan Dunia (FAO) merekomendasikan pentingnya integrasi sistem pangan dan orientasi kepada penyediaan makanan bergizi yang berkelanjutan hingga tingkat rumah tangga. Terdapat enam aksi yang bisa dilakukan yaitu: (1) sistem pangan yang kokoh dan berkelanjutan untuk konsumsi makanan yang bergizi; (2) integrasi pangan dan sistem kesehatan untuk menjamin akses pelayanan esensial; (3) jaminan sosial dan pendidikan gizi; (4) Investasi untuk perbaikan gizi; (5) lingkungan yang aman dan mendukung untuk pemenuhan gizi pada semua sasaran; (6) Penguatan tata kelola dan akuntabilitas sistem pangan dan gizi.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, disusun tujuan strategis dan aksi di bidang pangan dan gizi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing (Tabel IV.1).

Tabel IV-1. Rencana Aksi Pangan dan Gizi Kabupaten Sleman Tahun 2023-2026

No	Strategis	Aksi
Tujuan Strategis 1. Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman		
01.01	Peningkatan produksi pangan yang beragam	Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam
		Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal di setiap kecamatan
		Memperluas upaya pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta jaminan keamanan dan mutu pangan
		Melakukan kerjasama dengan pemerintah kecamatan untuk memasyarakatkan kegiatan pemanfaatan pekarangan dengan meningkatkan penggunaan benih bersertifikat
		Memberdayakan peran perempuan untuk ikut dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga
01.02	Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi);	Meningkatkan kerja sama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan
		Menguatkan kapasitas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk keamanan pangan asal tumbuhan
		Penguatan kapasitas pengawasan bagi lembaga Veteriner dalam rangka keamanan pangan asal hewan
		Penguatan kapasitas pengawasan bagi lembaga pengawasan mutu hasil perikanan dalam rangka keamanan pangan asal ikan
		Penguatan kapasitas industri olahan pangan skala kecil dalam rangka penjaminan keamanan pangan dan peningkatan kandungan gizi produk pangan olahan
01.03	Pengelolaan cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan di kabupaten
		Mengembangkan dukungan konstruksi lumbung pangan masyarakat di desa (LPMDes)

No	Strategis	Aksi
01.04	Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (<i>food loss</i>)	Mengembangkan pertanian modern (<i>smart farming</i>) untuk mengurangi <i>food loss</i>
		Menyediakan akses/bantuan informasi, komunikasi, dan teknologi kepada petani, nelayan, dan peternak terkait
01.05	Pengayaan nilai gizi sumber pangan melalui biofortifikasi	Mengembangkan biofortifikasi di berbagai komoditi pangan
Tujuan Strategis 2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman		
02.01	Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan;	Memanfaatkan panel harga pangan sebagai <i>Early Warning System</i> (EWS) tetap aktif terpantau dan dilaporkan
		Meningkatkan jenis komoditi pangan yang didistribusikan Toko Tani Indonesia (TTI) mencakup pangan komoditas unggulan daerah (kelompok hewani dan hortikultura) dan pangan lokal
02.02	Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga pangan;	Menyusun prognosa ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan
		Menambahkan informasi sayur dan buah sebagai komoditi yang ikut di pantau dalam panel harga pangan
02.03	Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan;	Memberdayakan kelembagaan berpotensi dan mengembangkan UMKM
02.04	Pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam;	Mengembangkan mekanisme pemanfaatan beras biofortifikasi dan fortifikasi menjadi salah satu komoditas bantuan pangan untuk penanggulangan stunting
		Mengembangkan keberagaman pangan dengan nilai gizi yang baik sebagai komoditas Kartu Sembako/BPNT
		Mengintegrasikan pelayanan gizi esensial pada program bantuan sosial untuk kelompok termarginalkan (perempuan, gelandangan, penyandang disabilitas, penyandang masalah hukum, terlantar, etnis minoritas)
		Melakukan peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK) Akseptor KB Mandiri Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan KB Lestari MKJP
02.05	Penyediaan dan penyaluran pangan untuk situasi darurat;	Revitalisasi/mengaktifkan program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) bekerjasama dengan <i>supplier</i> bahan pangan lokal di daerah masing-masing
02.06	Penumbuhan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan pangan dan terdampak bencana;	Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting
		Mendampingi daerah rentan pangan dalam perencanaan dan penyusunan program untuk ketahanan pangan dan gizi
02.07	Pengembangan sistem logistik pangan	Mengembangkan sistem logistik pangan melalui penguatan <i>supply chain ecosystem</i> berdasarkan kondisi daerah
Tujuan Strategis 3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)		
03.01	Penguatan sistem kewaspadaan pangan	Mengintegrasikan Sistem Informasi Pangan dan Gizi (SIPG) dalam rangka penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di daerah beserta pemanfaatannya

No	Strategis	Aksi
	dan gizi dan pemantauan status gizi;	Gerakan Selamatkan Pangan 2023 untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah terjadinya <i>food waste</i> berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 yang menjadi program dari pemerintah pusat
03.02	Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan pangan setiap tahun;	Meningkatkan pemanfaatan peta rawan pangan
03.03	Edukasi pola konsumsi pangan perserorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini;	Meningkatkan kegiatan advokasi penganekaragaman konsumsi pangan
		Melakukan kerjasama dengan <i>influencer</i> , tokoh masyarakat/agama/politik/selebgram lokal untuk kampanye perubahan perilaku
		Melakukan pengutamaan kampanye gerakan makan ikan (gemarikan)
		Meningkatkan komitmen pimpinan untuk mengintegrasikan pesan kunci pedoman gizi seimbang (PGS) ke dalam kurikulum pendidikan
		Melaksanakan kegiatan kampanye "isi piringku menu khas daerah/pangan lokal" di wilayah kabupaten/kota melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia secara periodik
		Melakukan peningkatan kapasitas komunikasi perubahan perilaku antar individu bagi Tenaga Pendamping di Desa (TPG, KPM, PLKB, Pendamping PKH) untuk meningkatkan kepatuhan penerima manfaat menjadi 90
		Fasilitasi Pembinaan dan KIE Pola Konsumsi Pangan
		Meningkatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dalam dalam pengendalian faktor risiko PTM melauai pola makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini
03.04	Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan;	Meningkatkan sosialisasi pentingnya pencantuman informasi kandungan nilai gizi dalam label kemasan pada UMKM pangan olahan
		Meningkatkan Sosialisasi Keamanan dan mutu Pangan Jajanan Anak Sekolah
03.05	Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan pangan	Perluasan cakupan kelompok sasaran siklus hidup dan rentan pangan yang terpenuhi kebutuhan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral
03.06	Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) berbasis pangan lokal	Cakupan pemberian ASI Eksklusif pada bayi usia 6 bulan
		Meningkatkan aksesibilitas terhadap makanan tambahan berbahan dasar pangan lokal

No	Strategis	Aksi
03.07	Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat	Mendorong untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan suplementasi gizi (makanan tambahan, TTD, dan kapsul vit. A)
		Meningkatkan tata kelola pelayanan gizi pada situasi darurat
		Meningkatkan kapasitas puskesmas dalam melaksanakan pelayanan terpadu (Pandu) PTM
		Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam Gerakan Lawan Obesitas dan pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) di desa
		Memberikan perlindungan gizi kepada pekerja perempuan (sektor swasta)
		Menginisiasi gerakan masyarakat mengurangi <i>food waste</i>
		Meningkatkan penyehatan lingkungan dan penerapan pola hidup sehat masyarakat
		Meningkatkan peran PKK dalam pendampingan keluarga untuk promosi aktivitas fisik, peningkatan konsumsi buah dan sayur, pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak
03.08	Penambahan jenis dan komposisi zat gizi (fortifikasi) pada pangan tertentu sebagai pengayaan nilai gizi	Melaksanakan Pengawasan terpadu lintas K/L/D dalam pengawasan dan pembinaan implementasi pangan fortifikasi
03.09	Peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan.	Mendorong peningkatan produk pangan segar dan pangan olahan bersertifikat
Tujuan Strategis 4. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi		
04.01	Penguatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah	Membentuk forum koordinasi lintas sektor/ pemangku kepentingan di daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan movev yang terintegrasi dengan forum koordinasi percepatan penurunan <i>stunting</i>
04.02	Penguatan peran sektor non-pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi di pusat dan daerah	Meningkatkan koordinasi jejaring lintas pemangku kepentingan (non-pemerintah) dalam <i>scaling up</i> program pangan dan gizi di daerah
		Melibatkan sektor swasta, industri dan perdagangan pangan untuk aktif melakukan kegiatan komunikasi perubahan perilaku konsumsi masyarakat, <i>food loss dan food waste</i> .
04.03	Penguatan dimensi gender dan peran perempuan dalam kelembagaan pangan dan gizi	Melakukan peningkatan kapasitas PUG dan PURG di institusi terkait pembangunan pangan dan gizi di pusat dan daerah
		Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga
		Peningkatan peran perempuan dalam implementasi pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak, peningkatan aktifitas fisik dan deteksi dini
		Mengembangkan mekanisme pengawasan sosial oleh organisasi perempuan, masyarakat dan media terhadap kebijakan ASI Eksklusif, susu formula, dan produk bayi lainnya yang berlaku

No	Strategis	Aksi
04.04	Penguatan regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi	Mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan regulasi terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
		Menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan produk inovasi pangan yang layak (memenuhi persyaratan gizi, keamanan, <i>acceptibilitas</i> , harga, <i>shelf live</i>) untuk diadopsi ke dalam pelayanan gizi
04.05	Pengembangan <i>platform</i> penelitian dan pengembangan di bidang pangan dan gizi	Meningkatkan penelitian dan pengembangan untuk pencegahan dan penanganan <i>food loss</i> dan <i>food waste</i> termasuk inovasi <i>smart farming</i>
		Pelaksanaan penelitian trans disiplin dan/atau lintas institusi terkait pencegahan dan penangana stunting pada perguruan tinggi di Kabupaten Sleman
		Menyusun kajian yang diperlukan untuk mengembangkan kebijakan pemberian suplementasi multi gizi mikro
		Mengembangkan biofortifikasi dan fortifikasi di berbagai komoditi pangan
		Menembangkan inovasi pemanfaatan pangan lokal untuk perbaikan konsumsi gizi keluarga

Sumber : data primer 2023

4.2. Pengorganisasian

Program-program intervensi pemantapan ketahanan pangan dan gizi di Kabupaten Sleman akan dilaksanakan secara *collaborative actions* dari lembaga-lembaga yang terkait. RAD-PG merupakan panduan distribusi tanggung jawab dalam pelaksanaan program-program tersebut.

Pemerintah daerah kabupaten dan kapanewon/desa membentuk forum koordinasi untuk melakukan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG). Forum koordinasi yang dimaksud adalah menggunakan forum koordinasi yang sudah ada seperti Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau membentuk forum koordinasi baru yang sekaligus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di daerah. Forum dapat dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perencanaan dan pembangunan daerah. Sedangkan keanggotaan melibatkan seluruh perangkat daerah terkait dan dapat juga menambahkan pemangku kepentingan lainnya di bidang pangan dan gizi.

4.3. Peran Sektor Non-Pemerintah (Swasta dan Lembaga Masyarakat)

Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah atau swasta dan lembaga masyarakat juga berperan untuk melaksanakan rencana aksi pangan dan gizi. Sektor non pemerintah dan lembaga masyarakat yang dapat mengambil peran adalah perguruan tinggi, lembaga profesi, lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha, dan media.

Perguruan tinggi dapat mendukung pencapaian target perbaikan pangan dan gizi melalui pelaksanaan riset operasional dan penyebaran informasi pangan dan gizi

terkini kepada mahasiswa, terutama calon tenaga kesehatan, saat proses belajar di dalam kelas. Sementara itu, lembaga profesi dapat melakukan standardisasi kompetensi tenaga gizi dan kesehatan melalui akreditasi. Peran yang dapat diambil oleh mitra pembangunan adalah untuk meningkatkan pelaksanaan perbaikan gizi melalui pembentukan *pilot project* yang akan dijadikan sebagai *best practice* untuk direplikasi. Selain itu mitra pembangunan juga dapat memberikan bantuan teknis bagi peningkatan kualitas pelaksanaan. Di sisi lain, organisasi kemasyarakatan dapat memperkuat mobilisasi, advokasi, dan komunikasi dan riset serta analisis kebijakan juga pelaksanaan kegiatan di tingkat masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi. Peranan pelaku usaha adalah dengan melakukan pengembangan produk pangan bergizi yang dapat diakses masyarakat, menjaga kualitas, distribusi ke berbagai daerah sehingga mudah dijangkau, riset, pengembangan teknologi, komunikasi, serta mendorong perilaku hidup sehat bagi karyawannya.

Kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan makanan bergizi yang terjangkau masih sangat sedikit. Di satu sisi, di perkotaan sangat mudah ditemui makanan bergizi untuk anak, namun bagi populasi di pedesaan dengan kuintil kepemilikan rendah tidak ditemukan hal yang sama. Sektor swasta sering kali tidak memilih lokasi dengan tingkat permintaan yang rendah sehingga tidak menyediakan bahan makanan ke lokasi tersebut, sehingga mengakibatkan tidak adanya makanan anak yang berkualitas bagi penduduk yang rentan tersebut. Selain rendahnya permintaan, biaya yang dikeluarkan untuk distribusi sering kali lebih besar ditambah daya beli masyarakatnya rendah, sehingga sektor swasta semakin tidak tertarik untuk menyediakan makanan ke daerah tersebut, walaupun dilakukan harganya sulit lagi terjangkau. Dengan demikian sektor swasta dapat berperan untuk menyediakan kesempatan untuk membuat makanan bergizi yang terjangkau dan mendorong karyawannya untuk menerapkan pola hidup sehat.

4.4. Pembiayaan

Penting untuk mengetahui anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program. Dengan demikian dapat diketahui jumlah dana yang diperlukan dan ketersediaan dana sehingga apabila terjadi kekurangan dapat diketahui lebih awal dan direncanakan untuk mencari alternatif pendanaan dari sumber lainnya. Besar dana indikatif untuk program dan kegiatan terdapat pada RPJMD dan Renstra OPD.

BAB V. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

5.1. Pemantauan dan Evaluasi

Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi perlu ditetapkan target atau output yang ingin dicapai, siapa saja yang berperan, apa saja input dan proses yang harus dilakukan. Namun agar lebih terukur dipilih beberapa indikator kinerja utama untuk setiap SKPD yang akan terus dipantau pencapaiannya dalam kurun waktu tertentu. Indikator diperoleh dengan memilih indikator kerjanya yang berasal dari RPJMD maupun Renstra SKPD atau kegiatan lainnya yang relevan terhadap upaya perbaikan gizi dan berkaitan dengan output dan outcome yang ingin dicapai. Indikator ini akan terus dipantau dan dievaluasi sehingga dapat mendorong tercapainya output dan outcome dari RAD- PG Tahun 2023-2026.

5.2. Waktu dan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Waktu pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dua kali dalam satu tahun melalui koordinasi yang difasilitasi oleh BAPPEDA.

5.3. Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Pelaporan dan kegiatan monev dilakukan secara periodik di setiap tahunnya. Pelaporan dilakukan oleh masing-masing SKPD dan lembaga terkait berkaitan dengan program/kegiatan yang telah dicanangkan dan realisasinya. Beberapa komponen penting yang dimuat pada Laporan Pemantauan dan Evaluasi adalah :

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Berdasarkan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi maka akan diberikan target outcome untuk melaksanakan kegiatan program-program di masing-masing dinas dan instansi terkait. Rancangan ini akan terlaksana jika adanya kerjasama di antara semua lembaga lintas sektoral sehingga rancangan ini bisa diinterpretasikan dengan langkah-langkah yang konkrit.

2. Tujuan

Berdasarkan tujuan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yaitu meningkatkan pemahaman seluruh stakeholders terkait dan masyarakat dalam peran sertanya untuk perbaikan dan pemantapan ketahanan pangan dan gizi serta meningkatkan komitmen pemangku kepentingan mulai dari perencanaan, implementasi dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing dalam rangka mencapai tujuan yaitu mewujudkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan di Kabupaten Sleman.

B. Pelaksanaan RAD-PG

1. Gambaran Umum Pencapaian Indikator Kinerja
2. Gambaran Umum Program/Kegiatan/Aksi dan Pendanaan
3. Tantangan yang Dihadapi
4. Kegiatan Dalam Mengatasi Tantangan

C. Rekomendasi dan Rencana Tahun Depan

1. Rekomendasi
2. Rencana Tahun Depan

BAB VI. PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) tahun 2023-2026 adalah rencana aksi yang berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RAD-PG tahun 2023-2026 disusun dengan pendekatan multisektor berdasarkan arah kebijakan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) tahun 2021-2024 dan RAD-PG DIY tahun 2021-2024.

RAD-PG tahun 2023-2026 disusun sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pangan dan gizi di Kabupaten Sleman. Dalam penyusunannya, RAD-PG telah mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi untuk menjaga sinergitas dan keterpaduan antar dokumen perencanaan.

Keberhasilan RAD-PG sangat bergantung terhadap dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Pusat, serta berbagai sumber anggaran lain dari sektor swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari berbagai pihak untuk mendukung implementasi program dan kegiatan yang telah disepakati dalam RAD-PG. Koordinasi dan sinergi yang baik antar berbagai pihak juga sangat diperlukan untuk mewujudkan peningkatan ketahanan pangan dan gizi di Kabupaten Sleman.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (2022). *Indikator kesejahteraan rakyat 2022 Kabupaten Sleman*.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman (2022). *Profil Kesehatan Kabupaten Sleman Tahun 2022*.
- Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman (2022). *Aplikasi Harmonisasi Analisis PPH Data Susenas Tahun 2022 Kabupaten Sleman*.
- Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman (2021). *Neraca Bahan Makanan (NBM) 2021 Tetap Kabupaten Sleman*.
- Elvina Karyadi, Melissa Chew, Claudia Rokx, Yurdhina Meilissa, Elviyanti Martin, Dharmawan, A., & Pratiwi Ayuningtyas. (2021). *Melangkah Maju : Inisiatif Lokal Dalam Menurunkan Stunting Di Indonesia*. 162. www.worldbank.org Buku
- Gropper, Sareen S. Smith, J. L. (2013). Advanced Nutrition and Human Metabolism. In *Advanced Nutrition in Human*.
- Lestariana, W., Lestari, L. A., & Syagata, A. S. (2018). High Dose of Vitamin A Supplement Decreases Bone Mineral Calcium Rate in 3-7 Weeks Old Sprague Dawley Rats. *4th UPHEC*, 129–136.
- Stanaway, J. D., Afshin, A., Ashbaugh, C., Bisignano, C., Brauer, M., Ferrara, G., Garcia, V., Haile, D., Hay, S. I., He, J., Iannucci, V., Lescinsky, H., Mullany, E. C., Parent, M. C., Serfes, A. L., Sorensen, R. J. D., Aravkin, A. Y., Zheng, P., & Murray, C. J. L. (2022). Health effects associated with vegetable consumption: a Burden of Proof study. *Nature Medicine*, 28(10), 2066–2074. <https://doi.org/10.1038/s41591-022-01970-5>
- Zempleni, J., B. Rucker, R., B. McCormick, D., & W. Suttie, J. (2007). *Handbook of Vitamins*. CRC Press.

LAMPIRAN

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023-2026

Strategi, Aksi, dan Keluaran Penajaman Program Pangan dan Gizi tahun 2023-2026

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				Sub Kegiatan	OPD/ Instansi Penanggu ngjawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
Tujuan Strategis 1. Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman														
1.1	Peningkatan produksi pangan yang beragam	Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam	Luas sentra produksi pangan lokal (tanaman pangan) Budidaya Ubikayu, Budidaya Garut	Ha	400	400	400	400	0	50	70	80	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DP3) Sleman
			Jumlah sentra produksi pangan komoditas unggulan kelompok pangan hewani (ternak)	Lokasi	4	4	4	5	1,009,15	1,009,15	1,009,15	1,009,15	Peningkatan pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/panaganaan skala kecil	DP3 Sleman
			Jumlah sentra produksi pangan komoditas unggulan kelompok pangan hortikultura (Sayur dan buah)	Lokasi (salak, jambu, cabai)	3	3	3	3	4,100,00	4,100,00	4,100,00	4,100,00	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	DP3 Sleman
			Jumlah sentra produksi pangan komoditas unggulan kelompok hewani (ikan)	Lokasi (komoditas ..)	2	3	4	5	115	310	340	370	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DP3 Sleman

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				Sub Kegiatan	OPD/ Instansi Penanggu ngjawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
		Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal di setiap kecamatan	Persentase kenaikan produksi ikan konsumsi	persen	0,3	0,3	0,3	0,3	142.94	385	385	385	– Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil – Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DP3 Sleman
			Persentase kenaikan produksi sayur	persen	0,5	0,5	0,5	0,5	4,900,00	4,900,00	4,900,00	4,900,00	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	DP3 Sleman
			Persentase kenaikan produksi buah	persen	0,5	0,5	0,5	0,5	515	515	515	515	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	
			Persentase kenaikan produksi daging ternak (daging sapi, daging ayam)	persen	0,28	0,29	0,30	0,30	968	968	968	968	Peningkatan pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/pananganan skala kecil	
			Persentase kenaikan produksi telur	persen	0,28	0,29	0,30	0,30	121	121	121	121	Peningkatan pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/pananganan skala kecil	

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				Sub Kegiatan	OPD/ Instansi Penanggu ngjawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
			Persentase kenaikan produksi susu	persen	0,28	0,29	0,30	0,30	123,12	123,12	123,12	123,120	1. Penyediaan pelayanan jasa medik veteriner	
													2. Peningkatan pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/panagaran skala kecil	
			Persentase kenaikan produksi tanaman pangan (beras, ubi kayu, ubi jalar, jagung, kacang tanah, kacang hijau)	persen	0,3	0,3	0,3	0,3	2,569,00	2,569,00	2,569,00	2,569,00	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifikasi	
		Memperluas upaya pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta jaminan keamanan dan mutu pangan	Persentase desa/kelurahan fokus lokasi penurunan stunting yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan.	Persen	67	67	67	67	1,950,00	1,950,00	1,950,00	1,950,00	Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	DP3 Sleman
			Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan dengan membangun demplot urban farming	Persen	37 (32 KWT)	38	39	40	1,950,00	1,950,00	1,950,00	1,950,00	Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	DP3 Sleman

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				Sub Kegiatan	OPD/ Instansi Penanggu ngjawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
		Melakukan kerjasama dengan pemerintah kecamatan untuk memasyarakatkan kegiatan pemanfaatan pekarangan dengan meningkatkan penggunaan benih bersertifikat	Jumlah pembinaan yang dilakukan terhadap kebun bibit kelompok secara konsisten untuk keberlanjutan kegiatan pemanfaatan pekarangan	kali	50	50	50	50	40,5	37,5	37,5	37,5	Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	DP3 Sleman
		Memberdayakan peran perempuan untuk ikut dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga	Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan di desa lokus penurunan <i>stunting</i> atau menerapkan <i>urban farming</i> .	KWT	14	16	17	18	130	160	150	150	1. Pengembangan Lumbung Mataraman 2. Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifikasi	DP3 Sleman
1.2	Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi);	Meningkatkan kerja sama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan	Jumlah asistensi/pembinaan pada Kabupaten dalam pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di kecamatan dan memiliki program Pengawasan Keamanan Pangan Daerah di <i>retailer</i> dan pasar tradisional	kali	2	2	4	4	10	15	20	25	Koordinasi tim, dan pengawasan post market produk pangan olahan	BPOM/Dinkes (anggaran dr BPOM dan Dinkes)
			Jumlah desa/kelurahan yang menerima intervensi program desa pangan aman	Desa	2	2	2	2	241,83	241,83	241,83	241,83	Program desa pangan aman	BPOM

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				Sub Kegiatan	OPD/ Instansi Penanggung jawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
		Menguatkan kapasitas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk keamanan pangan asal tumbuhan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang diuji yang memenuhi syarat keamanan pangan	persen	100	100	100	100	35,98	40	40	40	Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar kabupaten/kota	DP3 Sleman
		Penguatan kapasitas pengawasan bagi lembaga Veteriner dalam rangka keamanan pangan asal hewan	Persentase pangan segar asal hewan yang diuji yang memenuhi syarat keamanan pangan	persen	90	91	92	93	82,16	82,16	82,16	82,16	Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	DP3 Sleman
		Penguatan kapasitas industri olahan pangan skala kecil dalam rangka penjaminan keamanan pangan dan peningkatan kandungan gizi produk pangan olahan	Jumlah industri olahan pangan skala kecil/UMKM yang mendapatkan pelatihan dalam rangka menjamin keamanan pangan	UKM	460	460	400	400	272	300	300	300	Pelatihan pengurusan PIRT; Pendampingan pelatihan Halal; Teknologi Pengawetan dan pengolahan pangan	Diskop dan UKM Sleman
1.3	Pengelolaan cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan di kabupaten	Jumlah cadangan pangan pemerintah	ton	127,82	142,82	157,82	172,82	204,43	200	200	200	Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	DP3 Sleman
			Jumlah cadangan pangan masyarakat	ton	80	80	80	80	87,64	147,25	147,25	147,25	Penyediaan infrastruktur lumbung pangan	DP3 Sleman
		Mengembangkan dukungan konstruksi	Jumlah Lumbung pangan Masyarakat di desa	lumbung	8	8	8	8	-	-	-	-	Penyediaan infrastruktur lumbung pangan	DP3 Sleman

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				Sub Kegiatan	OPD/ Instansi Penanggu ngjawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
		lumbung pangan masyarakat di desa (LPMDes)	waspada dan rawan pangan											
1.4	Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (<i>food loss</i>)	Mengembangkan pertanian modern (<i>smart farming</i>) untuk mengurangi <i>food loss</i>	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pelatihan/sosialisasi untuk mengurangi <i>food loss</i> /kehilangan hasil saat panen	kelompok	2	2	2	2	42	50	50	50	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (2023) Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan (2024)	DP3 Sleman
		Menyediakan akses/bantuan informasi, komunikasi, dan teknologi kepada petani, nelayan, dan peternak terkait	Pendampingan penerapan terstandar instrument pertanian (SNI)	lembaga	1	1	1	1	360	150	150	150		BPSIP
1.5	Pengayaan nilai gizi sumber pangan melalui biofortifikasi	Mengembangkan biofortifikasi di berbagai komoditi pangan	Jumlah komoditi pangan pokok (selain padi) yang diberikan biofortifikasi	komoditas	1	1	1	1	-	-	-	-		BRIN
Tujuan Strategis 2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman														
2.1	Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan;	Memanfaatkan panel harga pangan sebagai <i>early warning system</i> (EWS) tetap aktif terpantau dan terlaporkan	Jumlah operasi pasar yang dilakukan untuk menjaga pasokan dan pengendalian harga	kali	2	2	2	2	48	50	50		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Disperinda g Sleman

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				Sub Kegiatan	OPD/ Instansi Penanggu ngjawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
			Jumlah lembaga Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) yang difasilitasi untuk stabilisasi harga	Gapoktan/ kelompok	6	6	6	6	10,45	32,5	32,5	32,5	Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat & TTI	DP3 Sleman
			Jumlah gelar pangan murah/bazar untuk menjaga pasokan dan pengendalian harga melalui Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog (17 kapanewon)	kali	68	68	68	68	-	-	-	-	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Disperinda g Sleman
			Jumlah pemantauan ketersediaan dan harga yang dimanfaatkan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga komoditas pangan pokok/strategis di tingkat dan konsumen	kali	12	12	12	12	152	151,40	182	182	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Disperinda g Sleman
			Jumlah pemantauan ketersediaan dan harga yang dimanfaatkan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga komoditas pangan pokok/strategis di tingkat produsen	kali	12	12	12	12	-	13,50	70	70	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Disperinda g Sleman
			sistem informasi pemantauan harga dan pasokan komoditas pangan pokok/strategis (harga pangan sleman & sipedas)	aplikasi	2	2	2	2	-	13,50	40	40	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Disperinda g Sleman, DP3

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				Sub Kegiatan	OPD/ Instansi Penanggu ngjawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
		Meningkatkan jenis komoditi pangan yang didistribusikan Toko Tani Indonesia (TTI) mencakup pangan komoditas unggulan daerah (kelompok hewani dan hortikultura) dan pangan lokal	Jumlah Toko Tani Indonesia/Pasar Mitra Tani (PMT) yang menyediakan dan menjual komoditi pangan beras	Toko	9	9	9	9	10,45	32,5	32,5	32,5	Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat & TTI	DP3 Sleman
			Jumlah Rumah Pangan Kita yang menyediakan dan menjual komoditi pangan sumber protein hewani/nabati, dan pangan lokal (beras)	RPK	215	235	257	281	-	-	-	-		Bulog
2.2	Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga pangan;	Menyusun prognosa ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan	Tersedianya data/informasi prognosa ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan daerah	dokumen	1	1	1	1	26,11	26,11	26,11	26,11	Penyediaan informasi harga pangan dan NBM	DP3 Sleman
		Menambahkan informasi sayur dan buah sebagai komoditi yang ikut dipantau dalam panel harga pangan	Jumlah komoditas pangan pokok/strategis sayur dan buah yang dipantau dalam sistem informasi harga pangan	komoditas	4	4	4	4	-	-	-	-	Penyediaan informasi harga pangan dan NBM	DP3 Sleman (Anggaran dari APBN)
2.3	Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan;	Memberdayakan kelembagaan berpotensi dan mengembangkan UMKM	Jumlah perwakilan UMKM yang mengikuti pelatihan kapasitas di bidang pangan	orang	460	460	460	460	210	230	255	300	Pelatihan perijinan PIRT /SLHS; Teknologi pengawetan pangan	Dinas Kop UKM
			Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi perijinan usaha	orang	225	225	225	225	165	180	200	220	Bimtek perijinan usaha	Dinas Kop UKM

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				Sub Kegiatan	OPD/ Instansi Penanggu ngjawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
2.4	Pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam;	Mengembangkan mekanisme pemanfaatan beras biofortifikasi dan fortifikasi menjadi salah satu komoditas bantuan pangan untuk penanggulangan stunting	Jumlah beras fortifikasi atau berfortifikasi yang tersedia sebagai salah satu bahan pangan untuk penanggulangan stunting	Kg	9,000	9,000	9,000	9,000	1,260	1,260	1,260	1,260	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/ kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS	DP3AP2KB
		Mengembangkan keberagaman pangan dengan nilai gizi yang baik sebagai komoditas Kartu Sembako/BPNT	Jumlah e-warong yang menyediakan jenis pangan yang beragam sesuai dengan Pedum	e-warong	383	383	383	383	-	-	-	-	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinsos Sleman
		Mengintegrasikan pelayanan gizi esensial pada program bantuan sosial untuk kelompok termarginalkan (perempuan, gelandangan, penyandang disabilitas, penyandang masalah hukum, terlantar, etnis minoritas)	Jumlah penerima bantuan sosial untuk leompok termarginalkan yang memenuhi pelayanan gizi esensial	orang	3.975	3.669	3.670	3.670	7,66	7,11	7,12	7,12	Penyediaan Permakanan	Dinsos Sleman

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				Sub Kegiatan	OPD/ Instansi Penanggu ngjawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
		Melakukan peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK) Akseptor KB Mandiri Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan KB Lestari MKJP	Jumlah kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) di Kampung Keluarga Berkualitas Percontohan dan atau di Kampung Percontohan Lain yang mendapat fasilitasi dan pembinaan PEK	kelompok	36	40	40	40	93,64	180	180	180	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/ kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKA	Dinas P3AP2KB Sleman
2.5	Penyediaan dan penyaluran pangan untuk situasi darurat;	Revitalisasi/mengaktifkan program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) bekerjasama dengan <i>supplier</i> bahan pangan lokal di daerah masing-masing	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang menyerap produk pangan yang berasal dari dalam Sleman	persen	100	100	100	100	180	180	180,	180	Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	DP3 Sleman
2.6	Penumbuhan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan pangan dan dampak bencana;	Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting	Persentase Jumlah Desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi baduta dan balita	persen	100	100	100	100	6,82	6,82	6,82	6,822	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Dinas PMK Sleman
			Persentase jumlah desa yang mengganggu untuk stunting	persen	100	100	100	100	121,39	64,93	65	65	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				Sub Kegiatan	OPD/ Instansi Penanggu ngjawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
			Jumlah Desa yang menyelenggarakan Dapur Sehat (Dapur Sehat Atasi Stunting)	kalurahan	17	34	51	68	661,96	661,96	661,96	661,96	6. -Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 7. -Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	DP3AP2KB
		Mendampingi daerah rentan pangan dalam perencanaan dan penyusunan program untuk ketahanan pangan dan gizi	Persentase desa mandiri pangan dalam tahap kemandirian	persen	100	100	100	100	107,80	70,00	70,00	70,00	Koordinasi & sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	DP3 Sleman
2.7	Pengembangan sistem logistik pangan	Mengembangkan sistem logistik pangan melalui penguatan <i>supply chain ecosystem</i> berdasarkan kondisi daerah	Tersedianya sistem informasi ketersediaan dan harga pangan untuk mendukung sistem distribusi pangan	Sistem informasi	2	2	2	2					Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Dinas Indag/DP3 Sleman
Tujuan Strategis 3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)														
3.1	Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan	Mengintegrasikan Sistem Informasi Pangan dan Gizi (SIPG) dalam rangka penguatan Sistem	Jumlah dokumen analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	dokumen	1	1	1	1	107,80	70,00	70,00	70,00	Koordinasi & sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	DP3 Sleman

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				Sub Kegiatan	OPD/ Instansi Penanggu ngjawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
	pemantauan status gizi;	Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di daerah beserta pemanfaatannya	Jumlah dokumen analisis ketersediaan pangan yang dmanfaatkan	dokumen	1	1	1	1	70	70,00	70,00	70,00	Koordinasi & sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	DP3 Sleman
		Gerakan Selamatkan Pangan 2023 untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah terjadinya <i>food waste</i> berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2021 yang menjadi program dari pemerintah pusat	Sosialisasi dan edukasi mengurangi <i>food waste</i> dari tingkat rumah tangga, restoran, warung makan, rumah sakit, perkantoran, kampus, sekolah, panti asuhan, pondok pesantren, perusahaan-perusahaan, dan semua lembaga baik formal maupun informal yang berhubungan dengan <i>food waste</i>	sosialisasi	2	5	5	5	-	15,00	20,00	20,00		DP3 Sleman
3.2	Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan pangan setiap tahun;	Meningkatkan pemanfaatan peta rawan pangan	Jumlah dokumen ketahanan dan kerentanan pangan yang dimanfaatkan	dokumen	1	1	1	1	107,80	70,00	70,00	70,00	Koordinasi & sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	DP3 Sleman
3.3	Edukasi pola konsumsi pangan perserorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini;	Meningkatkan kegiatan advokasi penganekaragaman konsumsi pangan	Jumlah sosialisasi pangan lokal/ pelatihan olahan pangan lokal	kali	2	3	4	5	202,00	167,00	167,00	167,00	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	DP3 Sleman
		Melakukan kerjasama dengan <i>influencer</i> , tokoh masyarakat/agama/p olitik/selebgram lokal untuk kampanye perubahan perilaku	Jumlah kampanye /sosialisasi untuk perubahan perilaku makan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	kali	2	3	4	5						DP3 Sleman

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				Sub Kegiatan	OPD/ Instansi Penanggungjawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
		Melakukan pengutamaan kampanye gerakan makan ikan (gemarikan)	Jumlah orang yang mengikuti KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) gerakan gemar makan ikan (gemarikan)	orang	255	445	600	600	13,99	129,25	175,00	175,00	Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	DP3 Sleman
			Jumlah orang yang mendapatkan pelatihan pengolahan ikan	orang	275	160	160	160	220	191	195	195	Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	DP3 Sleman
		Meningkatkan komitmen pimpinan untuk mengintegrasikan pesan kunci pedoman gizi seimbang (PGS) ke dalam kurikulum pendidikan	Tersusunnya dokumen KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) di seluruh sekolah SD dan SMP yang memuat konteks pangan dan gizi	dokumen	SD: 513 SMP: 124	SD: 513 SMP: 124	SD: 513 SMP: 124	SD: 513 SMP: 124	-	-	-	-		Disdik (Terdanai dengan Anggaran Sekolah)
			Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)DP3AP2KB, terintegrasi dengan UKS, sekolah Adiwiyata (LH), dan sekolah ramah anak (mengintegrasikan materi kependudukan dengan mata pelajaran)	SSK	17	17	17	17	14,1	14,1	14,1	14,1	Penyediaan data dan informasi keluarga	Disdik/LH/DP3AP2KB

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				Sub Kegiatan	OPD/ Instansi Penanggung jawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
		Melaksanakan kegiatan kampanye "isi piringku menu khas daerah/pangan lokal" di wilayah kabupaten/kota melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia secara periodik	Jumlah kampanye gizi seimbang di wilayah kabupaten/kota melalui berbagai kanal komunikasi	kali	8	10	12	12	21,96	21,96	21,96	21,96	Publikasi Media Sosial	Dinkes Sleman
		Melakukan peningkatan kapasitas komunikasi perubahan perilaku antar individu bagi Tenaga Pendamping di Desa (TPG, KPM, PLKB, Pendamping PKH) untuk meningkatkan kepatuhan penerima manfaat menjadi 90	Jumlah petugas kesehatan yang pernah mendapat pelatihan/pendampingan komunikasi perubahan perilaku antar individu.	orang	25	25	25	25	11,23	8,50	8,50	8,50	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinkes Sleman
		Fasilitasi Pembinaan dan KIE Pola Konsumsi Pangan	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita Anak (BKB) yang mendapatkan Fasilitasi Pembinaan dan KIE Pola Konsumsi Pangan yang B2SA	kelompok	14	17	17	17	835,83	856,51	856,51	856,51	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/ kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKA	Dinas P3AP2KB

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				Sub Kegiatan	OPD/ Instansi Penanggu ngjawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
			Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang mendapatkan Fasilitasi Pembinaan dan KIE Pola Konsumsi Pangan yang B2SA	kelompok	14	17	17	17	835,83	856,51	856,51	856,51	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/ kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR. BKL,PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKA	Dinas P3AP2KB
			Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang mendapatkan Fasilitasi Pembinaan dan KIE Pola Konsumsi Pangan yang B2SA	kelompok	14	17	17	17	835,83	856,51	856,51	856,51	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/ kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR. BKL,PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKA	Dinas P3AP2KB
			Jumlah Kelompok Pusat Infomasi dan Konseling Remaja (PIKR) yang mendapatkan Fasilitasi Pembinaan dan KIE Pola Konsumsi Pangan yang B2SA	kelompok	14	17	17	17	835,83	856,51	856,51	856,51	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/ kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR. BKL,PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKA	Dinas P3AP2KB
		Meningkatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dalam dalam pengendalian faktor risiko PTM melalui pola makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini	Jumlah kampanye yang melibatkan lintas sektor dan mitra kesehatan dalam rangka pengendalian faktor risiko PTM melalui pola makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini.	kali	4	4	4	4	87,5	87,5	87,5	87,5	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinkes Sleman
		Melakukan <i>orientasi agent of change</i> pencegahan penyakit tidak menular (PTM)	Jumlah orang yang sudah mengikuti orientasi agent of change PTM untuk pengendalian faktor risiko PTM melalui	orang	0	20	40	60	5,00	5,00	5,00	5,00	Pelatihan Kader Posbindu	Dinkes Sleman

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				Sub Kegiatan	OPD/ Instansi Penanggu ngjawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
			pola makan sehat dan aktivitas fisik.											
3.4	Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan;	Meningkatkan sosialisasi pentingnya pencantuman informasi kandungan nilai gizi dalam label kemasan pada UMKM pangan olahan	Jumlah UMKM yang mencantumkan Informasi Nilai Gizi (ING) dalam label kemasan sesuai peraturan BPOM No. 16 Tahun 2020 tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk pangan olahan yang diproduksi oleh UMKM.	UMKM	460	460	460	460	210	230	255	300	Pelatihan perijinan PIRT /SLHS; Halal; BPOM;	Diskop dan UKM Sleman
			Jumlah UMKM yang mencantumkan Informasi Nilai Gizi (ING) dalam label kemasan sesuai peraturan BPOM No. 16 Tahun 2020 tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk pangan olahan yang diproduksi oleh UMKM		460	460	460	460	210	230	255	300	Pelatihan perijinan PIRT /SLHS; Halal; BPOM;	Diskop dan UKM Sleman
		Meningkatkan Sosialisasi Keamanan dan mutu Pangan Jajanan Anak Sekolah	Jumlah sosialisasi tentang Keamanan dan mutu Pangan Jajanan Anak Sekolah	Sekolah	5	5	5	5	137,55	137,55	137,55	137,55		BPOM

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				Sub Kegiatan	OPD/ Instansi Penanggu ngjawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
3.5	Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan pangan	Perluasan cakupan kelompok sasaran siklus hidup dan rentan pangan yang terpenuhi kebutuhan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral	Pembiasaan mengkonsumsi makanan sehat dengan memberikan makanan tambahan untuk siswa SD dan SMP +PAUD	orang	1058	1058	1058	1058	446,57	446,57	446,57	446,57		Disdik Sleman
			Jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan kantin sehat	sekolah	30	30	30	30	27,18	30	35	40	Bimtek higiene sanitasi pengelolaan pangan bagi penyelenggara pangan non komersial	Dinkes Sleman
3.6	Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu	Cakupan pemberian ASI Eksklusif pada bayi usia 6 bulan	Cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif	persen	84,8	85	85,2	85,4	26,10	12,65	13,91	15,18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinkes Sleman
			Cakupan bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	persen	77	78	79	80	15,9	15,9	15,9	15,9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinkes Sleman

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				Sub Kegiatan	OPD/ Instansi Penanggu ngjawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
	(MP-ASI) berbasis pangan lokal	Meningkatkan aksesibilitas terhadap makanan tambahan berbasis pangan lokal	Cakupan Balita Gizi Kurang yang Mendapat Makanan Tambahan	persen	100	100	100	100	7,76	7,50	7,50	7,50	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinkes Sleman
			Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan	persen	100	100	100	100	5,4	5,4	5,4	5,4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinkes Sleman
3.7	Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat	Mendorong meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan suplementasi gizi (makanan tambahan, TTD, dan kapsul vit. A)	Cakupan Balita 6-59 bulan mendapat Kapsul Vitamin A.	persen	100	100	100	100	6,3	6,3	6,3	6,3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinkes Sleman
			Cakupan Ibu Hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	persen	87	88	89	90	27,70	28,50	29	30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinkes Sleman
			Cakupan Remaja Putri mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)	persen	62	64	66	68	35,24	35,24	35,24	35,24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinkes Sleman
			Cakupan Ibu Nifas Mendapat Kapsul Vitamin A	persen	100	100	100	100	3,24	9,00	10,00	11,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinkes Sleman
		Meningkatkan tata kelola pelayanan gizi pada situasi darurat	Penyusunan SOP tata kelola pelayanan gizi dalam situasi darurat	dokumen	1	1	1	1	10,00	10,000	10,00	10,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinkes Sleman

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				Sub Kegiatan	OPD/ Instansi Penanggu ngjawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
		Meningkatkan kapasitas puskesmas dalam melaksanakan pelayanan terpadu (Pandu) PTM	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan terpadu PTM sesuai standar (Puskesmas melakukan tatalaksana pandu PTM berdasarkan algoritma pandu PTM dan Puskesmas melakukan pendampingan saat pelaksanaan Posbindu)	persen	100	100	100	100	50,00	50,00	50,00	50,00	Pelayanan Kesehatan untuk usia produktif	Dinkes Sleman
		Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam Gerakan Lawan Obesitas dan pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) di desa	Persentase kabupaten/kota yang puskesmasnya melakukan pendampingan desa untuk kegiatan Posbindu	persen	100	100	100	100	15,00	15,00	15,00	15,00	Pelayanan Kesehatan untuk usia produktif	Dinkes Sleman
			Persentase obesitas usia ≥ 15 tahun yang dilaksanakan pengukuran deteksi dini PTM	persen	10	25	30	50	-	-	-	-	Pelayanan Kesehatan untuk usia produktif	Dinkes Sleman
		Memberikan perlindungan gizi kepada pekerja perempuan	Jumlah kegiatan sosialisasi/pembinaan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat dan Produktif pada perusahaan/sektor swasta	kegiatan	100	100	100	100	3,07	3,07	3,07	3,07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinkes Sleman
		Menginisiasi gerakan masyarakat mengurangi <i>food waste</i>	Jumlah pelatihan pengelolaan sampah organik mandiri bagi masyarakat	kali	84	20	20	20	414,22	204	224,4	246,84	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	DLH Sleman

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				Sub Kegiatan	OPD/ Instansi Penanggu ngjawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
			Sosialisasi pengurangan sampah (Gerakan bersih sungai)	kali	15	20	20	20						
			Pembinaan pengelolaan sampah kecamatan	Kapanewon	14	20	20	20						
		Meningkatkan penyehatan lingkungan dan penerapan pola hidup sehat masyarakat	Persentase Kalurahan/kelurahan yang telah mengimplementasikan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	persen	100	100	100	100	44,4	27,1	27,1	27,1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinkes Sleman
			Jumlah Sekolah (SD, SMP, SLTA) yang dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	sekolah	97	97	97	97	4,5	4,500	4,500	4,500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinkes Sleman
			Jumlah Kelompok Masyarakat penerima bantuan Hibah Sarana Prasarana Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pedesaan	Kelompok Masyarakat	26	26	26	26	4.200	4.200	4.200	4.200	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	DPUP Sleman/Dinkes Sleman
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ditingkatkan kualitasnya	unit	540	552	552	552	10.800	1.104	1.104	1.104	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	DPUP Sleman/Dinkes Sleman
		Meningkatkan peran PKK dalam pendampingan keluarga untuk promosi aktivitas fisik, peningkatan	Jumlah desa/kalurahan yang mendapatkan pembinaan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) oleh Tim Penggerak PKK	Desa/Kalurahan	86	86	86	86	-	-	-	-		PKK/ Dinas PMK

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				Sub Kegiatan	OPD/ Instansi Penanggu ngjawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
		konsumsi buah dan sayur, pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak												
3.8	Penambahan jenis dan komposisi zat gizi (fortifikasi) pada pangan tertentu sebagai pengayaan nilai gizi	Melaksanakan Pengawasan terpadu lintas K/L/D dalam pengawasan dan pembinaan implementasi pangan fortifikasi	Jumlah pengawasan terhadap NSPK SNI wajib tepung terigu, minyak goreng sawit, dan garam konsumsi	kali (Tahun 2022 sejumlah 128 produk dengan anggaran 47.272 juta)	- (Gunung Kidul)	-	-	-	-	-	-	-		BPOM (Ditentukan dari Pusat di awal tahun)
3.9	Peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan.	Mendorong peningkatan produk pangan segar dan pangan olahan bersertifikat	Jumlah unit usaha teregister PD, PH dan tersertifikat prima 2022 :	sertifikat	3	3	3	3	31,48	40	40	40	Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar kabupaten/kota	DP3 Sleman
			Jumlah unit usaha tersertifikat MD	UMKM	15	20	20	20	-	-	-	-		BPOM
			Jumlah sertifikat/izin terkait keamanan pangan bagi UMKM produk olahan pangan yang mendapatkan fasilitasi perizinan dari instansi terkait	Sertifikat/izin PIRT	250	300	350	400	250	300	350	400	Bimtek keamanan pangan bagi pemilik/penanggungjawab industri rumah tangga pangan, kunjungan lapangan dlm rangka verifikasi pemenuhan komitmen, atas SPPIRT yg telah terbit secara online	Dinkes Sleman

Tujuan Strategis 4. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				Sub Kegiatan	OPD/ Instansi Penanggu ngjawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
4.1	Penguatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah	Membentuk forum koordinasi lintas sektor/ pemangku kepentingan di daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev yang terintegrasi dengan forum koordinasi percepatan penurunan <i>stunting</i>	Jumlah kegiatan koordinasi pembangunan pangan dan gizi lintas sektor/pemangku kepentingan	kegiatan	1	1	1	1						Bappeda Sleman
4.2	Penguatan peran sektor non-pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi di pusat dan daerah	Meningkatkan koordinasi jejaring lintas pemangku kepentingan (non-pemerintah) dalam <i>scaling up</i> program pangan dan gizi di daerah	Jumlah koordinasi dengan mitra lintas pemangku kepentingan (non-pemerintah) dalam scaling up program pangan dan gizi.	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-		Dinkes Sleman
		Melibatkan sektor swasta, industri dan perdagangan pangan untuk aktif melakukan kegiatan komunikasi perubahan perilaku konsumsi masyarakat, <i>food loss</i> dan <i>food waste</i> .	Jumlah perusahaan yang aktif dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan dan gizi	Perusahaan	10	-	-	-	42,32	-	-	-		TJSP/CSR

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				Sub Kegiatan	OPD/ Instansi Penanggu ngjawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
4.3	Penguatan dimensi gender dan peran perempuan dalam kelembagaan pangan dan gizi	Melakukan peningkatan kapasitas PUG dan PURG di institusi terkait pembangunan pangan dan gizi di pusat dan daerah	Jumlah pendampingan/pelatihan PUG/PURG bagi OPD bidang ketahanan pangan, pendidikan, dan kesehatan Jumlah Perangkat daerah yang mengikuti pelatihan PUG	OPD/Instansi	48	48	48	48	7,4	7,4	7,4	7,4	advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	DP3AP2KB
			Jumlah kalurahan yang mengikuti pelatihan PUG	kalurahan	14	14	14	14	17,55	17,55	17,55	17,55	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan	DP3AP2KB
		Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga	Jumlah pendampingan terhadap lembaga masyarakat terkait PUG dan PUHA (Pengarusutamaan Hak Anak)	lembaga/organisasi wanita	40	40	40	40	122,45	122,45	122,45	122,459	advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan	DP3 Sleman/ DP3AP2KB
		Peningkatan peran perempuan dalam implementasi pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak,	Jumlah organisasi perempuan (kabupaten/kota) yang mendapatkan pelatihan dalam implementasi gerakan masyarakat	Organisasi	3	3	3	3	6,000	6,000	6,000	6,000	Pelayanan Kesehatan untuk usia produktif	Dinkes Sleman

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				Sub Kegiatan	OPD/ Instansi Penanggungjawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
		peningkatan aktifitas fisik dan deteksi dini	hidup sehat untuk mengendalikan obesitas dan PTM											
		Mengembangkan mekanisme pengawasan sosial oleh organisasi perempuan, masyarakat dan media terhadap kebijakan ASI Eksklusif, susu formula, dan produk bayi lainnya yang berlaku	Evaluasi terhadap kebijakan ASI Eksklusif, susu formula, dan produk bayi lainnya yang berlaku dengan melibatkan organisasi perempuan, organisasi masyarakat dan media (ada perbup un asi eksklusif dll)	Kali	1	1	1	1	2,10	2,10	2,10	2,10	advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan	Dinkes Sleman
4.4	Penguatan regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi	Mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan regulasi terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Penetapan Perda lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	dokumen	1	1	1	1	50	50	100	100	Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B, dan Lahan Cadangan Pangan Pertanian Berkelanjutan/LCP2B	DP3 Sleman
			Jumlah regulasi turunan dari Perda lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) (Perbup, SK Bupati, Juknis)	dokumen	1	1	1	1	50	50	100	100	Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B, dan Lahan Cadangan Pangan Pertanian Berkelanjutan/LCP2B	DP3 Sleman
		Menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan produk inovasi	Jumlah penelitian mengenai produk inovasi pangan yang layak untuk	buah	1	1	1	1	-	-	-	-		BRIN

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				Sub Kegiatan	OPD/ Instansi Penanggu ngjawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
		pangan yang layak (memenuhi persyaratan gizi, keamanan, <i>acceptibilitas</i> , harga, <i>shelf live</i>) untuk diadopsi ke dalam pelayanan gizi	diadopsi ke dalam pelayanan gizi (coklat)											
4.5	Pengembangan <i>platform</i> penelitian dan pengembangan di bidang pangan dan gizi	Meningkatkan penelitian dan pengembangan untuk pencegahan dan penanganan <i>food loss</i> dan <i>food waste</i> termasuk inovasi <i>smart farming</i>	Jumlah penelitian mengenai inovasi <i>smart farming</i> dalam mencegah <i>food loss</i> yang dapat diadopsi menjadi program pemerintah	buah	1	1	1	1	-	-	-	-		Perguruan Tinggi
		Pelaksanaan penelitian trans disiplin dan/atau lintas institusi terkait pencegahan dan penangan stunting pada perguruan tinggi di Kabupaten Sleman	Terlaksananya penelitian trans disiplin dan/atau trans institusi terkait pencegahan dan penanganan stunting	kegiatan	4	4	4	4	-	-	-	-		Perguruan Tinggi (UGM)
		Menyusun kajian yang diperlukan untuk mengembangkan kebijakan pemberian suplementasi multi gizi mikro	Jumlah Dokumen Evaluasi Pemberian suplementasi zat gizi mikro	dokumen	1	1	1	1	-	-	-	-		Dinkes Sleman

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				Sub Kegiatan	OPD/ Instansi Penanggu ngjawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
		Mengembangkan biofortifikasi dan fortifikasi di berbagai komoditi pangan	Jumlah riset ilmiah biofortifikasi di berbagai komoditi pangan (selain padi)	buah	1	1	1	1	-	-	-	-		BRIN
		Menembangkan inovasi pemanfaatan pangan lokal untuk perbaikan konsumsi gizi keluarga	Jumlah hasil riset produk inovasi pemanfaatan pangan lokal yang diterapkan untuk perbaikan konsumsi gizi keluarga	buah	1	1	1	1	-	-	-	-		BRIN
			Jumlah riset ilmiah untuk mendukung produksi RUTF dalam negeri berbahan dasar lokal	buah	1	1	1	1	-	-	-	-		BRIN